



LPPD Tahun 2023



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang



Tahun 2023

Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si
Pj. Wali Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat
Indonesia



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dengan tolok ukur indikator kinerja program-program pembangunan urusan Desentralisasi (urusan wajib dan pilihan) konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas, tugas pembantuan dan penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang dapat terselenggara dengan baik karena terbangunnya sinergitas antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kota Padang Panjang dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota dan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebagai motivasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang Panjang dan warga masyarakat Kota Padang Panjang serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 disampaikan, atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan kepada saya selaku Walikota Padang Panjang saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan bekerja sama demi kelancaran roda Pemerintahan di Kota Padang Panjang. Semoga segala upaya dan ikhtiar kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin Ya Robbal Aalamiin.

Padang Panjang, Maret 2024
Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b Data Geografis Wilayah	1
c Jumlah Penduduk	4
d Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	5
e Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	6
f Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	10
a Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	10
b Visi dan Misi Kepala Daerah	19
c Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	23
d Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	26
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	54
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	59
2.1 Capaian Kinerja Makro	59
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	59
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	61
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	83
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	92
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	93
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	155



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	158
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	158
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	158
3.4	Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	158
3.5	Saran dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	159
BAB IV.	PENERAPAN DAN PERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	158
4.1	Urusan Pendidikan	158
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	158
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	158
4.1.3	Realisasi	159
4.1.4	Alokasi Anggaran	161
4.1.5	Dukungan Personil	162
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	162
4.2	Urusan Kesehatan	162
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	162
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	163
4.2.3	Realisasi	167
4.2.4	Alokasi Anggaran	172
4.2.5	Dukungan Personil	172
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	173
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	175
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	175
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	175
4.3.3	Realisasi	176
4.3.4	Alokasi Anggaran	177
4.3.5	Dukungan Personil	178
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	178
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	179
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	179
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	179
4.4.3	Realisasi	179
4.4.4	Alokasi Anggaran	181
4.4.5	Dukungan Personil	181
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	182
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	182



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	182
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	182
4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	183
4.5.1.3 Realisasi	184
4.5.1.4 Alokasi Anggaran	185
4.5.1.5 Dukungan Personil	186
4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi	187
4.5.2 BPBD dan Kesbangpol	187
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	187
4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	187
4.5.2.3 Realisasi	188
4.5.2.4 Alokasi Anggaran	190
4.5.2.5 Dukungan Personil	190
4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi	191
4.6 Urusan Sosial	192
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	192
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	193
4.6.3 Realisasi	195
4.6.4 Alokasi Anggaran	198
4.6.5 Dukungan Personil	199
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	200
4.7 Program dan Kegiatan	201
BAB V. PENUTUP	224



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Padang Panjang menurut Kelurahan Tahun 2023	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Per Kelurahan, Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	4
Tabel 1.3 Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	5
Tabel 1.4 Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023	5
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 (per 31 Des 23).....	6
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis kelamin di Kota Padang Panjang Tahun 2023	7
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Per Desember 2023.....	8
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Per Desember 2023	9
Tabel 1.9 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Per Desember 2023	9
Tabel 1.10 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	55
Tabel 1.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	55
Tabel 1.12 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum	56
Tabel 1.13 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.....	56
Tabel 1.14 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	57
Tabel 1.15 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.....	57
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro.....	59
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	61
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil	83
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	93
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dibanding Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	95
Tabel 2.6 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	97
Tabel 2.7 Capaian Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan Tahun 2022-2023.....	98
Tabel 2.8 Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99
Tabel 2.9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) 2021-2023	100



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tabel 2.10	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	100
Tabel 2.11	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	101
Tabel 2.12	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102
Tabel 2.13	Capaian Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan Tahun 2022-2023	104
Tabel 2.14	IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	105
Tabel 2.15	Nilai Komponen IKLH Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	106
Tabel 2.16	Capaian PDRB Perkapita	108
Tabel 2.17	Capaian Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan Tahun 2022-2023	109
Tabel 2.18	Capaian Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2022-2023	113
Tabel 2.19	Capaian Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2022-2023	115
Tabel 2.20	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	117
Tabel 2.21	Capaian Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	118
Tabel 2.22	Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat	120
Tabel 2.23	Capaian Indeks Rasa Aman	123
Tabel 2.24	Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022-2023	123
Tabel 2.25	Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023	124
Tabel 2.26	Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2022-2023	126
Tabel 2.27	Capaian Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat	129
Tabel 2.28	Capaian Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Mesjid Tahun 2022-2023	130
Tabel 2.29	Aktivitas Keagamaan Mesjid Tahun 2023	130
Tabel 2.30	Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022-2023	133
Tabel 2.31	Nilai Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2023	133
Tabel 2.32	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	134
Tabel 2.33	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	134
Tabel 2.34	Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	135
Tabel 2.35	Capaian Indikator Opini BPK	138
Tabel 2.36	Capaian Indeks Inovasi Daerah	139
Tabel 2.37	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	142
Tabel 2.38	Nilai IKM 2023	142
Tabel 2.39	Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	144



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tabel 2.40	Alokasi anggaran yang melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tahun 2022 dan 2023	145
Tabel 2.41	Capaian Peran Serta Kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	146
Tabel 2.42	Capaian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022-2023	147
Tabel 2.43	Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2023	148
Tabel 2.44	Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2023	153
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	158
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pendidikan	159
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	161
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	162
Tabel 4.5	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	163
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Kesehatan	167
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	172
Tabel 4.8	Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin SDM Kesehatan Tahun 2023	172
Tabel 4.9	Kendala, Permasalahan dan Solusi Capaian SPM Tahun 2023	173
Tabel 4.10	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	175
Tabel 4.11	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pekerjaan Umum	176
Tabel 4.12	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	177
Tabel 4.13	Daftar Pegawai Dinas PUPR Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenjang Pendidikan	178
Tabel 4.14	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	179
Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Perumahan Rakyat	180
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	181
Tabel 4.17	Permasalahan dan Solusi di Urusan Perumahan Rakyat	182
Tabel 4.18	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	183
Tabel 4.19	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	184
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	185
Tabel 4.21	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan	186



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Tabel 4.22	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan	186
Tabel 4.23	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Pendidikan	187
Tabel 4.24	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	188
Tabel 4.25	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.....	189
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	190
Tabel 4.27	Data Tenaga pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.....	191
Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.....	191
Tabel 4.29	Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	193
Tabel 4.30	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	195
Tabel 4.31	Alokasi Anggaran Urusan Sosial.....	198
Tabel 4.32	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	199



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Peta Administratif Kota Padang Panjang	2
Gambar 1.2	Peta Kemiringan Lahan Kota Padang Panjang	4
Gambar 1.3	Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	22



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dan PDB Nasional Tahun 2023	98
Grafik 2.2	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2023 Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat	108
Grafik 2.3	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	110
Grafik 2.4	Perbandingan Indeks Gini Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	112
Grafik 2.5	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	114
Grafik 2.6	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	116
Grafik 2.7	Perbandingan IPM Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	117
Grafik 2.8	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	119
Grafik 2.9	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	119
Grafik 2.10	Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	121
Grafik 2.11	Perbandingan Prevalensi Tahun 2023 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	122
Grafik 2.12	Perbandingan Jumlah dan Jenis Pelanggaran Tahun 2022 dan 2023.....	125
Grafik 2.13	Perbandingan PPKS Tahun 2022 dan 2023	127
Grafik 2.14	Perbandingan Aktivitas Keagamaan di Mesjid Tahun 2022 dan 2023	131
Grafik 2.15	Perbandingan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022 dan 2023.....	133
Grafik 2.16	Evaluasi Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	136
Grafik 2.17	Bentuk Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023	139



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1 Permendagri No.18 Tahun 2019). Lebih lanjut dijelaskan bahwa LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal selama satu tahun anggaran.

Memahami dan memenuhi amanat peraturan tersebut, maka disusunlah LPPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang formatnya mempedomani sistematika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA, tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.



Kota Padang Panjang dibentuk dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan merupakan 1 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Secara geografis Kota Padang Panjang terletak antara 100020' - 100030' Bujur Timur dan 0027' - 0032' Lintang Selatan yang terletak di lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Batusangkar. Dengan posisi tersebut, maka secara strategis Kota Padang Panjang berada pada jalur perlintasan lalu lintas utama yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau.

Dengan posisi ketinggian tersebut, Kota Padang Panjang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Di samping itu Kota Padang Panjang juga mengalami intensitas gempa yang tinggi karena berada di kawasan pegunungan berapi. Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah + 23 km² atau 2.300 ha, di mana seluruh wilayah Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar. Adapun batas tersebut antara lain:

- Peta batas administrasi Kota Padang Panjang dan luas wilayah Kota Padang Panjang menurut kelurahan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

2
LPPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Secara administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat. Masing-masing Kecamatan terdiri atas 8 Kelurahan, dengan luas wilayah seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Padang Panjang menurut Kelurahan Tahun 2023

No	Wilayah	Luas (BPS)		Luas (RTRW)	
		Ha	%	Ha	%
I	Kecamatan Padang Panjang Barat	975.00	42.39	1,369.83	46.07
1	Kel. Silaing Bawah	261.00	11.35	286.42	9.63
2	Kel. Silaing Atas	54.00	2.35	16.60	0.56
3	Kel. Pasar Usang	59.00	2.57	155.45	5.23
4	Kel. Kampung Manggis	316.00	13.74	526.24	17.70
5	Kel. Tanah Hitam	72.00	3.13	236.67	7.96
6	Kel. Pasar Baru	23.00	1.00	14.82	0.50
7	Kel. Bukit Surungan	121.00	5.26	102.90	3.46
8	Kel. Balai-balai	69.00	3.00	30.73	1.03
II	Kecamatan Padang Panjang Timur	1,325.00	57.61	1,603.71	53.93
1	Kel. Koto Panjang	133.00	5.78	235.66	7.93
2	Kel. Koto Katik	101.00	4.39	220.57	7.42
3	Kel. Ngalau	145.00	6.30	180.54	6.07
4	Kel. Ekor Lubuk	280.00	12.17	254.07	8.54
5	Kel. Sigando	140.00	6.09	179.82	6.05
6	Kel. Ganting	310.00	13.48	362.66	12.20
7	Kel. Guguk Malintang	190.00	8.26	154.18	5.19
8	Kel. Tanah Pak Lambik	26.00	1.13	16.21	0.55
	Jumlah	2,300.00	100.00	2,973.54	100.00

Sumber : Data BPS dan Hasil Perhitungan secara Planimetris (Peta RTRW)

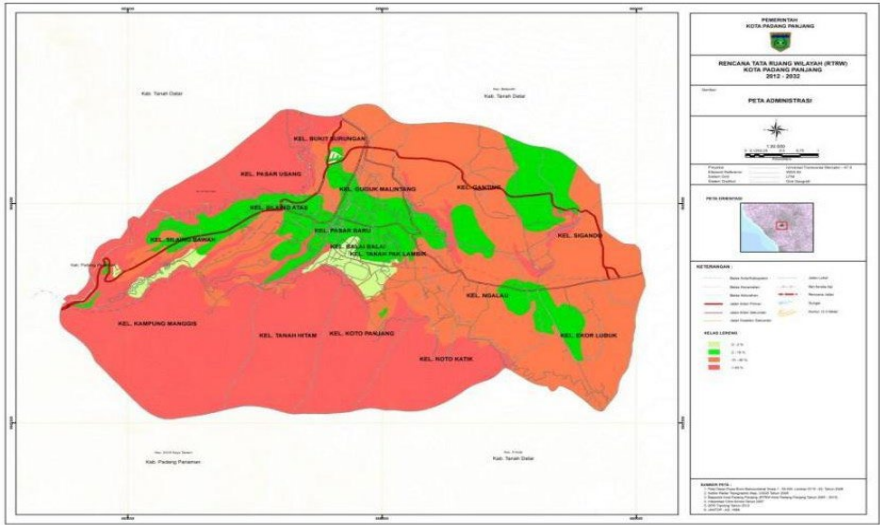
Secara Topografi Kota Padang Panjang terletak pada ketinggian berkisar antara 550-900 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan peta kemiringan lahannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kemiringan lahan 0-2 persen terdapat di bagian barat dan tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 66,49 Ha atau 2,30 persen dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.
- 2) Kemiringan lahan 2-15 persen membentang dari barat ke timur di bagian tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 479,70 Ha atau 16,13 persen dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.
- 3) Kemiringan Lahan 15-40 persen membentang dari barat ke timur dengan luas sekitar 1.072,31 Ha atau 36,06 persen dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang.
- 4) Kemiringan Lahan >40 persen membentang dari utara ke selatan dengan Luas lahan sekitar 1.353,04 Ha atau 45,50 persen dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

Secara lebih jelas mengenai kondisi kemiringan lahan Kota Padang Panjang dapat dilihat gambar 1.2 berikut :



Gambar 1. 2
Peta Kemiringan Lahan Kota Padang Panjang



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang 2012-2032

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 62.731 jiwa dengan rincian 31.538 jiwa penduduk laki-laki dan 31.193 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang hingga semester II tahun 2023 adalah 18.453 KK. Rincian data jumlah penduduk Kota Padang Panjang per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per Kelurahan, Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	KELURAHAN	PENDUDUK			JUMLAH KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
I	PADANG PANJANG TIMUR	13.631	13.426	27.057	7.861
1	GANTING	1.743	1.705	3.448	961
2	SIGANDO	1.093	1.033	2.126	617
3	EKOR LUBUK	1.411	1.335	2.746	836
4	NGALAU	1.686	1.703	3.389	988
5	GUGUK MALINTANG	3.570	3.638	7.208	2.022
6	KOTO PANJANG	2.462	2.377	4.839	1.440
7	KOTO KATIAK	693	658	1.351	410
8	TANAH PAK LAMBIAK	973	977	1.950	587
II	PADANG PANJANG BARAT	17.907	17.767	35.674	10.592
1	BUKIT SURUNGAN	1.316	1.364	2.680	795
2	PASAR USANG	1.959	1.999	3.958	1.203
3	KAMPUNG MANGGIS	4.057	3.912	7.969	2.327
4	SILAIANG BAWAH	3.292	3.239	6.531	1.918
5	SILAIANG ATAS	1.311	1.260	2.571	757
6	PASAR BARU	874	878	1.752	500
7	TANAH HITAM	1.911	1.951	3.862	1.205
8	BALAI-BALAI	3.187	3.164	6.351	1.887
	JUMLAH	31.538	31.193	62.731	18.453

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Selama tahun 2023 Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,72% dibandingkan dengan tahun jumlah penduduk pada tahun 2022. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Kelurahan Koto Katiak yaitu 6,04%. Di samping itu, terdapat beberapa kelurahan yang pertumbuhan penduduknya negatif atau mengalami penurunan jumlah penduduk dibanding tahun 2022. Perkembangan penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK TAHUN 2022			PENDUDUK TAHUN 2023			PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
I	PADANG PANJANG TIMUR	13.239	13.005	26.244	13.631	13.426	27.057	3,10
1	GANTING	1.666	1.633	3.299	1.743	1.705	3.448	4,52
2	SIGANDO	1.053	1.005	2.058	1.093	1.033	2.126	3,30
3	EKOR LUBUK	1.364	1.297	2.661	1.411	1.335	2.746	3,19
4	NGALAU	1.634	1.648	3.282	1.686	1.703	3.389	3,26
5	GUGUK MALINTANG	3.530	3.559	7.089	3.570	3.638	7.208	1,68
6	KOTO PANJANG	2.405	2.305	4.710	2.462	2.377	4.839	2,74
7	KOTO KATIAK	643	631	1.274	693	658	1.351	6,04
8	TANAH PAK LAMBIAK	944	927	1.871	973	977	1.950	4,22
II	PADANG PANJANG BARAT	17.502	17.329	34.831	17.907	17.767	35.674	2,42
1	BUKIT SURUNGAN	1.304	1.322	2.626	1.316	1.364	2.680	2,06
2	PASAR USANG	1.943	1.982	3.925	1.959	1.999	3.958	0,84
3	KAMPUNG MANGGIS	3.915	3.753	7.668	4.057	3.912	7.969	3,93
4	SILAIANG BAWAH	3.251	3.193	6.444	3.292	3.239	6.531	1,35
5	SILAIANG ATAS	1.318	1.258	2.576	1.311	1.260	2.571	(0,19)
6	PASAR BARU	828	839	1.667	874	878	1.752	5,10
7	TANAH HITAM	1.826	1.886	3.712	1.911	1.951	3.862	4,04
8	BALAI-BALAI	3.117	3.096	6.213	3.187	3.164	6.351	2,22
	JUMLAH	30.741	30.334	61.075	31.538	31.193	62.731	2,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2024,

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Secara administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat. Masing-masing Kecamatan terdiri atas 8 Kelurahan, dengan luas wilayah seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
A	Kecamatan Padang Panjang Barat	975	42,39
	1. Silaing Bawah	261	11,35
	2. Silaing Atas	54	2,35
	3. Pasar Usang	59	2,57
	4. Kampung Manggis	316	13,74
	5. Tanah Hitam	72	3,13
	6. Pasar Baru	23	1
	7. Bukit Surungan	121	5,26
	8. Balai – Balai	69	3



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
B	Kecamatan Padang Panjang Timur	1325	57,61
	1. Koto Panjang	133	5,78
	2. Koto Katik	101	4,39
	3. Ngalau	145	6,3
	4. Ekor Lubuk	280	12,17
	5. Sigando	140	6,09
	6. Ganting	310	13,48
	7. Guguk Malintang	190	8,26
	8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Jumlah/Total		2.300	100

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan jumlah pegawai tahun 2023 sebanyak 1.834 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 682 PNS laki - laki dan 1.152 PNS perempuan, yang tersebar di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS terbanyak terletak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena di domisiasi oleh PNS guru yang tersebar di beberapa SD dan SMP di Kota Padang Panjang. Secara lebih rinci sebaran jumlah PNS di Kota Padang Panjang berdasarkan OPD yang ada di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023
(per 31 Des 23)

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Daerah	59	40	99
2	Sekretariat DPRD	12	10	22
3	Inspektorat	20	11	31
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	16	31
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	20	35
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112	388	500
7	Dinas Kesehatan	22	176	198
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	21	22	43
9	Dinas Pangan dan Pertanian	27	17	44
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	15	47
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31	15	46
12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	26	37
13	Dinas Perhubungan	40	9	49
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	27	20	47
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	11	18
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9	17	26
17	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	31	7	38



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
18	Rumah Sakit Umum Daerah	49	238	287
19	Kecamatan Padang Panjang Barat	37	26	63
20	Kecamatan Padang Panjang Timur	46	26	72
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	17	12	29
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	10	21
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	11	24
24	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	18	9	27
TOTAL		682	1.152	1.834

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2024

Selanjutnya di Kota Padang Panjang terdapat PNS dengan golongan IV sebanyak 274 orang, dengan rincian 108 PNS laki-laki dan 166 PNS perempuan. Sedangkan PNS yang paling banyak berada pada golongan III dengan total 1.295 orang dan terbagi kepada beberapa tingkat golongan III tersebut. Secara rinci komposisi PNS Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis kelamin
di Kota Padang Panjang Tahun 2023

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	IV/e	0	0	0
	IV/d	1	0	1
	IV/c	21	12	33
	IV/b	27	46	73
	IV/a	59	108	167
	Total	108	166	274
2	III/d	136	297	433
	III/c	102	237	339
	III/b	94	204	298
	III/a	96	129	225
	Total	428	867	1.295
3	II/d	72	64	136
	II/c	51	50	101
	II/b	8	1	9
	II/a	6	3	9
	Total	137	118	255
4	I/d	8	1	9
	I/c	1	0	1
	I/b	0	0	0
	I/a	0	0	0
	Total	9	1	10
Total		682	1.152	1.834

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS dari tahun tahun 2022 yakni sebanyak 1917 orang menjadi 1.834 tahun 2023, atau turun sebanyak 83 orang, adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, meninggal dunia, pensiun atas permintaan sendiri, adanya mutasi ke luar daerah.



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.568.394.580.757,00 Target ini dapat direalisasikan sebesar Rp.549.373.267.510,40 (96,65%). Pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sebesar Rp.111.360.094.521,00. Sementara realisasi adalah sebesar Rp.101.159.796.680,40 atau 90.84% yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Komponen Dana perimbangan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.453.424.486.236,00 dengan realisasi sebesar Rp.444.493.468.641,00 atau 98,03% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp.3.610.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.720.002.189,00 atau 103.05%. yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Rincian realisasi pendapatan menurut jenis pendapatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Per Desember 2023

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	568.394.580.757,00	549.373.267.510,40	96,65	19.021.313.246,60
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.360.094.521,00	101.159.796.680,40	90,84	10.200.297.840,60
4.1.01.	Pajak Daerah	10.273.100.000,00	10.368.587.037,00	100,93	-95.487.037,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.947.000.000,00	4.951.418.406,00	83,26	995.581.594,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.345.866.623,00	7.345.866.623,00	100,00	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	87.794.127.898,00	78.493.924.614,40	89,41	9.300.203.283,60
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	453.424.486.236,00	444.493.468.641,00	98,03	8.931.017.595,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	421.838.947.102,00	420.537.370.396,00	99,69	1.301.576.706,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	412.346.128.102,00	411.044.551.396,00	99,68	1.301.576.706,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.492.819.000,00	9.492.819.000,00	100,00	0,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.585.539.134,00	23.956.098.245,00	75,85	7.629.440.889,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	31.585.539.134,00	23.956.098.245,00	75,85	7.629.440.889,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.610.000.000,00	3.720.002.189,00	103,05	-110.002.189,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.610.000.000,00	3.720.002.189,00	103,05	-110.002.189,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Pada tahun 2023, realisasi belanja Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar Rp.627.319.623.960,00 dengan realisasi sebesar Rp.560.604.099.846,51 atau dengan capaian 89,36%, dari total anggaran belanja yang tersedia.

- a. Belanja Operasional, direncanakan sebesar Rp.537.381.490.455,00 dengan realisasi sebesar Rp.500.526.647.773,12 atau 93,14%.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.89.296.523.005,00 dengan realisasi sebesar Rp.60.005.452.073,39 atau 67.20%.
- c. Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp.641.610.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.72.000.000,00 atau 11,22%.

Adapun rincian realisasi belanja menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Per Desember 2023

No	Uraian	Target	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	627.319.623.960,00	560.604.099.846,51	89,36	66.715.524.113,49
5.1.	BELANJA OPERASI	537.381.490.455,00	500.526.647.773,12	93,14	36.854.842.681,88
5.1.01.	Belanja Pegawai	279.079.029.831,00	269.913.737.971,00	96,72	9.165.291.860,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	236.930.708.244,00	213.027.916.239,39	89,91	23.902.792.004,61
5.1.05.	Belanja Hibah	18.282.332.380,00	14.925.838.562,73	81,64	3.356.493.817,27
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3.089.420.000,00	2.659.155.000,00	86,07	430.265.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	89.296.523.005,00	60.005.452.073,39	67,20	29.291.070.931,61
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.498.576.804,00	8.180.468.257,00	77,92	2.318.108.547,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.038.702.251,00	41.765.626.953,65	61,39	26.273.075.297,35
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.874.279.950,00	9.223.976.168,74	93,41	650.303.781,26
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	884.964.000,00	835.380.694,00	94,40	49.583.306,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	641.610.500,00	72.000.000,00	11,22	569.610.500,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	641.610.500,00	72.000.000,00	11,22	569.610.500,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

Pembiayaan merupakan konsekwensi dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk surplus atau defisit. Secara keseluruhan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.59.925.043.203,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (Tahun 2022), dengan realisasi sebesar Rp.58.710.083.114,00 atau 97.97%. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sisa lebih pembiayaan untuk realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 47.479.250.777,89. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Per Desember 2023

No	Uraian	Target	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	58.925.043.203,00	58.710.083.114,00	99,64	214.960.089,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.925.043.203,00	58.710.083.114,00	97,97	1.214.960.089,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.710.083.114,00	58.710.083.114,00	100	0,00



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Uraian	Target	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.214.960.089,00	0,00	0	1.214.960.089,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.925.043.203,00	58.710.083.114,00	97,97	1.214.960.089,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	58.925.043.203,00	58.710.083.114,00	99,64	58.925.043.103,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	47.479.250.777,89	0	-47.479.250.777,89

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, 2023

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

a) Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah

Permasalahan terhadap produktifitas ekonomi masyarakat di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan oleh angka laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2017-2021 di bawah 6 persen per tahun dan mengalami tren yang menurun, dan tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat signifikan (-1,44 persen). Walaupun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sudah membaik di angka 3,46 persen, namun masih menyisakan tugas berat untuk memulihkan kembali perekonomian yang porak poranda akibat pandemi Covid-19.
- 2) Ketimpangan pendapatan masyarakat relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar dan mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021.
- 3) Masih relatif rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah, seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pariwisata dan sektor pertanian. Walaupun di tahun 2021 pertumbuhan sektor unggulan ini sudah mulai membaik namun masih membutuhkan upaya ekstra untuk memulihkannya pasca pandemi covid-19.
- 4) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pusat perdagangan/ pasar.

b) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Permasalahan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang Panjang antara lain :

- 1) Belum optimalnya integrasi dan kolaborasi program kemiskinan yang dilaksanakan sehingga target penurunan angka kemiskinan tidak tercapai.
 - a. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam upaya penanggulangan



kemiskinan.

- b. Masih adanya karakter masyarakat yang enggan keluar dari kemiskinan.
- c. Masih relative tingginya angka pengangguran Kota Padang Panjang jika dibandingkan dengan beberapa kota di Sumatera Barat.
- d. Relatif terbatasnya lapangan kerja yang ada di Kota Padang Panjang.

2) Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter

Permasalahan terhadap kualitas Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter di Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Belum meratanya kualitas pendidikan disetiap sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.
- b. Belum meratanya kualitas lulusan pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan terhadap dunia kerja.
- c. Belum optimalnya penyelenggaran Pendidikan usia dini.
- d. Belum optimalnya standarisasi sarana dan prasarana Pendidikan.
- e. Belum optimalnya upaya membentengi moral dan karakter siswa, serta belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah masyarakat
- b. Penanganan stunting belum optimal
- c. Masih adanya kasus kematian ibu dan balita
- d. Belum optimalnya sumber daya pelayanan kesehatan
- e. Cakupan Universal Coverage Immunization (UCI) belum mencapai 100 persen.
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga sebagai wadah olah raga rekreasi dalam rangka memicu kebiasaan hidup sehat.

4) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan

Permasalahan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih. Meskipun cakupan layanan air bersih Kota Padang Panjang mendekati 100 persen, namun kualitas air yang mengalir di rumah penduduk masih belum memadai.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik baik setempat maupun komunal.
- c. Belum optimalnya ketersediaan drainase dan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan disabilitas.



-
- d. Belum optimalnya ketersediaan Sarana publik, termasuk RTH yang responsive gender dan ramah disabilitas.
 - e. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang sesuai dengan RTRW.
 - f. Masih cukup tingginya jumlah sampah yang dibuang ke TPA sementara kapasitas TPA sudah semakin terbatas.
 - g. Belum optimalnya sistem ketahanan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- 5) Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya
- Permasalahan terhadap peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya di Kota Padang Panjang antara lain :
- a. Belum optimalnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.
 - b. Belum optimalnya penegakan Perda.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan peran lembaga adat dalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga terjadi pergeseran dan perubahan yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang bercirikan ABS-SBK.
 - d. Belum optimalnya ketahanan keluarga sehingga berdampak pada tingkat kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta pembentukan karakter anak.
 - e. Belum adanya keterlibatan kelembagaan adat dalam dunia pendidikan, sehingga masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan siswa terhadap budaya dan adat istiadat.
 - f. Kurangnya eksistensi dan perkembangan sanggar budaya di Padang Panjang
- 6) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN
- Permasalahan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN di Kota Padang Panjang antara lain :
- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN.
 - b. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.
 - d. Belum optimalnya pemerataan penyebaran SDM aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan dan serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mewujudkan kelembagaan yang ramping dan kaya fungsi.

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintah merupakan penjelasan terhadap masalah yang perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan oleh perangkat



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Permasalahan sebagaimana dimaksud menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi seluruh Perangkat Daerah berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Adapun permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum semua anak usia 0-6 tahun masuk sekolah pendidikan anak usia dini.
- b. Belum terqualifikasinya pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai standar pendidik.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Kekurangan tenaga pengajar dan fungsional pengawas.
- e. Belum optimalnya pembentukan dan peningkatan pendidikan karakter.
- f. Belum optimalnya peran pelaku pendidikan.
- g. Belum optimalnya pembentukan dan peningkatan pendidikan karakter.
- h. Belum optimalnya peran pelaku pendidikan

2. Urusan Kesehatan

- a. Belum optimalnya perilaku hidup bersih sehat pada masyarakat, sehingga capaian indeks masyarakat sehat relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh angka persentase keluarga sehat tahun 2020 yang baru mencapai 33 persen, turun dibanding tahun 2019 pada angka 39 persen.
- b. Belum optimalnya Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada masyarakat, dimana capaian 10 indikator sehat pada tahun 2020 baru mencapai 55 persen.
- c. Masih adanya kasus kematian bayi dan kematian ibu.
- d. Status gizi masyarakat belum optimal, dimana angka stunting tahun 2020 adalah sebesar 16,8 persen atau 734 balita.
- e. Perlunya penanganan penyakit tidak menular, hal ini dapat dilihat dari Hipertensi menjadi peringkat ke-2 dan penyakit jantung menjadi peringkat ke-6 dari 10 penyakit terbanyak di Kota Padang Panjang.
- f. Masih rendahnya optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, hal ini dapat dilihat dari Indeks keluarga Sehat (IKS) Kota Padang Panjang adalah 0,337 dengan kategori keluarga tidak sehat (<0,500).
- g. Belum optimalnya pemanfaatan Posyandu, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kunjungan kunjyngan POsyandu, yakni 75 persen.
- h. Cakupan Imunisasi dasar (UCI) masih dibawah target Nasional (91,38 persen).
- i. Belum tercapainya cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen terhadap



pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat, dimana pada tahun 2019 mencapai 95,15 persen.

- j. Masih ditemukan makanan beredar yang tidak memenuhi standar.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
- b. Belum optimalnya implelementasi penataan ruang dan bangunan gedung.
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana air limbah baik individu maupun komunal.
- d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas drainase perkotaan yang berdampak terhadap banjir.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat backlog ketersediaan perumahan di Kota Padang Panjang.
- b. Masih cukup banyak kondisi rumah yang tidak layak huni di Kota Padang Panjang
- c. Adanya potensi penambahan kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.
- d. Meningkatnya potensi run off akibat kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda.
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, terutama sekali ketersediaan PPNS yang sangat minim.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.
- d. Posisi Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan memberi dampak terhadap potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- f. Belum tersedianya sistem peringatan dini bencana.
- g. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana.

6. Urusan Sosial

- a. Belum terintegrasinya penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang dan belum adanya komitmen antara pemerintah daerah dengan masyarakat miskin yang ditangani/dientaskan.
- b. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan PMK
- c. Belum optimalnya penanganan PMKS



II. Urusan Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja dan Penanaman Modal

- a. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah.
- b. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
- c. Terbatasnya lapangan kerja di Kota Padang Panjang.
- d. Kurangnya jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- e. Kurangnya daya tarik dan dukungan iklim usaha investasi

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan responsive gender.
- c. Belum optimalnya ketahanan keluarga dalam membentengi anak dalam pengaruh lingkungan serta perkembangan teknologi.
- d. Belum optimalnya perwujudan Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak

3. Urusan Pangan

- a. Kurangnya diversifikasi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
- b. Belum optimalnya pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat yang memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

4. Urusan Lingkungan Hidup.

- a. Buruknya tingkat pencemaran air dan cenderung menurunnya kualitas air, yang ditunjukkan rendahnya indeks kualitas air. Salah satu faktor penyebab adalah debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.
- b. Masih tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA/belum optimalnya upaya pengurangan sampah yang menyebabkan TPA sampah Kota Padang Panjang sudah memasuki masa kritis
- c. Masih rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah langsung ke media lingkungan, masih banyak usaha yang belum memiliki izin lingkungan, dll
- d. Adanya potensi penurunan ruang terbuka hijau perkotaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan perumahan.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum seluruh masyarakat memahami dan sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk pelayanan secara online.



-
- b. Kurangnya ketersediaan SDM dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Belum optimalnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang terlihat dari masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum optimalnya sinergitas perangkat daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dan kapasitas kader pembangunan dalam pembangunan.
- c. Belum optimalnya kapasitas aparatur di kelurahan.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya pengendalian penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.
- b. Masih tingginya unmetneed.
- c. Belum digunakannya grand design pembangunan kependudukan (GDPK) secara maksimal.
- d. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
- e. Masih adanya keluarga Pra KS dan KS1.

8. Urusan Perhubungan

- a. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran pengguna jalan terhadap peraturan perundangan-undangan berlalu lintas, sehingga terjadi peningkatan angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas.
- b. Tidak berkembangnya angkutan umum sebagai sarana angkutan masal akibat semakin berkembangnya angkutan informal
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana parkir yang memadai

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya fungsi command centre.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jaringan teknologi informasi (intranet) yang ada oleh Perangkat Daerah, sebagai sarana pertukaran, pengolahan data dan informasi.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e- government) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
- d. Belum optimalnya penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait melalui website Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Belum optimalnya penerapan koperasi pola syariah.
- b. Masih terbatasnya kemampuan pengurus dan pengawas dan pengelola koperasi dalam



penerapan koperasi pola Syariah.

- c. Belum optimalnya kenaikan aset dan omset UMKM terutama pasca pandemi Covid-19 terkait keterbatasan modal usaha dan pemasaran.

11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum adanya regulasi pendukung untuk menunjang kegiatan kepemudaan.
- b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga di Kota Padang Panjang.

12. Urusan Kebudayaan

- a. Belum maksimalnya peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah.
- b. Masih kurangnya pemahaman dan penerapan nilai agama dan budaya oleh masyarakat

13. Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya penyediaan buku yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Kurangnya relawan pengelola Taman Bacaan Masyarakat.
- c. Kurangnya tenaga pustakawan

14. Urusan Kearsipan

- a. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola arsip.
- b. Kurangnya kepedulian dan kerjasama Perangkat Daerah terhadap pengelolaan dan penataan arsip.
- c. Masih rendah pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan arsip.

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

- a. Belum optimalnya budidaya perikanan akibat keterbatasan sarana dan teknologi.
- b. Belum optimalnya usaha pengolahan ikan akibat keterbatasan sarana, teknologi dan pemasaran.

2. Urusan Pariwisata

- a. Belum adanya Rencana Induk Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai acuan dalam pengembangan pariwisata di Kota Padang Panjang.
- b. Belum optimalnya dari tarik objek wisata.
- c. Belum optimalnya pengelolaan objek-objek wisata.

3. Urusan Pertanian

- a. Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian.
- b. Penurunan populasi ternak sapi perah karena penjualan sapi oleh peternak.
- c. Belum optimalnya hasil produksi dan pemasaran susu sapi perah

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

- a. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengelolaan pasar.
- b. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pedagang informal.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- c. Masih belum berkembangnya UPT Kulit karena keterbatasan jumlah masyarakat yang menyamak/ kekurangan bahan mentah.
- d. Belum tertatanya lokasi industri yang ada di Kota Padang Panjang.
- e. Belum optimalnya produktivitas sektor industri dan pemahaman kewirausahaan masyarakat.

5. Pendukung Urusan Pemerintahan

- a. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Belum optimalnya ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

IV. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

- a. Belum optimalnya sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan.
- b. Rendahnya kepedulian dan pemanfaatan dari seluruh lini pemerintah daerah terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan.
- c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.

2. Unsur Keuangan

- a. Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah belum optimal.
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- c. Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan asli daerah karena terbatasnya sumber dan potensi pendapatan asli daerah.

3. Unsur Kepegawaian dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN.
- b. Alokasi, kuantitas dan distribusi ASN yang belum seimbang.
- c. Belum optimalnya budaya kerja aparatur.
- d. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional masih rendah.
- e. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan beban kerja dan prestasi kerja.
- f. Pengembangan SDM aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi

4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan program dan kebijakan.
- b. Belum tergalinya inovasi dan pengembangan teknologi.
- c. Belum adanya tenaga fungsional peneliti

5. Unsur Pengawasan

- a. Belum optimalnya implementasi SPIP karena kurangnya pemahaman kebanyakan entitas



pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern.

- b. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan dengan Aparat Penegak Hukum.

6. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

- a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur di kelurahan
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Kelurahan akibat ketergantungan yang tinggi dari program Pemerintah.

7. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.

Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 yang tertuang dalam dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**.

Komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang. Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah:

Untuk Kejayaan Padang Panjang : Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

Bermarwah : Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya



Bermartabat

Manusia Kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.

: Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi.

Pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang”.

Selanjutnya dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

1) PILAR EKONOMI

Untuk mewujudkan pilar ekonomi ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain Rumah Wirausaha, Bedah warung, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat diseluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, koperasi syariah, dan smart warung.

Di bidang infrastruktur juga direncanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain, revitalisasi rest area, penataan pedestrian pasar dan wisata kuliner, melengkapi sarana prasarana pasar, rehab rumah tak layak huni, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

2) PILAR PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pendidikan, sosial, keagamaan pada bidang pendidikan diprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan prioritas antara lain Guru dan Murid Para



Juara, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi guru, program reward guru dan siswa berprestasi, Smart Teacher dan Smart Student, beasiswa bagi siswa miskin dan prestasi, revitalisasi bangunan sekolah sehingga nantinya seluruh sekolah di Kota Padang Panjang memiliki standar yang sama baik pustaka, mushalla, kantin dan toilet sekolah. Diharapkan dengan berbagai kegiatan strategis di bidang pendidikan seluruh sekolah di Padang Panjang akan menjadi sekolah unggul dan terdepan. Kegiatan strategis lainnya untuk mendukung misi kedua adalah wisata rakyat dan pacu kudo, serta perencanaan pembangunan Learning Knowledge Centre, melanjutkan pembangunan kawasan Islamic Center dan convention hall.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang sosial keagamaan melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Padang Panjang sayang disabilitas dan lansia dengan memberi pelayanan dan penghormatan kepada disabilitas dan lanjut usia, melalui penyediaan layanan khusus di bidang kesehatan, sosial dan keluarga serta kegiatan lansia bermakna. Disamping itu juga ada program Gelora Serambi Mekah melalui beberapa kegiatan antara lain Pejuang Subuh dan Shubuh Mubarakah, Magrib Mengaji, Smart Surau, V-6 Kampung Tahfidz dan Muzakarah Ulama.

3) PILAR KESEHATAN

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa kegiatan prioritas antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliy Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendampingan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Untuk mendukung misi kesehatan juga didukung dengan sarana prasarana olahraga sehingga direncanakan pembangunan sarana pusat olahraga sport centre.

4) PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

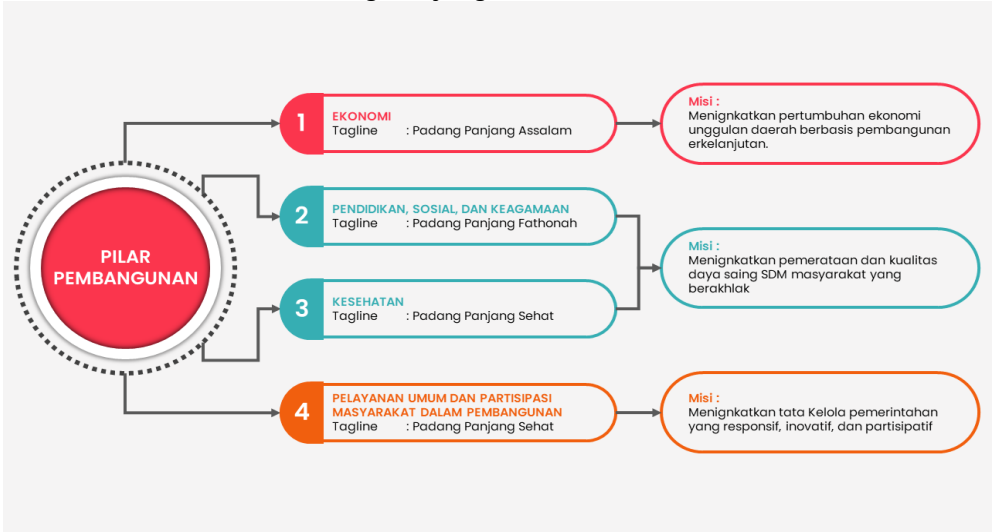
Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pelayanan umum dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di seluruh Kelurahan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang direncanakan antara lain program e-governance dengan kegiatan command centre dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang Smart City, Kota Cerdas dan Berintegritas.

Pada pilar ini juga perlu ditingkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotong-royongan, termasuk dengan menggalang kemitraan dengan dunia usaha/koperasi dalam pembangunan kota.



Mengingat bahwa dalam dokumen visi dan misi Kepala Daerah, empat pilar tersebut dijadikan sebagai pokok misi, kemudian pokok-pokok misi tersebut di uraikan dalam kalimat misi dalam penyajian dokumen RPJMD Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

Gambar 1.3
Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Pengelompokan pilar/misi pembangunan yang telah disusun menjadi 4 (empat) komponen yakni terkait dengan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan serta Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, kemudian di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) kalimat misi akan membentuk rumusan tujuan pembangunan untuk mencapai Visi pembangunan. Berikut dijabarkan misi pembangunan Kota Padang Panjang serta gambaran keterkaitan visi, misi pilar dan tagline masing-masing pilar.

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.



Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pada RPJMD Periode 2018-2023, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyusun program pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Program-program pembangunan tersebut dapat dirinci berdasarkan misi-misi yang memiliki tujuan dan sasaran masing-masing yang dirancang Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 (Program mengacu Pada Permendagri 13 tahun 2006), yaitu:

Setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan, maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang sudah ditetapkan pada 31 Desember 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah :

- 1) Perubahan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN wajib menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah, karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah harus menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
- 3) Perubahan Kebijakan Nasional tentang pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, yang ditandai dengan terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 4) Terjadinya kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pandemi tersebut berdampak besar pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Penyusunan Perubahan RPJMD ini mengalami beberapa perubahan baik dari segi indikator maupun dari segi nomenklatur program yang mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut adalah Perubahan Program-program pembangunan berdasarkan misi-misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, yaitu:

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	
Dengan Rincian Misi / Tujuan / Sasaran	
Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	
Sasaran 1: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan	
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8	Program Pemasaran Pariwisata
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
12	Program Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Penataan Bangunan Gedung
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
6	Program Penyelenggaraan Jalan
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9	Program Kawasan Permukiman
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
13	Program Penanggulangan Bencana
14	Program Pengelolaan Persampahan
15	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
Sasaran 3: Menurunnya Angka Kemiskinan	
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Pengembangan Perumahan
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	
Dengan Rincian Misi / Tujuan / Sasaran	
5	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran 4: Menurunnya Angka Pengangguran	
1	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
Sasaran 5: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	
1	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
MISI 2: Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya	
Tujuan 3: Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul	
Sasaran 6 : Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pembinaan perpustakaan
Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 4 : Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis	
Sasaran 8 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Sasaran 9 : Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	
1	Program Rehabilitasi Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sasaran 10 : Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Pengembangan Kebudayaan
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif	
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	
Sasaran 11 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
3	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan Asistensi
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	
Dengan Rincian Misi / Tujuan / Sasaran	
10	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tujuan 6 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	
Sasaran 12 : Meningkatnya Peran Serta Kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4	Program Perlindungan Khusus Anak
Sasaran 13 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan	
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023)

Selama kurun waktu tahun 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan kegiatan pembangunan daerah pada berbagai lini. Kegiatan pembangunan ini telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam prioritas dan program pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2023 pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat berikut ini :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
6.	Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.	Pemeliharaan Mebel
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
15.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
17.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
18.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
19.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
20.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

21. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
22. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
23. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
24. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
25. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
26. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
28. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
29. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
30. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
31. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
32. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
33. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
34. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
35. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
36. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
37. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
38. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
39. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
40. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
41. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
42. Pengelolaan Dana BOP PAUD
43. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
44. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
45. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
46. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
47. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
48. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
49. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
50. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
51. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
52. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
53. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
54. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
55. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
56. Penetapan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
57. Pelindungan Cagar Budaya
58. Pengembangan Cagar Budaya
59. Pemanfaatan Cagar Budaya



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
16. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17. Pengadaan Obat, Vaksin
18. Pengadaan Bahan Habis Pakai
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
35. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
36. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
37. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
38. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

39. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
40. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
41. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
42. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
43. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
44. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
46. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
47. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
48. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
49. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
50. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
51. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
53. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
54. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
56. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
57. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
58. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
59. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
60. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
61. Operasional Pelayanan Puskesmas
62. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Daerah
18. Normalisasi/Restorasi Sungai
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
21. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
22. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
23. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
24. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
25. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
26. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
27. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
28. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
29. Penataan Bangunan dan Lingkungan
30. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
31. Pembangunan Jalan
32. Pemeliharaan Berkala Jalan
33. Pemeliharaan Rutin Jalan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
34. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
35. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
36. Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
37. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
38. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
39. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
40. Sistem Informasi Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
41. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
42. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
43. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
4. /Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
18. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>
19. Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>
20. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>
21. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>
23. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>
24. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>
25. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>
26. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>
27. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
28. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
29. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
30. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
31. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
32. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
33. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
<i>Pengelolaan Sampah</i>
34. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

35. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
36. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
37. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
46. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
16. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
17. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

18. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
19. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>
21. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>
18. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
19. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
20. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
21. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

22. Penyediaan Permakanan
23. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
24. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
25. Penyediaan Permakanan
26. Penyediaan Sandang
27. Penyediaan Alat Bantu
28. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
29. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
30. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
31. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
32. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
33. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
34. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
35. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
37. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
40. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
41. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
42. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

43. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
44. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>
45. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
46. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
47. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
48. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
49. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
50. Pengendalian Program KKBPK
<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>
51. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
52. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>
53. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
54. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
55. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>
56. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
57. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>
58. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
59. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
60. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
61. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>
13. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
14. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>
15. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
16. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>
17. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan \Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

17. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
18. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
19. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
20. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perKapita per Tahun
21. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
22. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
23. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
24. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
25. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
26. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
28. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian
29. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
Pembangunan Prasarana Pertanian
30. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
31. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
32. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
33. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
34. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
35. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
36. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
37. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
38. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
39. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
40. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
15. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
16. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil
17. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
18. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
19. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
20. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil Kependudukan
22. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
18. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
19. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
20. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
21. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ewenangan Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
23. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
24. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
25. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
26. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
27. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
28. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
29. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
17. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
18. Layanan Hubungan Media
19. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
20. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
21. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
23. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
24. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
10. Pengadaan Mebel
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pemeliharaan Mebel
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>
20. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
21. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
22. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
23. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>
24. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
25. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</i>
26. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>
27. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>
28. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B) maupun Produsen B (P-B)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>
29. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
30. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>
31. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam (Satu) Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>
32. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>
33. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
34. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>
35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>
37. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>
17. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pelopor
18. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
19. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
21. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
23. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
24. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
25. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
26. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
27. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
28. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
29. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
30. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
31. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
32. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
33. Perlindungan Hasil Kreativitas
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
34. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
35. Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
36. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
14. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
15. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
16. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
17. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
18. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

16. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
17. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
19. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
20. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
21. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
22. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi
23. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
24. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
25. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
26. Fasilitas Keprotokolan
27. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
28. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Administrasi Tata Pemerintahan
29. Penataan Administrasi Pemerintahan
30. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
31. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
32. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
33. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
34. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitas dan Koordinasi Hukum
35. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
36. Fasilitas Bantuan Hukum
37. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
38. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
39. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
40. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
41. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
42. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
43. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
44. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
45. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8. Pengadaan Mebel
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
17. Fasilitasi Keprotokolan
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
18. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
19. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
20. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Layanan Administrasi DPRD
21. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
22. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
23. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
24. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
25. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
26. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
27. Penyusunan Tata Tertib DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran
28. Pembahasan KUA dan PPAS
29. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
30. Pembahasan APBD
31. Pembahasan APBD Perubahan
32. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
33. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Peningkatan Kapasitas DPRD
34. Orientasi DPRD
35. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
36. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
37. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
38. Kunjungan Kerja dalam Daerah
39. Pelaksanaan Reses
Fasilitasi Tugas DPRD
40. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
41. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>
13. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
14. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
15. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
16. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
18. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>
19. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
20. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>
21. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>
22. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>
23. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>
24. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
13. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
14. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
15. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
16. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
17. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait
18. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
19. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
20. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
21. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
22. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
24. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah
25. Penyusunan Standar Harga
26. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
27. Penatausahaan Barang Milik Daerah
28. Pengamanan Barang Milik Daerah
29. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
30. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
31. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
32. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

33. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
34. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>
13. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
14. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>
15. Pengelolaan Mutasi ASN
16. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>
17. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
18. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
19. Pembinaan Disiplin ASN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>
20. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>
21. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
15. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
16. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
17. Reviu Laporan Kinerja
18. Reviu Laporan Keuangan
19. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
20. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
21. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Pendampingan dan Asistensi
22. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
23. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
24. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KECAMATAN PADANG PANJANGTIMUR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
<i>Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
13. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
16. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>
17. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
18. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
13. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>
18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
19. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>
20. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
21. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESBANGPOL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>
17. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
18. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
19. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>
20. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>
23. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>
24. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>
25. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>
26. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>
27. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan Upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yakni Perencanaan Strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi, berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing Urusan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan bahwa Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 1.10
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Angka Partisipasi Kasar PAUD	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
2	Pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Nonformal	1 Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	
3	Pendidikan dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1 Angka putus sekolah SD	
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	1 Angka putus sekolah SMP	
		Program Bantuan Pendidikan	1 Angka putus sekolah SD	
			2 Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	
			3 Angka putus sekolah SMP	
			4 Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	
			5 Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	

Tabel 1.11
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Tingkat Kesehatan Masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2 Persentase penanganan masalah gizi buruk	
3	Pelayanan Kesehatan		3 Persentase pencapaian	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
	Bayi Baru Lahir			elayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia		
4	Pelayanan Kesehatan Balita					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	1	Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		2	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus					
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	1	Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		2	Persentase penanganan penderita penyakit menular		
			3	Universal Child Immunization (UCI)		
			4	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam		

Tabel 1.12
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Cakupan Layanan Air bersih	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	

Tabel 1.13
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1 Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	
		Program Penataan Kawasan Permukiman	1 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	

Tabel 1.14
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum	1 Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
		Program Penegakan Produk Hukum Daerah	1 Cakupan penyelesaian penegakan perda	
			2 Persentase penegakan perda	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	1 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2 Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3 Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggapdarurat bencana	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi dan Pemadaman Penyelamatan	1 Tingkat waktu maksimum tanggap (response time rate) 15 menit	

Tabel 1.15
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	1 Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1 Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			kebutuhan dasarnya	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1 Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial Bencana	1 Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	



BAB II

CAPALAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak Terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan Indikator Kinerja Makro untuk Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2022)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2023)	Laju Kinerja 2023 (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	79.28	79.76	0.605
2	Angka Kemiskinan	5.14	5.24	1.946
3	Angka Pengangguran	4.84	5.49	13.43
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.39	4.39	10.251
5	Pendapatan Per-Kapita	70640.38	76314.4	8.032
6	Ketimpangan Pendapatan	0.296	0.273	-7.77

Sumber: Data Pendukung dari Padang Panjang Dalam Angka 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (merupakan Indikator Kinerja Kunci Output yang berasal dari Indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan);
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (merupakan Indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan), dan
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN						
1.	1	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		-
2.	2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2393			-
3.	3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	171			-
4.	4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	238			-
5.	5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	240			-
6.	6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	144			-
7.	7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	46			-
8.	1	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	38			-
9.	2		Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0			-
10.	3		Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0			-
11.	4		Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4484			-
12.	5		Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2875			-
13.	6		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	356			-
14.	7		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	250			-
15.	8		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Dasar	336			-
16.	9		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	285			-
17.	10		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	136			-
18.	11		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	63			-
19.	12		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	214			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
20.	13		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	86			-
21.	14		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	176			-
22.	15		Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	152			-
23.	16		Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	36			-
24.	17		Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	9			-
25.	18		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	53			-
26.	19		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	31			-
27.	1	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3			-
28.	2		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	283			-
29.	3		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	374			-
30.	4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	42			-
31.	5		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	37			-
32.	6		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	31			-
33.	7		Jumlah kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0			-
34.	8		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	KESEHATAN						
35.	1	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2		Dinas Kesehatan	-
36.	1	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2			-
37.	1	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8			-
38.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	310			-
39.	1	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5			-
40.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	310			-
41.	1	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6			-
42.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	310			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
43.	1	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10			-
44.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	384			-
45.	1	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3			-
46.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	25			-
47.	1	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10			-
48.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	343			-
49.	1	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4			-
50.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	381			-
51.	1	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6			-
52.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	86			-
53.	1	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8			-
54.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	66			-
55.	1	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3			-
56.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	58			-
57.	1	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5			-
58.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	49			-
59.	1	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4			-
60.	2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	49			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
61.	1	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kota Padang Panjang
62.	2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0			
63.	3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0			Tidak ada kawasan pantai
64.	4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0			
65.	5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan sumber daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0			-
66.	6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0			-
67.	7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0			Tidak ada kawasan pantai



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
68.	1	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	75.39%			-
69.	2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	79.19%			-
70.	3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	70.12%			-
71.	1	1.c.4	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada			
72.	2		Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak			
73.	3		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada			-
74.	4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0			
75.	5		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1			-
76.	1	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	13595			-
77.	2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1655			-
78.	3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	15250			-
79.	4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	108			-
80.	5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	108			-
81.	6		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	15250			-
82.	7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	89.55%			-
83.	8		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	5.02%			-
84.	9		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	87.52%			-
85.	10		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	78.02%			-
86.	11		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50%			-
87.	12		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%			-
88.	13		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%			-
89.	14		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.619			-
90.	1	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100			-
91.	2		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	70			-
92.	3		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada			-
93.	4		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada			-
94.	5		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0			-
95.	6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0			-
96.	7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1			-
97.	8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0			-
98.	1	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	94.456			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
99.	2		Panjang jalan yang dibangun	0			-
100.	3		Panjang jembatan yang dibangun	0			-
101.	4		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	97.5			-
102.	5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0			-
103.	6		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0			-
104.	7		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0			-
105.	8		Panjang jalan yang dipelihara	4920			-
106.	9		Panjang jembatan yang dipelihara	138.3			-
107.	1	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0			-
108.	2		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	451			-
109.	3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	373			-
110.	4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	60			-
111.	5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0			-
112.	6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0			-
113.	7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0			-
114.	8		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0			-
115.	9		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0			-
116.	10		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0			-
117.	11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	451			-
118.	12		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	373			-
119.	13		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0			-
120.	14		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0			-
121.	15		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	105			-
122.	16		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1			-
123.	17		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
124.	18		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	105		-
125.	19		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0			-
126.	20		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0			-
127.	21		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0			-
128.	22		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0			-
129.	23		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1			-
130.	24		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0			-
131.	25		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0			-

NO	URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
132.	1	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-
133.	2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0			-
134.	3		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0			-
135.	4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0			-
136.	5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0			-
137.	6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0			-
138.	7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0			-
139.	8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0			-
140.	9	1.d.2	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0			-
141.	1		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0			-
142.	2		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0			-
143.	3		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0			-
144.	4		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0			-
145.	5		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0			-
146.	6	1.d.3	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0			-
147.	1		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	47718			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
148.	2	1.d.4	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	668			-
149.	3		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	39004			-
150.	1		Jumlah rumah di kab/kota	10906			-
151.	2		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	668			-
152.	3		Jumlah rumah tidak layak huni	319			-
153.	4		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0			-
154.	5		Rasio rumah dan KK	0.791%			-
155.	6		Jumlah rumah pembangunan baru	80			-
156.	1	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	21			-
157.	2		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	10433			-
158.	3		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	10906			-
159.	4		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	10507			-
160.	5		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0			-
161.	6		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	10906			-
162.	7		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0			-
163.	8		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0			-
164.	9		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
165.	1	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	122		Satpol PP dan Damkar	-
166.	2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	160			-
167.	3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8			-
168.	4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2			-
169.	5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1			-
170.	6		Tersedianya sarana prasarana minimal	5			-
171.	1	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%		BPBD, Kesbangpol	-
172.	2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%			-
173.	1	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%			-
174.	2		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0%			-
175.	3		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
176.	4		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	160%			-
177.	5		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,001%			-
178.	6		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	23%			-
179.	1	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%			-
180.	2		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%			-
181.	3		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%			-
182.	4		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0%			-
183.	1	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	150		Satpol PP dan Damkar	-
184.	2		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0			-
185.	3		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0			-
186.	4		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0			-
187.	5		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	52			-
188.	6		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	38			-
189.	7		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	50			-
190.	8		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6	SOSIAL						
191.	1	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1		Dinas Sosial, PPKB, dan PPPA	-
192.	2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1			-
193.	3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0			-
194.	4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	410			-
195.	5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2			-
196.	6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	410			-
197.	7		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1			-
198.	8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	379			-
199.	9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	35			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
200.	10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	143		-
201.	11		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1			-
202.	12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0			-
203.	13		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0			-
204.	14		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2			-
205.	15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	143			-
206.	16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	33			-
207.	17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1			-
208.	18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7			-
209.	19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	5			-
210.	20	1.f.2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	16	28		-
211.	21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	8			-
212.	1		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	217			-
213.	2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	60			-
214.	3		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1			-
215.	4		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	11			-
216.	5		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	18			-
217.	6		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28			-

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	TENAGA KERJA						
218.	1	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	33%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
219.	2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	1%			-
220.	3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	3			-
221.	1	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	33%			-
222.	2		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%			-
223.	3		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	25%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
224.	4		Persentase LPK yang terakreditasi	66%			-
225.	5		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%			-
226.	6		Jumlah penganggur yang dilatih	47			-
227.	7		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%			-
228.	8		Persentase penyerapan lulusan	76%			-
229.	9		Lulusan bersertifikat kompetensi	65			-
230.	10		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100			-
231.	11		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1			-
232.	1	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%			-
233.	2		Data tingkat produktivitas total	2			-
234.	1	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	1%			-
235.	2		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0%			-
236.	3		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1			-
237.	4		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	77%			-
238.	5		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	233%			-
239.	6		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0%			-
240.	7		Jumlah mogok kerja	0			-
241.	8		Jumlah penutupan perusahaan	0			-
242.	9		Jumlah perselisihan kepentingan	0			-
243.	10		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0			-
244.	11		Jumlah perselisihan PHK	0			-
245.	12		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3			-
246.	13		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0			-
247.	14		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0			-
248.	15		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0%			-
249.	1	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	9			-
250.	2		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	152			-
251.	3		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	2			-
252.	4		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0			-
253.	5		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1			-
254.	6		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
255.	7		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0			-
256.	8		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0			-
257.	9		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100			-
258.	10		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	9			-
259.	11		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0%			-
260.	12		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100			-
261.	13		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0			-
262.	14		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
263.	1	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	24	Dinas Sosial, PPKB, dan PPPA		-
264.	2		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	31			-
265.	1	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1			-
266.	2		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2			-
267.	3		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%			-
268.	4		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2			-
269.	5		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2			-
270.	1	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0			-
271.	2		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0			-
272.	3		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2			-
273.	4		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2			-
274.	5		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0			-
275.	6		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0			-
276.	7		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9	PANGAN						
277.	1	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pangan dan Pertanian		-
278.	2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1			-
279.	3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1			-
280.	4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1			-
281.	5		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1			-
282.	6		Tertanganinya kerawanan pangan	1			-
283.	7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0			-
284.	8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
10	PERTANAHAN						
285.	1	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-
286.	2		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0			-
287.	3		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0			-
288.	4		Dokumen Izin membuka tanah	0			-
289.	5		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
11	LINGKUNGAN HIDUP						
290.	1	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	47.21	Dinas Perkim LH		-
291.	2		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.6			-
292.	3		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	62.04			-
293.	1	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	3			-
294.	1	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	3			-
295.	2		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	33.33			-
296.	3		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0			-
297.	4		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0			-
298.	6		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan	3			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan				

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
299.	1	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-
300.	2		Penerbitan akta perceraian	1			-
301.	3		Penerbitan akta kematian	404			-
302.	4		Penyajian data kependudukan	3			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
303.	1	2.l.1,2.l.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Sosial, PPKB, dan PPPA		Karena wilayah administrasi Kota Padang panjang terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan
304.	2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0			
305.	3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0			
306.	4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0			

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
307.	1	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Sosial, PPKB, dan PPPA		-
308.	2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24.3			-
309.	3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	7.8			-
310.	4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	62.58%			-
311.	5	2.m.2	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	54			-
312.	1		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	25%			-
313.	2		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	67.2%			-
314.	3		Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	101			-
315.	4		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	100%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
316.	1	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	58.27%			-
317.	2		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	68.32%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
15	PERHUBUNGAN						
318.	1	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	73.91%		Dinas Perhubungan	-
319.	2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	77.44%			-
320.	3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	46.67%			-
321.	4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	89.25%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
322.	1	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		Dinas Komunikasi dan Informasi	-
323.	2		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%			-
324.	3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	3			-
325.	1	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	0%			-
326.	2		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%			-
327.	3		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%			-
328.	4		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	95%			-
329.	5		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5%			-
330.	6		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0%			-
331.	7		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	40%			-
332.	8		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%			-
333.	9		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	96%			-
334.	10		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%			-
335.	11		Persentase data yang dapat berbagi pakai	60%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
336.	12		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	61%			-
337.	13		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	75%			-
338.	14		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1			-
339.	1	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	10.5%			-
340.	2		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%			-
341.	3		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	67.5			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
342.	1	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-
343.	2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%			-
344.	3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	51%			-
345.	4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	51%			-
346.	5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74%			-
347.	6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%			-
348.	7		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	75%			-
349.	8		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%			-
350.	9		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%			Tidak perlu diisi
351.	10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%			-
352.	11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%			-
353.	12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42%			-
354.	13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
355.	1	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1			-
356.	2		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0%			-
357.	3		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0%			-
358.	4		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	84%			-
359.	5		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	22%			-
360.	6		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1			-
361.	7		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
18	PENANAMAN MODAL						
362.	1	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
363.	2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas /insentif penanaman modal	0			-
364.	3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0			-
365.	4		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2			-
366.	5		Kegiatan pameran penanaman modal	0			-
367.	6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0			-
368.	7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	26			-
369.	8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1368			-
370.	9		Laporan realisasi penanaman modal	32.972.877.870			-
371.	10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7			-
372.	11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	142			-
373.	12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	20			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
374.	1	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	6		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
375.	2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0			-
376.	1	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	5			-
377.	2		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0			-
378.	1	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	45			-
379.	2		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
----	-----------	----------------	------------	-------	-----------------	-------------	------------



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
20	STATISTIK						
380.	1	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informasi		-
381.	2		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1			-
382.	3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2			-
383.	4		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1			-
384.	5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2			-
385.	6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	3			-
386.	7		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1960			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21	PERSANDIAN						
387.	1	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Dinas Komunikasi dan Informasi		-
388.	2		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%			-
389.	3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%			-
390.	4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
22	KEBUDAYAAN						
391.	1	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		-
392.	2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4			-
393.	3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	4			-
394.	4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	60			-
395.	5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	14			-
396.	6		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	2			-
397.	7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	5			-
398.	8		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	5			-
399.	9		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	13			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
400.	10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0			-
401.	11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0			-
402.	12		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	0			-
403.	14		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1			-
404.	15		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0			-
405.	16		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0			-
406.	17		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6			-
407.	18		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	6			-
408.	19		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0			-
409.	20		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
23	PERPUSTAKAAN						
410.	1	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	13.07%		Dinas Arsip dan Perpustakaan	-
411.	2		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.67%			-
412.	3		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.005%			-
413.	4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.05%			-
414.	5		Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	28			-
415.	1	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0			-
416.	2		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0			-
417.	3		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	9			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
24	KEARSIPAN						
418.	1	2.w.1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		Dinas Arsip dan Perpustakaan	-
419.	2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%			-
420.	3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%			-
421.	4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	22.53%			-
422.	1	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%			-
423.	2		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%			-
424.	3		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100%			-
425.	4		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
426.	5		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		0		NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala Daerah ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) tidak ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
427.	6		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		100%		-

3. URUSAN PILIHAN

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
428.	1	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		0	Dinas Pangan dan Pertanian	Karena di Kota Padang Panjang tidak memiliki laut/danau
429.	2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		0%		Karena usaha pembudidayaan ikan tidak ada di Kota Padang Panjang
430.	3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		0		-
431.	4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		702		-
432.	5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		515.000		-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
26	PARIWISATA						
433.	1	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		494	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
434.	2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		52		-
435.	3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		106		-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
436.	4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11933			-
437.	5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6			-
438.	6		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0			Karena tidak ada mengikuti even luar negeri di tahun 2023
439.	7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	11			-
440.	8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	6.073%			-
441.	9		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%			-
442.	10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
27	PERTANIAN						
443.	1	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	7		Dinas Pangan dan Pertanian	-
444.	2		Prasarana pertanian yang digunakan	2			-
445.	3		Penerbitan izin usaha pertanian	43			Merupakan kewenangan DPMPSTP
446.	4		Persentase prasarana yang digunakan	100%			-
447.	5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	43%			-
448.	1	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
28	KEHUTANAN						
449.	1	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		Dinas Pangan dan Pertanian	Kehutanan tidak menjadi kewenangan Kota Padang Panjang
450.	2		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0			
451.	3		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0			
452.	4		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0			

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
453.	1	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
30	PERDAGANGAN						
454.	1	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	39	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		-
455.	2		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0%			-
456.	3		Persentase penerbitan TDG	0%			-
457.	4		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	21%			-
458.	5		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0%			Tidak ada permohonan
459.	6		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	-1%			-
460.	7		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0%			Tidak ada permohonan
461.	8		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%			-
462.	9		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	7%			-
463.	1	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	53			-
464.	1	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	83%			-
465.	2		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%			-

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
31	PERINDUSTRIAN						
466.	1	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Karena pada tahun 2023 tidak ada izin IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang
467.	1	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%			-
468.	1	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%			-
469.	2		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%			-
470.	1	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	16%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	NO URUSAN	NO IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
32	TRANSMIGRASI						
471.	1	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Karena urusan transmigrasi bukan menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang, melainkan kewenangan Provinsi
472.	2		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0			
473.	3		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0			

Catatan : Update data ([E-PELAPORAN IKK \(kemendagri.go.id\)](https://kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.00 WIB.



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pendidikan						
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1.339 2.147	62,36%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	7.049 6.742	104,55%		-
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	5.567 3.551	156,77%		-
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	362 13.127	2,75%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Kesehatan						
		1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	200 62.731	3,18%	Dinas Kesehatan	-
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	2 2	100%		
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	906 995	91,05%		
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	923 923	100%		
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	911 916	99,45%		
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.234 3.478	92,98%		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.896 3.175	91,21%		
		8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33.166 33.166	100%		
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	4.340 4.511	96,2%		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.141 4.141	100%		
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	289 289	100%		
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	122 122	100%		
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.483 1.496	99,13%		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1.516 1.533	98,89%		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Padang Panjang tidak memiliki infrastruktur pengendalian banjir dan data luas daerah kawasan banjir tidak tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%			Kota Padang Panjang tidak memiliki wilayah pantai	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	434	88,84%			-
				488,5				
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	17.076	97,99%			-
				17.425				
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	15.525	89,09%			-
				17.425				
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	4.329	45,32%			-
				9.551				
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	87,17	92,28%	-		
				94,456				
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	373	82,70%	-		
				451				
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	95	98,95%	-		
				96				

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	Perumahan Rakyat						
		1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1 1	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup	
		2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1 1	100%		
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	39,0037 47,7179	81,73%		-
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	319 10.906	2,92%		-
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	21 28	75%		-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	122	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	122			100%
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	8			100%
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60.425	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60.425			8,3324%
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.492	8,3324%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	29.907			8,3324%
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.307	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
		6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.307			100%
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	18	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	18			100%
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	3 menit		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	3 menit			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
6	Sosial						
		1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	410 410	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	380 380	100%		-

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	Tenaga Kerja						
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2 2	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	271 26.172	1,03%		-
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2.747,11 26.172	10,49%		-
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	362 376	96,27%		-
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	122 152	80,26%		-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	58.698.636.220 169.005.937.619	34,73%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	14 14	100%		-
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8 18.922	26,14%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
9	Pangan						
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	2.484,01 16.610	14,95%	Dinas Pangan dan Pertanian	-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
10	Pertanahan						
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Karena Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah menerbitkan izin lokasi
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0,6955 6,1	11,40%		-
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0 %			Karena Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah menerbitkan izin lokasi
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 %			Karena Dinas PUPR tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran TOL yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 %			Dinas PUPR tidak pernah mengukur ketersediaan tanah untuk masyarakat
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 %			PUPR tidak pernah melakukan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (tanah garapan adanya di wilayah kabupaten/kota)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
11	Lingkungan Hidup						
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,44%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	14.775,2 17.975,23	82,19%		-
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	8 26	30,76%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		1	Perekaman KTP elektronik	43.650 45.083	96,82%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	18.322 18.816	97,37%		-
		3	Kepemilikan akta kelahiran	19.820 19.844	99,87%		-
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	22 24	91,66%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0 %		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wilayah administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari Kelurahan dan Kecamatan tidak ada desa
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0 %			Wilayah administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari Kelurahan dan Kecamatan tidak ada desa

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,51	2,51	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4.881 7.307	66,79%		-
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	983 7.307	13,45%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
15	Perhubungan						
		1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	84,62%		Dinas Perhubungan	-
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,45%			-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	Komunikasi dan Informatika						
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	23	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
				23			
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	6	54,545%		
				11			
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	41.559	100%		-
				41.559			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	38	80,85%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	
				47				
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	405	3,07%			-
				13.183				

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
18	Penanaman Modal						
		1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	2.375.671.983	7,76%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
				30.597.215.887			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
19	Kepemudaan dan Olahraga						
		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	107	0,67%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
				15.814			
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	59	0,56%		-
				15.814			
		3	Peningkatan prestasi olahraga	62			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
20	Statistik						
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	23	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
				23			
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	23	100%		-
				23			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
21	Persandian						
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	222	34,41%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
				645			



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
22	Kebudayaan						
		1	Terlestarikannya Cagar Budaya	11	78,57%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
				14			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
23	Perpustakaan						
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,81%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	88.22%			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
24	Kearsipan						
		1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	80,63%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33%			-

3. Urusan Pilihan

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
25	Kelautan dan Perikanan						
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	750,028	100%	Dinas Pangan dan Pertanian	-
				750			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
26	Pariwisata						
		1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11.560	3099,19%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
				373			
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	88.794	22,19%		-
				400.080			
		3	Tingkat hunian akomodasi	55.650	33,28 %		-
				167.170			
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	126.000.000.000	2,81%		-
				4.474.080.000.000			
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.110.722.322	2,08%		-
				101.159.796.680			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	
27	Pertanian							
		1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	8.925,8	723,38%	Dinas Pangan dan Pertanian	-	
				1.233,9				
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-81	-16,98%			-
				477				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
28	Kehutanan						
		1	-		0%	Dinas Pangan dan Pertanian	Karena urusan kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang melainkan Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
29	Energi dan Sumber Daya Mineral						
		1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota		0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah tidak mengeluarkan izin perusahaan pemanfaatan panas bumi

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
30	Perdagangan						
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)diri	1.372 3.500	39.2%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah	-
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	226.500 408.000	55,51%		-
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakua	1.000 1.200	83.33%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
31	Perindustrian						
		1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	54 716	7,54%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah	-
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0 %		-
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	50 341	14,66%		-



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		0 %		Pada Tahun 2021 Kota Padang Panjang belum ada mengeluarkan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		0 %		Pada Tahun 2021 Kota Padang Panjang belum ada mengeluarkan Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI)
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		90%		-

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
32	Transmigrasi						
		1	-		0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah	Transmigrasi merupakan kewenangan dari Provinsi

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
33	Perencanaan dan keuangan						
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	177.288.228.246 560.604.099.846,51	31,62%	Badan Pengelolaan Keuangan	-
		2	Rasio PAD	101.159.796.680,4 549.373.267.510,4	18,41%		-
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3			Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		Inspektorat	-
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi expenditures transfer)	482.941.654.210,39 560.604.099.846,51	86,14%	Badan Pengelolaan Keuangan	-
		6	Opini Laporan Keuangan	8			2014: WDP; 2015: WDP; 2016: WTP; 2017: WTP; 2018: WTP; 2019: WTP; 2020: WTP; 2021: WTP, dan 2022: WTP



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
34	Pengadaan						
		1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Padang Panjang	-
				219			
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.349	46,97%		-
				2.872			
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	299.202	48,2%		-
				620.683			
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	7.253.317.388	6,45 %		-
				112.36.767.813			

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN		
35	Kepegawaian								
		1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	773	78,15%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		
				989					
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	208	21,03%			-	
				989					
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	52	25%				-
				208					

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	
36	Manajemen Keuangan							
		1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	560.604.099.846,51	8,57%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	
				613.163.025.681				
		2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	101.159.796.680,4	1,11%		-	
				100.042.532.681				
		3	Manajemen Aset	Ada	4		-	
				Ada				
				Ada				
				Ada				
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	47.479.250.777,89	8,7%		-	
				545.209.090.060,57				

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	ELEMEN DATA	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
37	Transparansi dan Prtisipasi Publik						
		1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	560.495.685.739,51	89,34%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
				627.319.623.960			-
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	12	100%		-
				12			-

Catatan : Update data (E-PELAPORAN IKK (kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 27 Maret 2024 pukul 18.00 WIB.



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tahap penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), penandatanganan perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, menyusun pelaporan kinerja serta melakukan reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan SAKIP tersebut, setiap instansi harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan surat edaran tersebut, LKjIP menjadi satu kesatuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, terdapat 6 (enam) Tujuan dengan 13 (tiga belas) Sasaran pembangunan.

Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023 adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	
					SEBELUM	SESUDAH
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT						
I	MISI I					
"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"						
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan		1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,91	4,91
	S1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,75	5,75



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	
					SEBELUM	SESUDAH
			2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	4,75	5,28
			3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pengolahan (%)	3,70	3,70
			4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,78	10,47
	S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5.	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	1,50	1,50
			6.	IKLH	72,87	72,87
T2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		2.	PDRB Perkapita (juta rupiah)	48,01	48,01
	S3.	Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan	7.	Indeks Gini	0,306	0,285
			8.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,36	5,14
	S4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47	4,84
	S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) (ribu rupiah)	11,11	11,21
II.	MISI 2					
	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya					
T3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul		3.	Indeks Pembangunan Manusia	78,64	78,64
	S6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,28	12,28
			12.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,08	15,09
	S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	72,94	73,05
			14.	Prevalensi Stunting	13,98	13,98
T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis		4.	Indeks Rasa Aman	92,57 (Aman)	92,57 (Aman)
	S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00
	S9.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	16.	Angka PPKS (%)	5,56	5,56
	S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, adat dan budaya di Masyarakat	17.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid (%)	100,00	100,00
			18.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	78,00	78,00
III.	MISI 3					
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		5.	Indeks Reformasi Birokrasi	56,42	59,5
	S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (63,10)	B (63,10)
			20.	Opini BPK	WTP	WTP
			21.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (66)
			22.	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,09 (Sangat Baik)	96,09 (Sangat Baik)
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		6.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	4,59	4,60
	S12.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	23.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	95,00	96,67
	S13.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	24.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	70,84

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 12 indikator melebihi target yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum,



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

tingkat kemiskinan, indeks gini, pengeluaran perkapita, Angka Harapan Hidup, Prevalensi *Stunting*, Angka PPKS, Persentase Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Mesjid, Predikat SAKIP, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, 2 indikator sesuai target yaitu tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dan opini BPK, dan masih ada 9 indikator yang masih belum mencapai target yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, persentase kenaikan indeks kualitas layanan layanan infrastruktur, IKLH, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, persentase pemajuan kebudayaan, indeks inovasi daerah, indeks kepuasan masyarakat, sementara masih ada 1 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2022 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah 67,82 masih kurang 1,62 dari target dengan capaian 97,67%.

Dari 24 indikator kinerja pada tahun 2022, sebanyak 11 indikator capaiannya telah melebihi target akhir RPJMD. Sembilan indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tingkat kemiskinan, indeks gini, pengeluaran perkapita, Angka Harapan Hidup, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, capaiannya tidak hanya melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 saja, bahkan telah melebihi target akhir RPJMD. Dua indikator lainnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan indeks kepuasan masyarakat, walaupun capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2022 namun telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2023.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dibanding Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dibanding
Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT							
I	MISI I						
	"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"						
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan		1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,91	4,84	98,57
	S1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,75	1,87	32,52
			2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	5,28	4,29	81,25
			3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pengolahan (%)	3,70	4,79	129,46
			4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penvediaan Akomodasi	10,47	6,52	62,27



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				dan Makan Minum (%)			
	S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5.	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	1,5	1,91	127,53
			6.	IKLH	72,87	68,44	93,92
T2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		2.	PDRB Perkapita (juta rupiah)	48,01		
	S3.	Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan	7.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14	5,24	98,05
			8.	Indeks Gini	0,285	0,273	104,21
	S4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,84	5,49	86,57
	S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) (ribu rupiah)	11,21	11,31	100,89
II.	MISI 2						
	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya						
T3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul		3.	Indeks Pembangunan Manusia	78,97	79,76	101,00
	S6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,28	11,94	97,23
			12.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,09	15,29	101,33
	S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	73,05	74,24	101,63
			14.	Prevalensi <i>Stunting</i>	13,98	14,09	99,21
T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis		4.	Indeks Rasa Aman	92,57 (Aman)	79,072 (Aman)	85,42
	S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00
	S9.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	16.	Angka PPKS (%)	5,56	4,70	115,47
	S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, adat dan budaya di Masyarakat	17.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid (%)	100,00	100,00	100,00
			18.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	78,00	74,09	94,99
III.	MISI 3						
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif						
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		5.	Indeks Reformasi Birokrasi	59,5	66,54	111,83
	S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (63,10)	B (63,28)	100,29
			20.	Opini BPK	WTP	NA	
			21.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88
			22.	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,09 (Sangat Baik)	95,96 (Sangat Baik)	99,86
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		6.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	4,60	5,02	109,13
	S12.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	23.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	96,67	100,00	103,46
	S13.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	24.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	NA	

Sumber : LKJIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 9 indikator melebihi target, 2 indikator sesuai target dan masih ada 11 indikator yang masih belum mencapai target, sementara masih ada 2 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya.

Dari 9 indikator yang capaiannya melebihi target, 3 diantara yaitu Indeks Gini, Angka Harapan Hidup dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif sudah dinaikkan targetnya dari target akhir RPJMD dan capaiannya masih tetap melebihi target.

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dibanding capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan Target Tahun ke-5 RPJMD adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Capaian tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

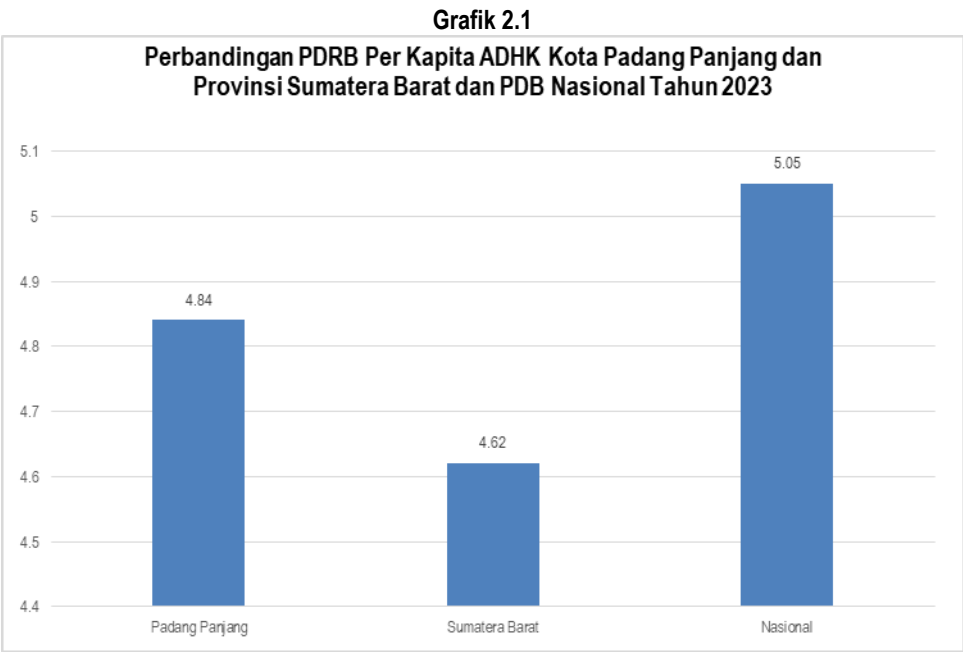
Tabel 2.6
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,20	4,39	104,52	4,91	4,84	98,57	4,40	4,84	110,00

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, diolah

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 meningkat sebesar 0,45% dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 4,39% menjadi 4,84%, dengan capaian 98,57% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Namun telah melebihi 0,44% dari target akhir RPJMD dengan capaian110%.

Walaupun belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 4,62% (BPS Sumatera Barat) namun lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05% (BPS RI, 2024), seperti ditunjukkan grafik berikut ini :



Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Perekonomian Kota Padang Panjang secara umum pada tahun 2023 menunjukan pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 4,39 pada tahun 2022 naik menjadi 4,84 pada tahun 2023. Capaian Daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh dan berbasis ekonomi kerakyatan diukur melalui 4 indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Capaian Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,15	5,54	107,57	5,75	1,87	32,52	3,41	1,87	54,84
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	3,31	5,28	159,52	5,28	4,29	81,25	4,17	4,29	102,88
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pengolahan (%)	2,75	2,40	87,27	3,70	4,79	129,46	1,24	4,79	386,29
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,44	10,47	140,73	10,47	6,52	62,27	4,75	6,52	137,26



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)									

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang dalam Angka, 2024, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi fluktuasi naik turun capaian daya saing ekonomi unggulan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan Kota Padang Panjang dari Tahun 2022 ke tahun 2023. Dari 4 indikator yang diperjanjikan mendukung laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023, hanya 1 yang capaiannya melebihi target. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya 1 indikator yang belum mencapai target, bahkan 1 indikator capaiannya sangat tinggi mencapai 386,29%, yaitu indikator laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, hal ini dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

(a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 capaian kinerjanya hanya 32,52% yang berarti belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,15	5,54	107,57	5,75	1,87	32,52	3,41	1,87	54,85

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang dalam Angka, 2024, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya. Capaian pada indikator ini di tahun 2022 adalah 107,57% sementara pada tahun 2023 hanya 32,52%. Jika dibandingkan dengan target tahun ke-5 RPJMD, maka capaian ini juga belum mencapai target dengan capaian realisasi 55,85%.

Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terganggunya produktivitas akibat serangan hama tikus di triwulan II dan III tahun 2023, bencana erupsi Gunung Marapi pada akhir tahun 2023, serta adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, sarana perdagangan dan industri yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Padang Panjang. Selama masa pandemi Covid-19 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sempat tumbuh tinggi, namun setelah masa pandemi berlalu terjadi peralihan tenaga kerja ke sektor yang ditinggalkan semasa pandemi Covid-19.

Melihat kondisi ini Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah berupaya mengendalikan gangguan ini dimana salah satu cara dengan memberikan bantuan racun tikus pada petani agar kerugian yang terjadi dapat



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

diminimalisir, sehingga produktivitas produksi hasil pertanian di Kota Padang Panjang dapat di pertahankan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik seperti yang ditunjukan tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) 2021-2023

Kabupaten/Kota	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area KSA								
	Luas Panen (Hektar)			Produksi (Ton)			Produktivitas (Kuintal/Hektar)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	376,77	603,61	477,23	940,98	1.387,33	1.180,07	29,47	22,98	24,73
Kab. Pesisir Selatan	30.440,73	28.779,19	38.927,98	146.140,73	161.638,55	201.974,08	48,01	56,17	51,88
Kab. Solok	32.553,83	32.901,89	34.691,26	171.335,32	179.316,10	182.608,63	52,63	54,50	52,64
Kab. Sijunjung	13.591,03	14.031,40	17.377,43	49.837,55	53.949,21	63.412,33	36,67	38,45	36,49
Kab. Tanah Datar	32.375,24	31.023,69	33.235,51	182.566,15	169.881,11	181.490,95	56,39	54,76	54,61
Kab. Padang Pariaman	25.461,11	27.244,15	28.566,99	115.529,25	135.072,49	140.376,62	45,37	49,58	49,14
Kab. Agam	29.690,65	27.780,60	29.653,35	152.606,78	137.633,42	144.501,24	51,40	49,54	48,73
Kab. Lima Puluh Kota	28.119,14	25.526,84	28.648,49	123.703,37	118.608,29	137.891,52	43,99	46,46	48,13
Kab. Pasaman	28.220,58	29.509,35	31.040,77	129.629,39	144.110,46	144.628,81	45,93	48,84	46,59
Kab. Solok Selatan	13.693,36	12.047,91	13.288,45	54.869,13	49.760,15	54.601,34	40,07	41,30	41,09
Kab. Dharmasraya	5.226,46	9.984,60	9.619,48	25.537,80	47.554,99	44.033,05	48,86	47,63	45,77
Kab. Pasaman Barat	11.023,77	10.025,27	9.762,34	52.247,64	50.317,46	47.663,46	47,40	50,19	48,82
Kota Padang	9.370,93	8.857,74	11.011,24	47.258,32	45.241,87	58.020,74	50,43	51,08	52,69
Kota Solok	2.175,86	2.156,94	2.662,43	12.775,72	13.946,12	16.771,07	58,72	64,66	62,99
Kota Sawahlunto	1.457,89	1.852,64	1.938,03	7.896,95	11.600,30	12.265,28	54,17	62,61	63,29
Kota Padang Panjang	784,29	863,83	857,31	4.933,85	5.789,00	5.483,86	62,91	70,01	63,97
Kota Bukittinggi	479,69	617,78	559,68	3.325,28	4.082,69	3.540,22	69,32	66,09	63,25
Kota Payakumbuh	4.969,59	4.950,72	4.942,93	24.857,83	27.223,71	25.857,83	50,02	54,99	52,31
Kota Pariaman	2.381,03	3.161,96	3.303,87	11.217,34	16.418,94	16.167,69	47,11	51,93	48,94
Pov. Sumatera Barat	272.391,95	271.883,11	300.564,77	1.317.209,38	1.373.532,19	1.482.468,79	48,36	50,52	49,32

Sumber : BPS, Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat produktivitas hasil pertanian Kota Padang Panjang mencapai 63,97 kuintal/hektar yang menunjukan bahwa Kota Padang Panjang tetap memperoleh produktivitas tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

(b) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun 2022. Dari target 5,28% terealisasi sebesar 4,29% dengan capaian kinerja 81,25%, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian Tahun 2023			Capaian RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	3,31	5,28	159,52	5,28	4,29	81,25	4,17	4,29	102,88

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang dalam Angka, 2024, diolah



Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target pertumbuhan sektor ini secara umum disebabkan perekonomian Nasional dan Regional yang mengalami perlambatan sebagai akibat lesunya perkonomian global. Hal ini juga diperparah dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang menjadi pemicu tingginya harga barang. Digitalisasi sektor perdagangan yang belum mampu mengimbangi perubahan perilaku konsumen yang beralih ke transaksi digital juga menjadi penghambat kemajuan sektor ini.

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran ini pada tahun 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan peningkatan fasilitas dan layanan sarana dan prasarana pasar. Di samping itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Panjang yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang Panjang juga senantiasa aktif melakukan pemantauan perkembangan pasar setiap harinya dengan melibatkan OPD dan stakeholder terkait lainnya.

Capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yaitu 81,25%. Namun jika dibandingkan dengan target tahun ke-5 RPJMD, maka ini sudah melebihi target dengan capaian realisasi 102,88%.

(c) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 adalah 4,79% atau lebih tinggi 1,09% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,7%. Dengan demikian, nilai realisasi kinerja indikator sektor industri pengolahan tahun 2023 adalah 129,46%. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,39%.

Pergerakan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor ini terhadap target akhir RPJMD ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.11
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan (%)	2,75	2,40	87,27	3,70	4,79	129,46	1,24	4,79	386,29

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, diolah

Pertumbuhan positif pada tahun 2023 menggambarkan bahwa Sektor Industri Pengolahan juga mulai menggeliat di Kota Padang Panjang. Hal ini terlihat dengan potensi industri kecil di Kota Padang Panjang yang meningkat dari 716 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 770 perusahaan di tahun 2023 dengan jumlah penyerapan tenaga



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

kerja sebanyak 1.428 tenaga kerja. Di samping itu aset industri juga naik dari Rp. 54,2 milyar menjadi Rp.54,95 milyar (Padang Panjang Dalam Angka, 2024).

Berdasarkan pencapaian PDRB untuk lapangan usaha industri pengolahan/*manufacturing*, terjadi peningkatan peran sektor ini terhadap perolehan PDRB Kota Padang Panjang tahun 2023. Tahun 2022 perolehan PDRB untuk lapangan usaha industri pengolahan ini sebesar Rp.339,76 miliar. Sedangkan pada tahun 2023, perolehan PDRB untuk sektor ini mengalami peningkatan menjadi Rp.373,09 miliar (Padang Panjang Dalam Angka, 2024).

Upaya pendukung yang dilakukan Pemerintah di sektor industri ini adalah dengan mendorong UMKM yang mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang agar meningkatkan jumlah produksi, melakukan pembinaan pada para pelaku industri melalui program Rumah Wira Usaha. Di samping itu Pemerintah Kota Padang Panjang juga senantiasa melakukan pembinaan berupa peningkatan kapasitas pada pelaku industri Kota Padang Panjang baik dari sisi keterampilan produksi, bantuan modal maupun pemasaran (desain merek, promosi, dll) serta lebih mengoptimalkan industri yang berbasis *e-commerce* atau digitalisasi UMKM.

Jika dibandingkan dengan target tahun ke-5 RPJMD realisasi pertumbuhan ekonomi sektor Industri Pengolahan pada tahun 2023 lebih tinggi sebesar 3,55% dari target 1,24% yaitu 4,79%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini terhadap target tahun ke-5 RPJMD sudah mencapai 386,29%.

(d) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor yang berperan besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat secara luas di Kota Padang Panjang. Tahun 2023 laju pertumbuhan pada sektor ini mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2022, dari 10,47% menjadi 6,52%, menurun sebesar 3,95%. Dengan demikian capaian kinerjanya 62,27%, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,44	10,47	140,73	10,47	6,52	62,27	4,75	6,52	137,26

Sumber : Kota Padang Panjang dalam Angka, 2024, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum belum mencapai target yang ditetapkan. Pasca pandemi Covid-19 terjadi *booming* mobilitas masyarakat sehingga di tahun 2022 sektor ini tumbuh sangat tinggi mencapai 10,47%. Kembalinya pola hidup masyarakat ke



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

masa sebelum pandemi dan dimulainya aktifitas yang menjadi rutinitas berakibat pada pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum. Namun demikian pada akhir tahun 2022 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi, kenaikan ini tentu berpengaruh pada mobilitas masyarakat pada tahun 2023. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat bergantung pada tingkat mobilitas masyarakat, hal ini menyebabkan pertumbuhan sektor penyediaan makan minum di tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022. Turunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tingginya harga barang menyebabkan rendahnya tingkat hunian hotel dan penginapan juga berimbas pada transaksi di sektor penyediaan makan minum di Kota Padang Panjang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui perangkat daerah dan *stakeholder* terkait untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan terus melakukan peningkatan fasilitas dan layanan sarana dan prasarana sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pelaksanaan pemasaran dan promosi wisata terus dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain pengusaha hotel dan penginapan juga terus didorong untuk melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta layanan kepada pengunjung sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk menginap di hotel dan penginapan di Padang Panjang. Pembenahan dan pengaturan juga dilakukan pada Pasar Kuliner Padang Panjang sehingga menarik pengunjung untuk berbelanja dan menikmati sajian makanan dan minuman yang ditawarkan oleh pedagang. Pemerintah Kota Padang Panjang juga senantiasa mendorong rumah makan dan restoran menyusun strategi peningkatan kunjungan konsumen, baik dari sisi harga, pelayanan, rasa maupun promosi baik secara konvensional maupun melalui media elektronik.

Jika dibandingkan dengan target tahun ke-5 RPJMD yang sebesar 4,75%, maka realisasi pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar 6,52% pada tahun 2023 sudah melampaui target. Dengan demikian maka capaian kinerjanya terhadap target tahun ke-5 RPJMD sudah mencapai 137,26%.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 9.927.491.973,-** yang tersebar pada perangkat daerah Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan 21 program, yaitu :

1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri



3. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata
7. Pemasaran Pariwisata
8. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
10. Perekonomian dan Pembangunan
11. Pengendalian Izin Usaha Industri
12. Pelayanan Penanaman Modal
13. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
14. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
15. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
16. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
17. Pengelolaan Perikanan Budidaya
18. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
19. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
20. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
21. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Capaian kualitas infrastruktur berkelanjutan diukur melalui 2 indikator, yaitu persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Secara umum Capaian IKLI dan IKLH Kota Padang Panjang tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	1,39	-0,03	-2,37	1,5	1,91	127,53	1,50	1,91	127,53
2	IKLH	72,65	66,60	91,96	72,87	68,44	93,92	72,87	68,44	93,92

Sumber : Sekretariat Daerah; Dinas PerkimLH, 2023 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi kenaikan kualitas layanan infrastruktur maupun kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang dari Tahun 2022 ke tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut



(a) **Persentase Kenaikan Kualitas Layanan Infrastruktur**

Nilai Indikator Persentase Kenaikan Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.14
IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023

NO	LAYANAN	2022			2023		
		IKLI		KINERJA UNIT LAYANAN	IKLI		KINERJA UNIT LAYANAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika (Layanan Website)	85,20	B	Baik	90,50	A	Sangat Baik
	Dinas Komunikasi dan Informatika (Layanan Wifi)	76,66	B	Baik	84,58	B	Baik
2	Dinas Perhubungan (Lampu, rambu, parkir)	96,62	A	Sangat Baik	97,50	A	Sangat Baik
3	Dinas PUPR (jalan, drainase dan trotoar)	97,92	A	Sangat Baik	96,31	A	Sangat Baik
	Infrastruktur Dinas PUPR (Islamic Center, RTH) atau ruang publik	89,66	A	Sangat Baik			
4	Dinas PerkimLH	96,80	A	Sangat Baik	98,06	A	Sangat Baik
5	Dinas PerdagkopUKM/ Pasar	86,59	B	Baik	84,08	B	Baik
Rata-rata		90,96	A	Sangat Baik	92,70	A	Sangat Baik

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Kota Padang Panjang, namun terdapat 2 jenis layanan infrastruktur yang mengalami penurunan nilai dari tahun 2022 ke 2023, yaitu Dinas Perkim LH dan Dinas Perdagkop UKM.

Faktor-faktor pendorong kenaikan indeks kepuasan layanan infrastruktur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya fasilitas, kualitas dan pemanfaatan informasi pada laman webiste Pemerintah Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2023 telah dilakukan *maintenance* secara berkala terhadap webiste oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.
2. Semakin membaiknya kuantitas, kualitas dan pemanfaatan teknologi informasi publik (salah satunya *wifi*) dimana pada tahun 2023 telah dilakukan penambahan *bandwith* pada 8 *Smart Surau* yang ada oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang sehingga kenyamanan pengguna lebih meningkat.
3. Dilaksanakannya pengadaan 10 unit rambu lalu lintas biasa dan 2 unit rambu lalu lintas tiang F (Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan) oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
4. Dilaksanakannya rehabilitasi fasilitas keselamatan lalu lintas existing oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
5. Dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase terhadap 14 ruas drainase dalam rangka mengurangi titik genangan yang ada di Kota Padang Panjang



6. Dilaksanakannya rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap 14 ruas jalan yang ada di Kota Padang Panjang.
7. Dilaksanakannya rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap 14 ruas jalan yang ada di Kota Padang Panjang (Jl.A.Yani, Jl.Guguak kuliliang, Jl. Psr sayur bukit Surungan, Jl.Tuanku, pamansiangan, Jl.RPH, Jl. BKKBN, Jl. Arif rahman hakim, Jl.H.Agus salim, Jl. Rasuna Said, Jl.Bahder johan, Jl.Imam bonjol, Jl.Los daging - Los kelapa, Jl. Mr. Asaat, Jl. Sudirman).
8. Dilaksanakannya penanganan drainase dalam rangka mengurangi titik genangan seperti drainase dari belakang Muhammadiyah RT 6 Tanah Pak Lambik dan Pincuran Puhun RT 5 Koto Panjang, Pembuatan Riol Terbuka RT 20 dan RT 21 Kel. Balai-balai, Perbaikan drainase/trotoar di Jl. A. Yani Kel. Ngalau.
9. Dilaksanakannya lanjutan pembangunan trotoar ramah disabilitas di kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang yang dilengkapi dengan tempat duduk/istirahat bagi pejalan kaki.

(b) Indikator Persentase Kenaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi hasil pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian seluruh komponen penyusun IKLH Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Nilai Komponen IKLH Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023

No	Komponen	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	46.07	47.21
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.29	91.60
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	56.18	62.04
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.60	68.44

Sumber: Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai seluruh komponen penyusun IKLH berupa air, udara dan tutupan lahan mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Dalam perhitungan kualitas air, pada tahun 2023 dilakukan evaluasi pengambilan titik sampel air pada lokasi yang dianggap lebih bisa mewakili kualitas air yang akan dinilai. Dalam perhitungan kualitas tutupan, dilakukan pendelineasian ulang terhadap tutupan lahan Kota Padang Panjang sehingga didapatkan kenaikan yang cukup signifikan.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi pengelolaan sampah secara langsung dan tidak langsung melalui kader-kader lingkungan yang terdapat di masing-masing Kelurahan dibawah koordinasi Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2. Optimalisasi pemicuan perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa sekolah dan masyarakat melalui Tim Dinas Kesehatan beserta kader-kader kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.
3. Pemberian bibit tanaman buah dan pohon pelindung sebanyak 20 batang untuk meningkatkan kualitas kampung iklim melalui Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang
4. Pembangunan TPS3R di Kelurahan Bukit Surungan yang saat ini telah melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair dan maggot yang secara tidak langsung mengurangi potensi pembuangan sampah organik ke sungai di sekitar lokasi melalui Dana APBN
5. Pembangunan jamban/septik tank individu di Kelurahan Koto Katik (51 unit) dan Tanah Pak Lambik (35 unit) yang secara tidak langsung mengurangi potensi pencemaran sungai melalui Dana APBN.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 30.862.626.451,-** bagi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim LH, BPBD Kesbangpol dan Dinas Sosial, PPKBPPPA untuk melaksanakan 21 program, yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
3. Penataan Bangunan Gedung
4. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
5. Penyelenggaraan Jalan
6. Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
9. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10. Penanggulangan Bencana
11. Pengelolaan Sampah
12. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
13. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
14. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang
16. Penatagunaan Tanah
17. Perencanaan Lingkungan Hidup
18. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



- 19. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 20. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 21. Penanganan Bencana
- 22. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

b) Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kedua adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Perkapita. PDRB Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB sendiri merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB per kapita menunjukkan seberapa besar nilai produksi ekonomi dapat dikaitkan dengan setiap penduduk. Oleh karena itu PDRB perkapita dinilai lebih baik dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Tabel 2.16
Capaian PDRB Perkapita

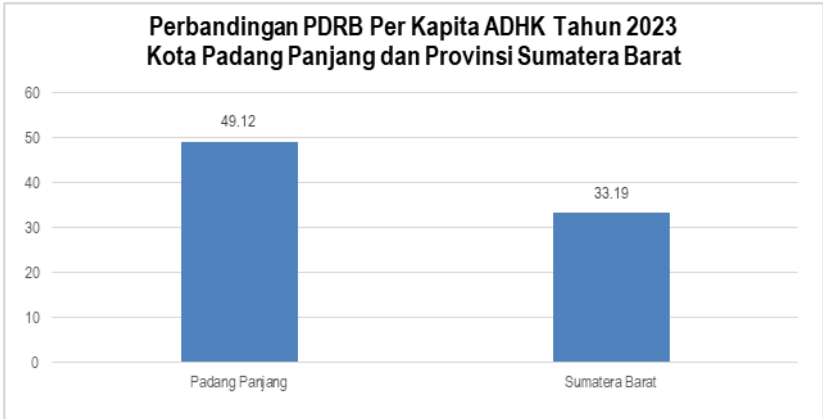
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB Perkapita (juta rupiah)	47,10	47,49	100,83	48,01	49,12	102,31	44,26	49,12	110,98

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PDRB perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 49,12 juta rupiah meningkat 1,63 juta rupiah dibandingkan tahun 2022.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan adalah lebih tingginya pertumbuhan PDRB dibandingkan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan PDRB mencapai 3,32% sedangkan laju pertumbuhan penduduk hanya 1,48%.

Grafik 2.2





Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa PDRB per Kapita ADHK Kota Padang Panjang Tahun 2023 lebih tinggi 15,93 dibandingkan PDRB per Kapita ADHK Provinsi Sumatera Barat. Di tingkat Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, PDRB per Kapita ADHK Kota Padang Panjang berada pada posisi ke-3 setelah Kota Bukittinggi dan Kota Padang (<https://sumbar.bps.go.id/indicator/52/169/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>).

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan, Menurunnya Tingkat Pengangguran, dan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan

Untuk sasaran strategis Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan diukur melalui 2 indikator, yaitu: Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini. Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Indeks Gini merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka Indeks Gini berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian Indeks Gini di upayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini di lakukan untuk menunjukan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jadi semakin besar nilai Indeks Gini, semakin besar ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Capaian terhadap sasaran ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Capaian Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan (%)	5,64	5,14	108,87	5,14	5,24	98,05	5,65	5,24	107,26
2	Indeks Gini	0,306	0,296	103,27	0,285	0,273	104,21	0,307	0,273	111,07

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

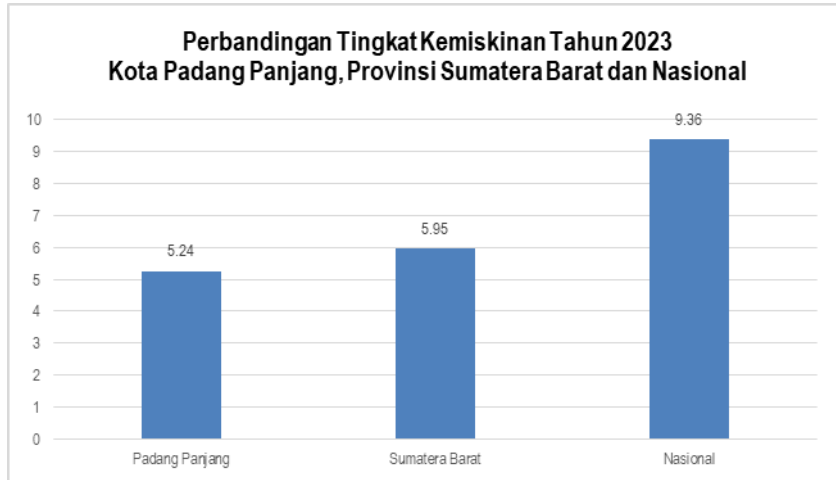
a). Indikator Tingkat Kemiskinan

Dari tabel 2.16 terlihat bahwa pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang adalah sebesar 5,24. Angka ini berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 5,14, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 98,05%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian tahun 2023 ini telah melampaui target akhir RPJMD. Dan tingkat



kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2023 lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.3



Upaya dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebagai berikut :

1. Pemberian jaminan kesehatan masyarakat
2. Pemberian bantuan UMKM (bedah warung, isi warung, gerobak, peralatan UMKM)
3. Pemberian bantuan ternak (sapi, ayam, itik, kambing, ikan)
4. Melaksanakan bedah rumah, operasional rusunawa
5. Penyediaan kebutuhan PMKS yang mencakup Permakanan Sandang Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik Mental dan Spritual serta pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
6. Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin, serta bantuan peralatan sekolah
7. Pemasangan sambungan listrik gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
8. Asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal

Faktor-faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah:

1. Perilaku/mental penduduk miskin

Padang Panjang sebagai salah satu Kota Kecil di Sumatera Barat memiliki penduduk sebanyak 57.850 jiwa (BPS, PPDA 2024) dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah pekerja lepas sebanyak 2.244 orang (LP2KD Kota Padang Panjang Tahun 2023). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh *stakeholder* terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Permasalahan perilaku/mental penduduk miskin harus dibenahi agar bisa bangkit dari zona kemiskinan. Analisis data yang bersumber dari data Pensasaran



Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kondisi September 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan didominasi oleh masyarakat usia produktif yang tidak bekerja, yaitu sebanyak 4.035 orang atau 46,56% dari total masyarakat miskin yang tidak bekerja. Dari aspek pendidikan 25,31% dari jumlah penduduk miskin Kota Padang Panjang adalah tamatan SMA sederajat dan 2,3% adalah Sarjana, padahal seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi peluang dalam bekerja. Pemantauan lapangan menunjukkan ada persoalan perilaku yang menjadi penyebab kemiskinan di kota Padang Panjang, di antaranya adalah perilaku malas, memilih-milih pekerjaan dan kecenderungan pasif menunggu bantuan (tidak mandiri).

2. Validitas Data Kemiskinan

Satu data merupakan suatu keharusan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan berawal dari ketidakvalidan data penduduk miskin yang dimiliki.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun terakhir mengacu kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada tahun 2022 terdapat pula data P3KE. Pada akhir tahun 2023 Bappenas juga mengeluarkan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang salah satunya adalah data kemiskinan. Hadirnya beberapa data ini menyebabkan kesimpangsiuran dalam pengelolaan data kemiskinan dan pada akhirnya berpengaruh signifikan pada arah kebijakan pengentasan kemiskinan.

3. Minimnya Lapangan Usaha

Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Padang Panjang Tahun 2023 menunjukkan bahwa salah satu jenis pekerjaan terbanyak penduduk miskin Kota Padang Panjang adalah petani pekerja lepas. Di sisi lain Padang Panjang adalah sebuah Kota kecil dengan seluas 23 km² yang lahan pertaniannya semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Keterbatasan lahan dan minimnya investasi di Kota Padang Panjang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang, sehingga membutuhkan upaya lain dalam penanggulangan kemiskinan. Pada akhirnya pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan hanya dapat memaksimalkan potensi yang ada.

4. Minimnya Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Upaya Penanggulangan kemiskinan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara itu APBD Kota Padang Panjang relatif terbatas. Di sisi lain ketergantungan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Pemerintah Pusat dari sisi



anggaran relatif tinggi. Hal ini menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tidak maksimal

5. Koordinasi dan Keserempakan Aksi Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu faktor penghambat penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan aksi penanganan kemiskinan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

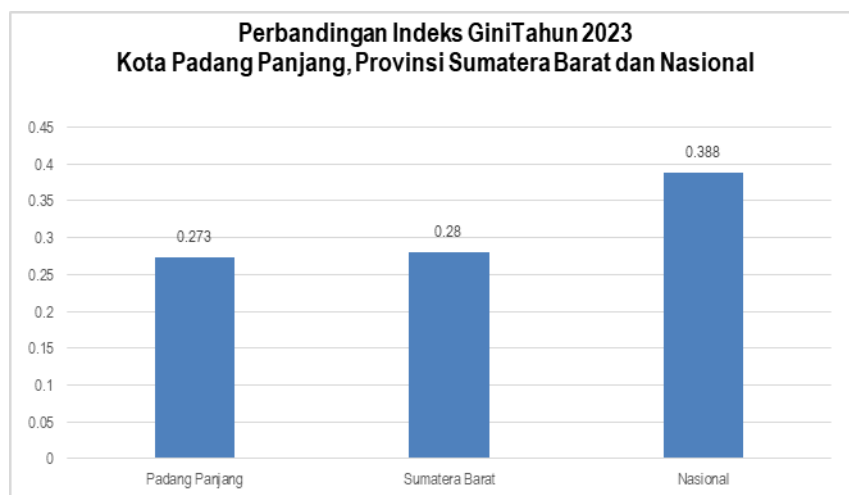
Lemahnya koordinasi dan keterpaduan aksi ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya sulitnya menemukan profil dan permasalahan kemiskinan, kesalahan dalam proses perencanaan, tumpang tindih pemberian bantuan, termasuk sulitnya mengukur capaian dari pelaksanaan aksi penanggulangan kemiskinan.

b). Indikator Indeks Gini

Pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Padang Panjang mengalami penurunan 0,023 dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 0,296 menjadi 0,273, yang berarti bahwa pemerataan pendapatan masyarakat semakin baik, bahkan lebih baik 0,034 dibandingkan target akhir RPJMD.

Indeks Gini Kota Padang Panjang Tahun 2023 lebih baik 0,007 dibandingkan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, dan lebih baik 0,115 dibandingkan Indeks Gini Nasional, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.4



Faktor pendukung keberhasilan Kota Padang Panjang dalam menurunkan indeks Gini adalah intensifnya Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan berbagai bantuan, diantaranya :

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja.
2. Perlindungan Tenaga Kerja
3. Pengembangan Infrastruktur



- 4. Fasilitas Kemudahan Akses Modal
- 5. Bantuan Kesejahteraan Sosial
- 6. Penguatan Pemberdayaan Perempuan
- 7. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan
- 8. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi
- 9. Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil
- 10. Bantuan modal usaha dalam bentuk bantuan peralatan yang berasal Pemerintah Kota Padang Panjang untuk UMKM Padang Panjang.
- 11. Bantuan subsidi upah bagi tenaga kerja rentan

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 5.305.373.312,-** bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Mikro, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan 6 program, yaitu :

- 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Pengembangan Perumahan
- 3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5. Hubungan industrial
- 6. Kawasan Permukiman

2. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

Untuk sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran diukur menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Capaian terhadap sasaran ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Capaian Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2022-2023

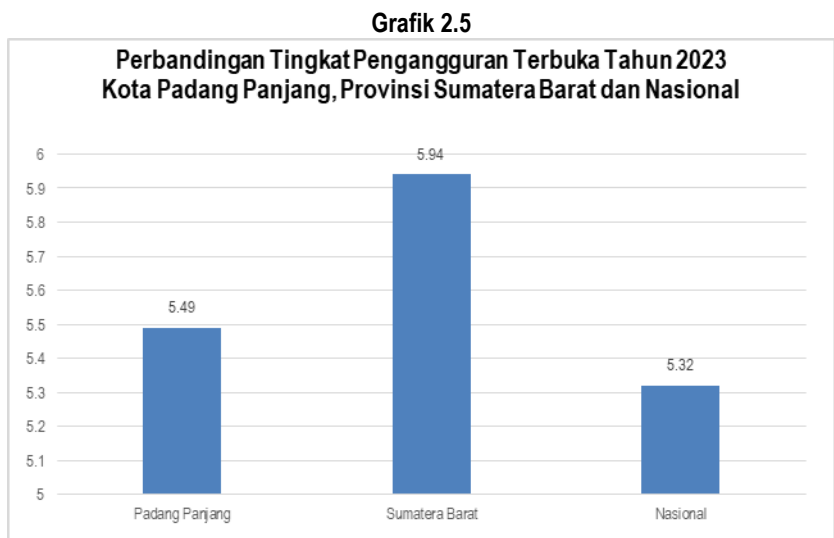
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	4,84	96,80	4,84	5,49	86,57	6,80	5,49	119,26

Sumber : BPS, Kota Padang Panjang dalam Angka Tahun 2024, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang adalah sebesar 5,49%. Angka ini berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 4,84%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 86,57%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan bahwa jumlah



pengangguran di Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian tahun 2023 ini telah melampaui target akhir RPJMD. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2023 lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 5,94%. Tetapi masih berada diatas nasional, 5,32% seperti disajikan pada grafik berikut :



Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat
Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2023 angkatan kerja Kota Padang Panjang mencapai 28.606 jiwa naik 2.434 jiwa atau 9,3% dari 26.172 pada tahun 2022
2. Ketidakselarasan antara keahlian atau kompetensi yang dimiliki calon pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Minimnya pengalaman pencari kerja, hal ini sering terjadi pada *fresh graduate* atau lulusan baru dari perguruan tinggi.
4. Minimnya Investasi baru dan lapangan pekerjaan
Rendahnya realisasi investasi baru di Kota Padang Panjang menyebabkan minimnya Lapangan kerja baru yang berakibat terhadap rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2023 antara lain :

1. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi berupa pelatihan Bahasa Jepang.
2. Melaksanakan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana prasarana lembaga pelatihan kerja, berupa pengiriman peserta pelatihan ke Balai Besar pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.



3. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja seperti kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus SMKN 2 Padang Panjang, kerjasama dengan perusahaan penempatan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja pada perusahaan Philips batam, kerjasama rekrutmen dengan Balcone Hotel.
4. Optimalisasi Informasi Lowongan Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan luar provinsi Sumatera Barat berupa pemberian informasi lowongan kerja bagi pencari kerja di Kota Padang Panjang.
5. Kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang juga mengadakan kerjasama dengan seluruh BKK yang ada di Kota Padang Panjang dalam bentuk penyampaian informasi lowongan kerja, pemberian motivasi pada BKK agar mengoptimalkan penempatan lulusan Sekolah Menengah dan kegiatan lain untuk menekan angka pengangguran.

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 198.303.550,-** bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja.

3. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Untuk sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) (ribu rupiah). Pengeluaran per kapita adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) dihitung melalui biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Capaian terhadap sasaran ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.19
Capaian Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) (ribu rupiah)	10,92	11,153	102,13	11,21	11,31	100,89	11,11	11,31	101,80

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) di Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 11.310,-. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 11.210,- sehingga capaian kinerja indikator ini adalah

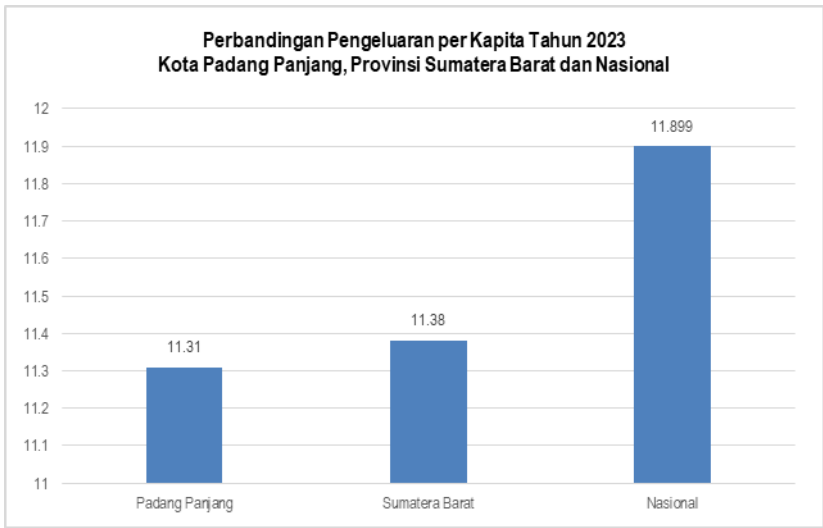


PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

100,89%. Dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) yang menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan per anggota keluarga per hari untuk konsumsi dengan kata lain pendapatan masyarakat lebih baik pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Pencapaian tahun 2023 ini telah melampaui target akhir RPJMD. Meskipun demikian, pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) di Kota Padang Panjang masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Grafik 2.6



Faktor-faktor pendukung keberhasilan sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia, serta Desain dan Teknologi terhadap Unit Usaha Mikro terhadap 391 unit usaha.
2. Komitmen Wali Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam hal peningkatan skill calon pencari kerja melalui pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi dan pelatihan lainnya baik yang sumber dananya berasal APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan RI atau sumber dana lainnya.
3. Optimaslisasi pembinaan terhadap kelompok pelaku ekonomi kreatif dan fasilitasi even / festival sebagai sarana promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
4. Pembinaan kelembagaan tani, penyuluhan yang masif, berkala dan berkelanjutan terhadap kelompok tani dan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Adanya transfer teknologi melalui Pekan Nasional (PENAS) Tani.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.794.748.950,-** bagi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan 3 program, yaitu :

1. Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)



- 2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3. Penyuluhan Pertanian

c) Tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang Sehat, Berakhlak dan Unggul

Capaian tujuan meningkatnya pemerataan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*descent standart*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$).

Tabel 2.20
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

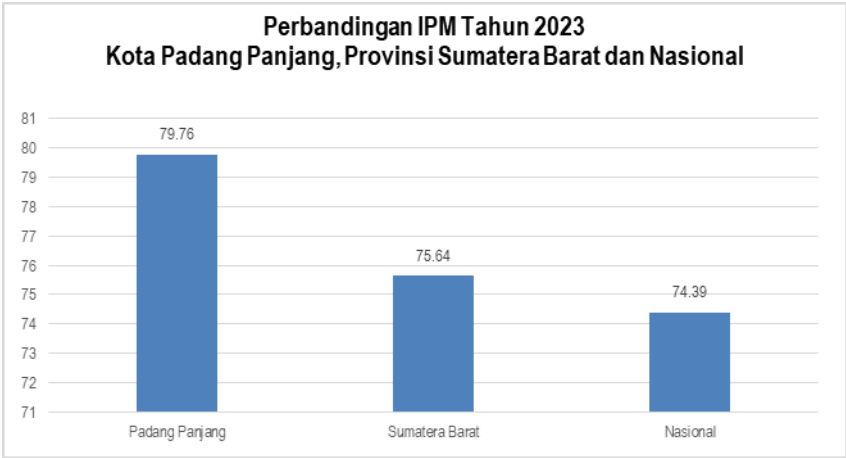
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indreks Pembangunan Manusia	78,31	78,78	100,60	78,97	79,76	101,00	78,97	79,76	101,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah 79,76 lebih tinggi 0,98 dibanding tahun 2022 dan sudah melebihi target kinerja 2023 dan target tahun ke-5 RPJMD.

Secara keseluruhan berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul tercapai dengan baik. Bahkan IPM Kota Padang Panjang lebih baik 4,12 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan lebih baik 5,37 poin dibandingkan IPM Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.7



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan IPM adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2022 dari 11,92 tahun menjadi 11,94 tahun.

2. Meningkatkan harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,22 tahun dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah di tahun 2022 dari 15,07 tahun menjadi 15,29.

3. Meningkatkan angka harapan hidup

Angka harapan hidup di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,22 tahun dibandingkan tahun 2022, dari 73,02 tahun menjadi 74,24 tahun.

4. Menekan prevalensi *stunting*

Prevalensi *stunting* tahun 2023 berhasil ditekan sebesar 0,65% dibanding tahun 2022 dari 14,74% menjadi 14,09%.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul telah ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dan 2) Harapan Lama Sekolah (tahun). Rata-rata lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Capaian Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,96	11,92	99,67	12,28	11,94	97,23	12,28	11,94	97,23
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,08	15,07	99,93	15,09	15,29	101,33	15,09	15,29	101,33

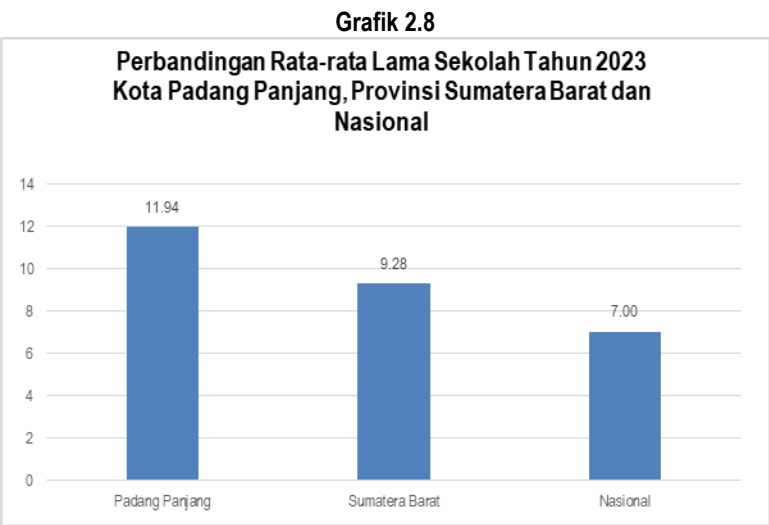
Sumber :

(a) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah, capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 97,23% dan capaian ini sama dengan capaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun kelima. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 memang terdapat penurunan sebesar 2,44%.



Meskipun demikian, capaian Rata Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan realisasi sebesar 11,94 merupakan nilai terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan lebih baik dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu 9,28 dan dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2023 yaitu 7, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

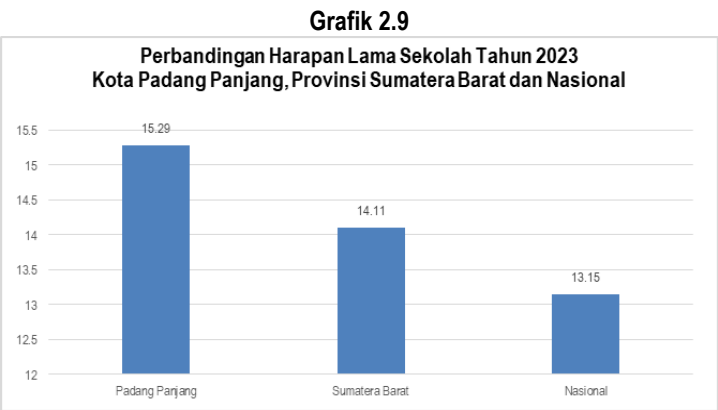


Sementara capaian Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan realisasi sebesar 15,29 ini lebih baik dari capaian Harapan Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu 14,11 dan dari capaian Harapan Lama Sekolah Nasional Tahun 2023 yaitu 13,15.

(b) Indikator Harapan Lama Sekolah

Capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 101,33%, dan capaian ini sama dengan capaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun kelima. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,4%.

Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan realisasi sebesar 15.29 merupakan nilai terbaik kedua dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan lebih baik dari capaian Harapan Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu 14,11 dan dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2023 yaitu 13.15, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :





Adapun faktor pendorong/pendukung Sasaran Strategis Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahaman orang tua akan arti penting pendidikan untuk anak-anak mereka.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dimana jarak antara rumah masyarakat dengan sekolah cukup dekat.
3. Banyaknya fasilitasi dan bantuan dari berbagai pihak untuk peningkatan pendidikan di seperti, KIP, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang, beasiswa dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, kelurahan dan RT untuk merazia dan menegur anak-anak yang berkeliaran yang jam sekolah.
5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak sekolah, anak-anak dan dengan orang tua.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp.32.608.812.450,-** bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.

2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) dan 2) Prevalensi *Stunting*. Angka harapan Hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Sedangkan Prevalensi *Stunting* adalah Jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	72,88	73,02	100,19	73,05	74,24	101,63	72,94	74,24	101,78
2	Prevalensi <i>Stunting</i>	15,51	14,74	104,96	13,98	14,09	99,21	13,98	14,09	99,21

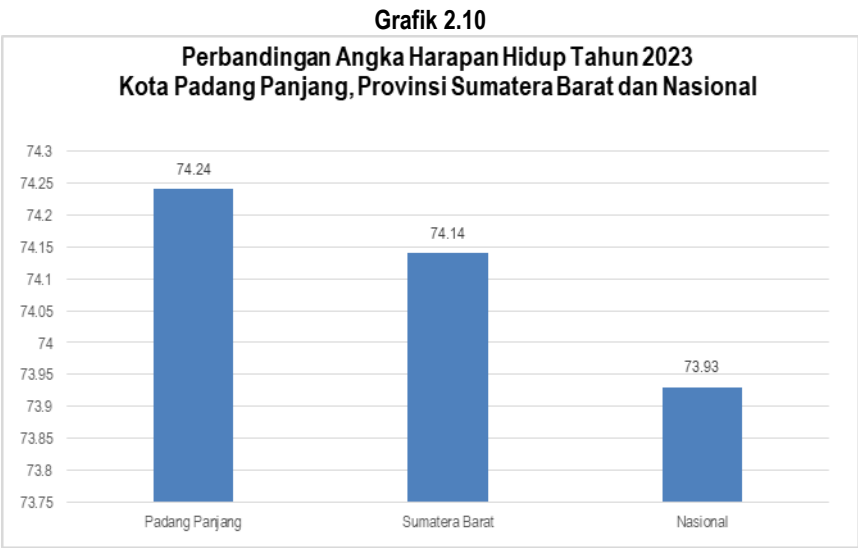
Sumber : BPS, PPDA 2024

(a) Indikator Angka Harapan Hidup

Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2023 adalah sebesar 101,63%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,44%.



Capaian Angka Harapan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan realisasi sebesar 74,24 merupakan nilai terbaik ketiga dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan lebih baik dari Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 74,14 dan dari Angka Harapan Hidup Nasional yaitu 73,93, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :



(b) Indikator Prevalensi Stunting

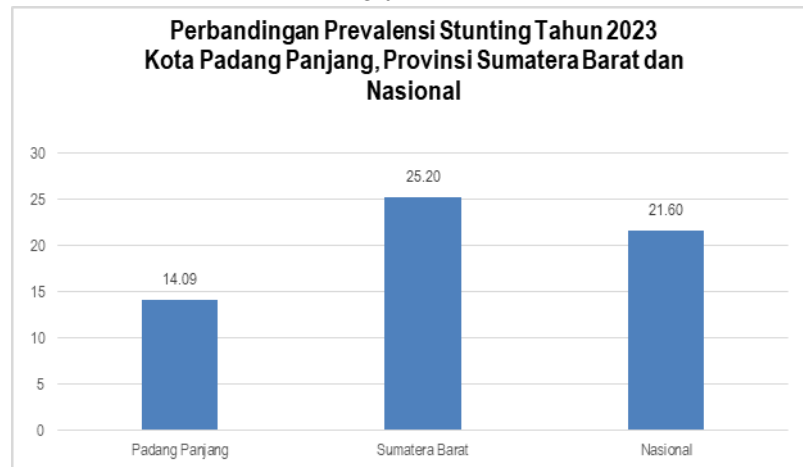
Capaian Prevalensi *Stunting* pada tahun 2023 adalah sebesar 99,21%, capaian ini sama dengan capaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun kelima. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,75%. Walaupun demikian, nilai prevalensi *stunting* berhasil ditekan sebesar 0,65 dari tahun 2022 dari 14,74 menjadi 14,09.

Kurangnya realisasi Prevalinsi *Stunting* dari 100% pada tahun 2023 dan penurunan capaian dibanding tahun 2022 yang lalu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dalam pemberian asupan makanan pada balita. Pemerintah Kota melalui OPD dan stakeholder terkait telah berupaya maksimal dengan berbagai program dan langkah-langkah dalam menurunkan prevalinsi *stunting* ini. Peningkatan pola asuh orang tua dalam pemberian asupan makanan yang bergizi pada balita akan terus digiatkan agar prevalensi *stunting* ini pada tahun mendatang dapat terus ditekan menuju 0. Seluruh kader kesehatan, masyarakat dan tim yang terlibat harus proaktif dalam melihat, dan memantau kondisi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di lingkungan masing-masing yang terindikasi prevalensi *stunting*.

Capaian Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan realisasi sebesar 14,09 ini lebih baik dari capaian Prevalensi Stunting Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu 25,2 dan dari capaian Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2023 yaitu 21,6, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :



Grafik 2.11



Adapun faktor pendorong/pendukung pencapaian sasaran strategis derajat Kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahaman masyarakat akan arti penting kesehatan baik kesehatan diri maupun Kesehatan lingkungan.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat ke fasilitas Kesehatan (jarak yang cukup dekat, tenaga medis yang siaga pada masyarakat yang membutuhkan, PSC 119).
3. Banyaknya fasilitas dan bantuan dari berbagai pihak dibidang kesehatan seperti, KIS, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang, air bersih, sanitasi lingkungan yang cukup baik dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah untuk memantau kondisi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan.
5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat, para kader Kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat, petugas medis dan para medis dan pemerintah daerah.
6. Dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan prevalensi stunting disamping dari pemerintah juga dalam bentuk program BASUNTING (Bapak Asuh Stunting).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp137.653.993.462,-** bagi Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, PPKBPPPA, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan 11 program, yaitu:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
4. Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
5. Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
7. Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan.



- 8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- 9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- 10. Pengendalian Penduduk
- 11. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

d) **Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis**

Capaian tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis diukur melalui indikator Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman diukur dari dimensi trantibum (20%), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%), Budaya (30%) dan kegiatan keagamaan (35%). Capaian indikator Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Capaian Indeks Rasa Aman

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Rasa Aman	86,04 (Aman)	75,49 (Aman)	87,74	92,57 (Aman)	76,60 (Aman)	82,75	92,57 (Aman)	76,60 (Aman)	82,75

Sumber : LKjIP OPD Tahun 2023 (diolah)

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Meningkatkan Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Pada sasaran ini terdapat satu indikator yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tenteram dan tertib sehingga terhindar dari perilaku tindakan tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum Kota Padang Panjang Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum untuk tahun 2023 telah sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tingkat penyelesaian adalah 100%, artinya seluruh pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan.

Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 134 kasus jumlah pelanggaran perda di Kota Padang Panjang, dengan rincian seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran	Bulan												Jumlah per kasus
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Gepeng / stress	2	3	3	-	4	4	-	1	-	-	3	5	25
2	Trantibum hisap lem/ siswa berkeliaran/ pertengkaran ringan/ dicurigai melakukan pencurian	8	15	6	-	14	16	2	6	8	6	8	8	97
3	Mengarah ke perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan pasal 6A huruf a	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	3	11
5	Makan/ minum pada warung/kedai/rumah makan pada siang hari di bulan Ramadhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Menjual/ mengkonsumsi/ menyimpan miras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		10	18	9	2	18	20	2	7	8	8	15	17	134

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2023

Total kasus pelanggaran gepeng/stress di tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 kasus, dalam penyelesaian kasus ini Satpol PP bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKBPPPA) dengan memberikan surat pengantar dan diselesaikan langsung oleh pihak Dinsos PPKBPPPA.

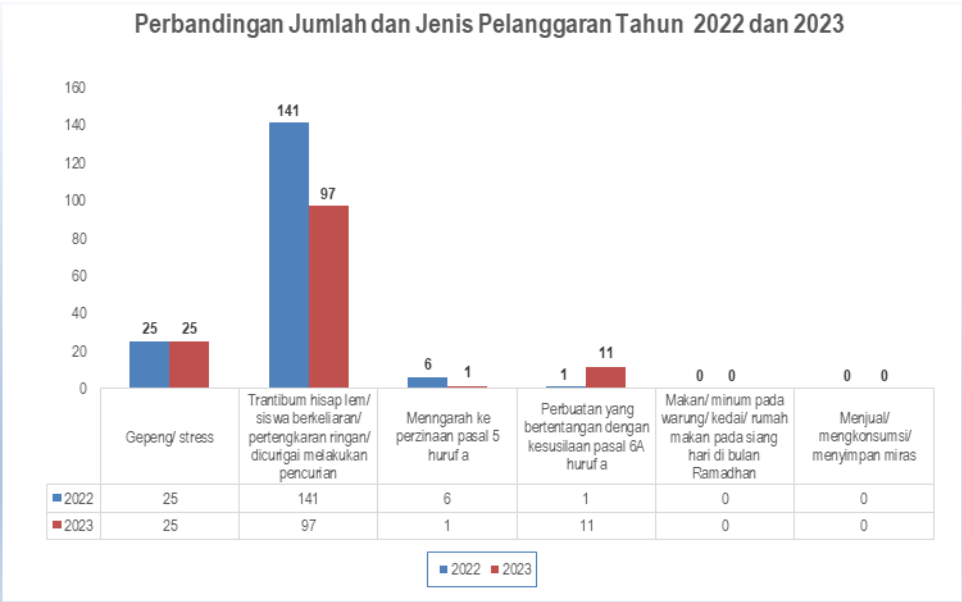
Sementara itu untuk jumlah pelanggaran tertinggi yaitu pelanggaran trantibum, hisap lem, siswa berkeliaran, pertengkaran ringan, serta dicurigai melakukan pencurian ditemukan sebanyak 97 kasus sepanjang tahun 2023, jauh berkurang dibandingkan kasus yang sama pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 141 kasus. Untuk pelanggaran hisap lem, pertengkaran ringan, serta dicurigai melakukan pencurian diberikan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda dihadapan orang tuanya guna memberikan efek jera dan akibat buruk dari perbuatannya tersebut, dan pelanggar diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang juga ditandatangani oleh orang tua/wali. Untuk pelanggaran siswa berkeliaran diberikan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda. Apabila siswa sudah berulang kali diamankan oleh anggota Satpol PP, maka pihak Satpol PP akan



menyerahkan pelajar tersebut kepada pihak sekolah, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib sekolah dan tata tertib seorang pelajar.

Jumlah jenis dan kasus pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2023 cenderung menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2022, seperti disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.12



Kinerja Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini telah dipertahankan dari awal hingga akhir RPJMD, yaitu 100% karena adanya Tim Satuan Kerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang beranggotakan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta Kejaksaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 79 Tahun 2023.

Faktor-faktor pendukung terselesaikannya seluruh kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya.
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres.
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar.
4. Terlaksananya Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota.

Meskipun pencapaian indikator sasaran telah sesuai target, tetap dilaksanakan upaya-upaya pencegahan agar angka jumlah pelanggaran bisa berkurang, antara lain melalui penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10



Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 5.083.796.650,-** bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan untuk melaksanakan 3 program, yaitu :

- 1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2. Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. **Sasaran Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial**

Sasaran strategis Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial diukur melalui indikator Angka PPKS. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Pendataan dan pengelolaan data PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan.

Angka PPKS didapatkan melalui perhitungan berikut ini :

$$\text{Angka PPKS} = \frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka PPKS (%)	5,85	5,68	102,96	5,56	4,69	115,65	5,56	4,69	115,65

Sumber : Dinsos PPKBPPPA, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Angka PPKS, capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 115,65% dan capaian ini sama dengan capaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun kelima. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 12,69%.

Dari 26 jenis PPKS, 10 jenis ditemukan di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :



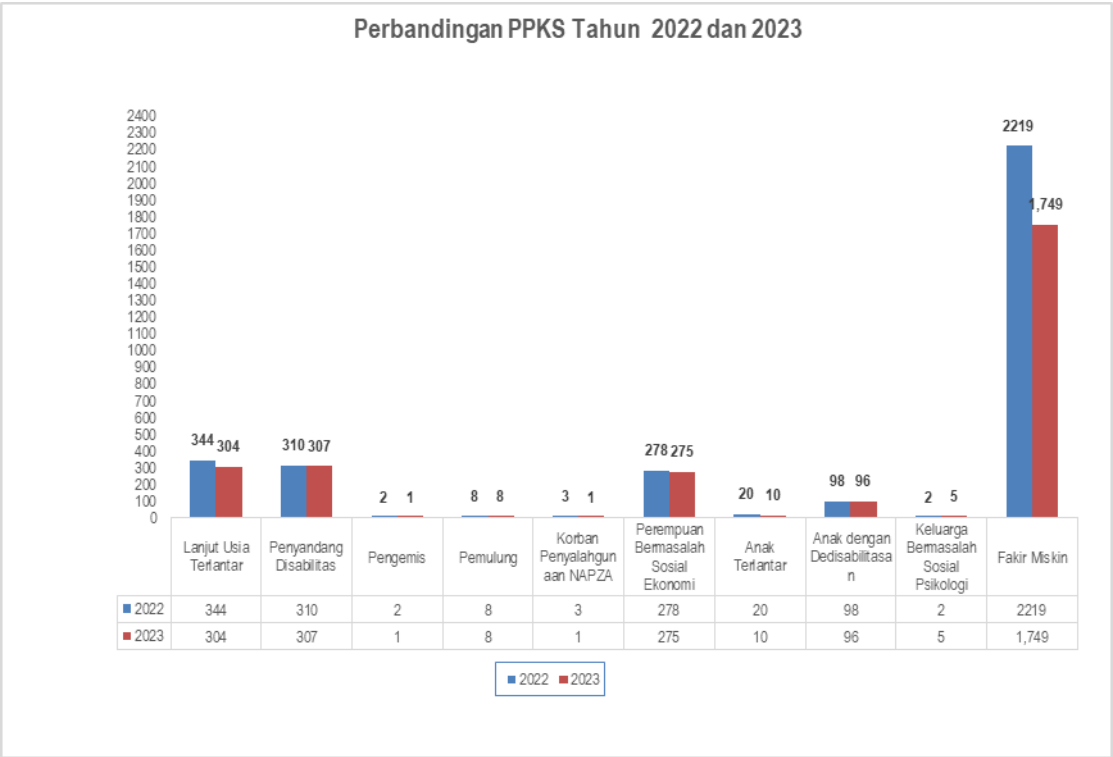
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PPKS	Jumlah
1	Lanjut Usia Terlantar	304
2	Penyandang Disabilitas	307
3	Pengemis	1
4	Pemulung	8
5	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1
6	Perempuan Bermasalah Sosial Ekonomi	275
7	Anak Terlantar	10
8	Anak dengan Kedisabilitas	96
9	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	5
10	Fakir Miskin	1.749
TOTAL		2.756

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah 58.750 sehingga diperoleh nilai Angka PPKS sebesar 4,69%.

Jumlah PPKS pada Tahun 2023 cenderung menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2022, secara keseluruhan berkurang sebanyak 528 dari 3.284 menjadi 2.756 seperti disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.13



Pada tahun 2023 Dinsos PPKBPPPA sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang melakukan pelayanan sosial terhadap 2.534 dari 2.756 PPKS yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

- (a) 295 orang Lanjut usia terlantar diberikan bantuan permakanan dan perlengkapan kamar lansia.
- (b) 372 orang Penyandang disabilitas diberikan bantuan permakanan dan alat bantu.
- (c) Seluruh pengemis diberikan bantuan melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) dan permakanan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

-
- (d) Tujuh dari 8 pemulung diberikan bantuan melalui bantuan iuran jaminan kesehatan dan menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), 6 dari 8 pemulung diberikan BPNT, 1 dari 8 pemulung menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 1 pemulung diberikan bantuan atensi dan 1 diberikan bantuan elnino.
 - (e) Seluruh Korban penyalahgunaan NAPZA diberikan bantuan PBI-JK
 - (f) Dari 265 orang Perempuan rawan sosial ekonomi diberikan bantuan 185 orang diberikan bantuan iuran kesehatan dan menjadi Penerima PBI-JK, 24 diberikan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), dan 47 diberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP), 144 diberikan BPNT, 59 menjadi penerima PKH, sembako, 30 diberikan bantuan atensi, 2 diberikan bantuan permakanan, 3 diberikan bantuan sembako dan 46 diberikan bantuan elnino
 - (g) Seluruh Anak terlantar diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Rumah Healing.
 - (h) Seluruh Keluarga bermasalah sosial psikologis diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan LK3, P2TP2A dan Rumah Healing.
 - (i) 1.577 orang fakir miskin diberikan bantuan dari APBD maupun dari Kemensos berupa PKH, bansos tunai dan non tunai.

Dalam upaya mencapai target menurunnya masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.822.146.781,-** bagi Dinas Sosial PPKBPPPA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan 5 program, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
5. Perlindungan Perempuan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam usaha menurunkan jumlah PPKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PPKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN
2. Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Perkotaan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan



- 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI.
- 5. Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitas pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang
- 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana
- 7. Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit sosial
- 8. Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitas rumah singgah
- 9. Penjaringan para pelaku usaha dalam penanggulangan kesejahteraan social
- 10. Penyediaan data base kemiskinan
- 11. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan Rumah Healing.

3. Sasaran Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat

Capaian sasaran strategis meningkatnya aktivitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat diukur melalui 2 indikator yaitu persentase aktivitas keagamaan di mesjid dan persentase pemajuan kebudayaan. Persentase aktivitas keagamaan di mesjid diukur dari komponen kegiatan Majelis Taklim, Remaja Mesjid, Didikan Subuh dan Subuh Mubarakah. Dan Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari rata-rata nilai pemajuan kebudayaan dari 10 objek pemajuan kebudayaan yaitu : Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus (cagar budaya yang sifatnya kepercayaan), Pengetahuan Tradisional (pasambahan), Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan cagar budaya. Masing-masing objek dinilai berdasarkan 6 langkah pengelolaan, yaitu : 30% identifikasi, 10% observasi, 5% sosialisasi, 10% internalisasi, 15% dokumentasi, dan 30% literasi.

Capaian Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat Kota Padang Panjang ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.27
Capaian Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, Adat dan Budaya di Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid (%)	98,79	100,00	101,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan	67,00	65,45	97,69	78,00	74,09	94,99	78,00	74,09	94,99

Sumber : LKjIP OPD 2023, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa salah satu indikator kinerja, yaitu Persentase Pemajuan realisasinya masih di bawah target yang dijanjikan, namun dengan realisasi kinerja sangat tinggi.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam upaya untuk mencapai target meningkatnya aktivitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 15.678.099.869,-** bagi Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan 2 program, yaitu :

- 1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2. Pengembangan Kebudayaan

Adapun hasil evaluasi untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

(a) Persentase Aktivitas Keagamaan di Mesjid

Menyandang julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, Kota Padang Panjang tentunya akan selalu diidentikkan dengan aktivitas keagamaan yang lebih dominan. Selain keberadaan lembaga pendidikan keislaman yang sudah sejak lama menjadi rujukan oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, berbagai aktivitas keagamaan juga menjadi tolok ukur citra kota. Dalam perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu, indikator keagamaan selalu menjadi perhatian dan tidak pernah ditinggalkan. Perbandingan capaian indikator persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid ini pada tahun 2022 dan 2023, serta capaian Tahun ke-5 RPJMD adalah seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Mesjid Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid (%)	98,79	100,00	101,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : *Bagian Kesra Setdako, 2023, diolah*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian untuk tahun 2023 sudah memenuhi target. Hasil pengukuran untuk masing-masing komponen aktivitas keagamaan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.29
Aktifitas Keagamaan Mesjid Tahun 2023

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Jumlah mesjid yang melaksanakan	Jumlah seluruh mesjid
1	Majlis Ta'lim	1 Ceramah Agama	49	49
		2 Pendalaman materi agama melalui tanya jawab	49	49
2	Wirid Remaja	1 Wirid pengajian	4	49
		2 Pembinaan Remaja Mesjid	4	49
3	Didikan Subuh	1 Pembinaan ba'da shalat subuh	49	49
4	Subuh Mubarakah	1 Shalat subuh berjamaah	49	49
		2 Ceramah agama	49	49
		3 Pendalaman materi agama	49	49

Sumber : *Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2023*

Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 49 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh mesjid telah memiliki kelompok Majelis Taklim.



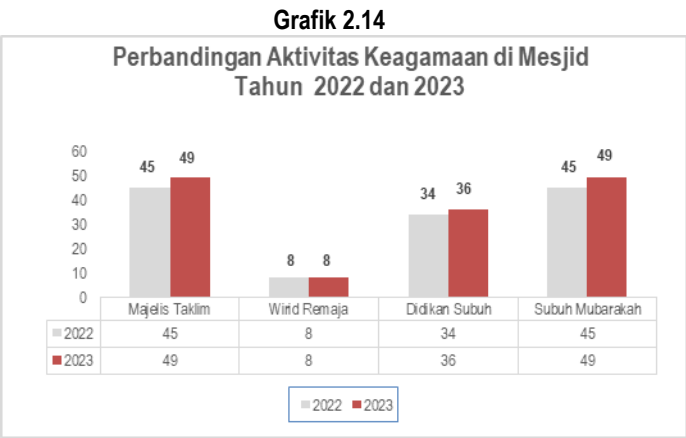
Seluruh kelompok Majelis Taklim tersebut secara rutin mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari mesjid ke mesjid. Selain itu, masing-masing kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di mesjid masing-masing.

Terkait dengan kegiatan Remaja Mesjid, terlihat tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 49 mesjid yang ada, hanya 8 mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran.

Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang terdapat 60 TPQ/MDA pada 36 mesjid dan 24 mushalla, dan semuanya rutin melaksanakan aktivitas Didikan Subuh.

Aktivitas selanjutnya yang menjadi komponen penilaian indikator adalah Subuh Mubarakah. Aktivitas ini pada dasarnya adalah aktivitas yang sering dilaksanakan di mesjid-mesjid setiap bulan. Namun pelaksanaannya ada yang dilakukan secara sederhana dan terbatas untuk jama'ah tetap mesjid dan ada juga yang diselenggarakan secara resmi serta dipublikasikan secara luas.

Jumlah Mesjid yang terdata pada Tahun 2023 bertambah dari 45 menjadi 49 mesjid. Aktivitas yang dilaksanakan cenderung masih sama dengan tahun 2022 seperti disajikan pada grafik berikut ini :



Meskipun dilaksanakan secara terbatas, Pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberikan dukungan dalam upaya mengairahkan kehidupan keagamaan, dalam bentuk dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan mesjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain:

- (1) Pembinaan Remaja Mesjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 4 kali.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Fasilitasi berkurang secara signifikan dibanding tahun 2022 dari 8 menjadi 4 kali, karena 4 remaja mesjid yang mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan secara mandiri.

(2) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2 kali.

(3) Penyediaan Fasilitas Program *Smart Surau*

Fasilitas Program Smart Surau yang bekerja sama dengan ruang guru diberikan kepada mesjid yang berlokasi dekat sarana pendidikan dan memiliki pengurus mesjid aktif serta animo yang tinggi dari masyarakatnya. Tahun 2023 ini fasilitas program smart surau diberikan untuk 6 mesjid, yaitu Mesjid Nurul Amri Balai-Balai, Mesjid Hidayatus Salam Koto Panjang, Mesjid Nurul Ihsan Kampung Manggis, Mesjid Jami' Nurul Huda Silaing Bawah, Mesjid Hidayah Guguk Malintang, dan Mesjid Nurul Huda Ganting. Sehingga total mesjid yang diberikan fasilitas Program *Smart Surau* menjadi 10 mesjid dengan mesjid yang telah difasilitasi pada tahun 2022 yaitu Mesjid Ashliyah Pasar Usang, Mesjid Ilham Koto Panjang, Mesjid Asasi Sigando, dan Mesjid Nurul Iman Silaing Atas.

(4) Fasilitasi jaringan internet pada 45 mesjid

Tahun ini tidak ada penambahan fasilitasi jaringan internet untuk mesjid, jumlahnya masih sama dengan tahun 2022.

(5) Dukungan operasional pengelolaan Mesjid Agung Manarul 'Ilmi *Islamic Centre*

(6) Pelaksanaan Wirid Korpri rutin pada minggu I dan III setiap bulannya di Mesjid Manarul 'Ilmi *Islamic Centre*.

(7) Pelaksanaan Tabligh Akbar setiap peringatan hari besar Islam

(8) Pelatihan bagi Imam Mesjid se Kota Padang Panjang

Tahun 2023 kegiatan pelatihan Imam Mesjid dilaksanakan 1 kali dan diikuti oleh 38 peserta.

(9) Pemberian insentif terhadap imam mesjid, garin mesjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA

(10) Pemberian bantuan hibah untuk mesjid dan mushalla.

(b) Persentase Pemajuan Kebudayaan

Perbandingan capaian indikator persentase pemajuan kebudayaan pada tahun 2022 dan 2023, serta capaian Tahun ke-5 RPJMD adalah seperti disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.30
Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemajuan Kebudayaan	67,00	65,45	97,69	78,00	74,09	94,99	78,00	74,09	94,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Pada tahun 2023 persentase pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang adalah 74,09% meningkat 8,64% dari tahun 2022, namun masih lebih rendah 3,91% dari target akhir RPJMD 78,00%.

Nilai pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

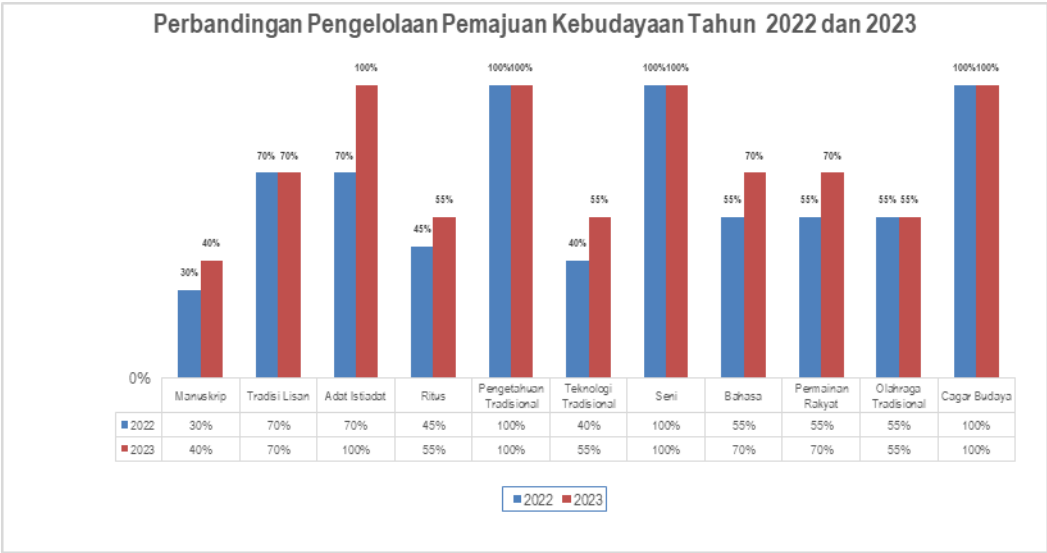
Tabel 2.31
Nilai Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Capaian Tahun 2023						Nilai
		Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	
1	Manuskrip	√	√					40%
2	Tradisi Lisan	√	√	√	√	√		70%
3	Adat Istiadat	√	√	√	√	√	√	100%
4	Ritus	√	√	√	√			55%
5	Pengetahuan Tradisional	√	√	√	√	√	√	100%
6	Teknologi Tradisional	√	√	√	√			55%
7	Seni	√	√	√	√	√	√	100%
8	Bahasa	√	√	√	√	√		70%
9	Permainan Rakyat	√	√	√	√	√		70%
10	Olahraga Tradisional	√	√	√	√			55%
11	Cagar Budaya	√	√	√	√	√	√	100%
Rata-rata								74,09%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Perbandingan pengelolaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pada tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.15



Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat penambahan untuk objek pemajuan kebudayaan yang telah dikelola secara penuh yaitu Adat Istiadat



sehingga bersama dengan Pengetahuan Tradisional dan Seni, total 3 dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang telah dikelola secara penuh.

e) **Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Bagaimana kinerja birokrasi suatu pemerintahan daerah telah dikelola dengan baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Untuk pengukuran Indeks RB tahun 2023 berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks RB Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 66,54 seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.32
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	55,22	59,40	107,57	59,50	66,54	111,83	59,50	66,54	111,83

Sumber Data, Bagian Organisasi Setdako, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah 66,54 meningkat sebanyak 7,14 poin bila dibandingkan tahun 2022 dan telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 59,50 dengan capaian sebesar 111,83%.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, komponen penilaian indeks Reformasi Birokrasi berubah sesuai fokus penyelesaian isu yakni RB General dan RB Tematik, sehingga kita hanya bisa menyandingkan realisasi dan capaian secara keseluruhan saja. Berikut disajikan rincian hasil evaluasi RB Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Tabel 2.33
Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No	Komponen dan Sub Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023
A	RB General		
I.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00	4,86
II.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00	20,52
III.	Capaian Sasaran Strategis	50,00	36,34
	Total Komponen RB General (A)	100	61,72
B	RB Tematik		
I.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5,00	0,29
II.	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	15,00	4,31
	Total Komponen RB Tematik (B)	20	4,60
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	120	66,54

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada komponen RB General dan RB Tematik perlu menyusun strategi agar penyelesaian isu-isu strategis tersebut dapat segera dan selesai ditindaklanjuti pada tahun 2024. Atas penilaian tersebut diatas, pemerintah



Kota Padang Panjang akan dan sedang melakukan upaya untuk penyelesaian mengatasi isu-isu yang belum tercapai secara optimal, yakni:

1. Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan peraturan Kepala Daerah dan memastikan indikator output berfokus pada tata kelola dan lebih relevan serta cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan.
2. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Kerja yang prosesnya sudah sampai pada pembahasan oleh Tim untuk diteruskan pada *legal drafting* di Bagian Hukum.
3. Perbaikan rencana aksi terkait Maturitas SPIP dengan melakukan penyempurnaan penjabaran kinerja yang telah ada melalui penjenjangan kinerja. Membangun unit kerja/tim kerja berintegritas dan melayani pada Instansi Pemerintah.
4. Menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *as-is* dalam Sistem Informasi Arsitektur (SIA).
5. Dalam proses aktivasi Akun untuk melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan rencana aksi sebagai strategi pelaksanaan RB Tematik dengan melengkapi rencana aksi untuk tema investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan melaporkan pencapaian dari indikator dampak RB Tematik.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih telah ditetapkan 1 sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada sasaran ini terdapat empat indikator yaitu: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Opini BPK, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.34
Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja		Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (62,30)	B (62,91)	100,98	B (63,10)	B (63,28)	100,29	B (63,10)	B (63,28)	100,29
2	Opini BPK	WTP	WTP	sesuai	WTP	NA		WTP	NA	
3	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,00)	Sangat Inovatif (62,04)	95,45	Sangat Inovatif (66,00)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88	Sangat Inovatif (66,00)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,13 (Sangat Baik)	96,09 (Sangat Baik)	99,96	96,09 (Sangat Baik)	95,96 (Sangat Baik)	99,86	90,02 (Sangat Baik)	95,96 (Sangat Baik)	106,60

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako, BPKD, 2023

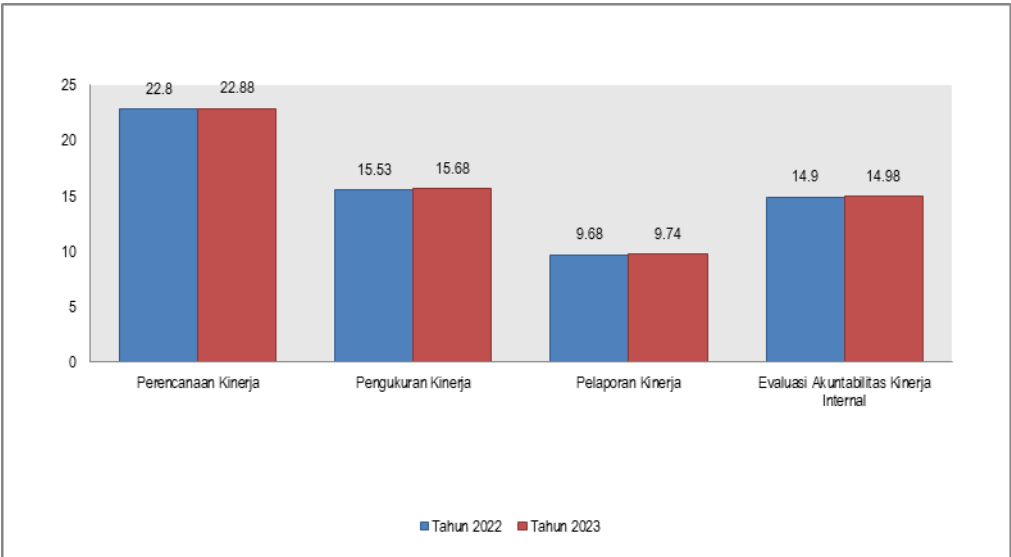


1. Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Guna mengetahui tingkat implementasi SAKIP, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level kota maupun pada level perangkat daerah. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 63,28 dengan predikat “B”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 2.16



Dari hasil evaluasi diatas menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah baik untuk pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 dan belum sampai pada level kinerja lebih rendah.

Bila pencapaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat peningkatan nilai per komponen walaupun belum signifikan. Pada tahun 2022 nilai AKIP Pemerintah Kota Padang Panjang adalah 62,91, meningkat sebesar 0,37 pada tahun 2023 menjadi 63,28. Dari empat komponen evaluasi kinerja, peningkatan capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada komponen pengukuran kinerja, yakni 0,15 poin dari total peningkatan nilai 0,37 poin.



Peningkatan nilai tersebut diperoleh atas pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukannya reviu terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan kualitas sasaran, indikator dan keterpaduan perencanaan
2. Telah dibangunnya aplikasi manajemen kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah; dan
3. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang.

Atas upaya yang telah dilakukan tersebut, nyatanya tidak cukup untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran pemerintah yang berorientasi hasil. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi belum maksimalnya capaian kinerja pemerintah kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia perencana yang belum memadai sehingga penjenjangan kinerja yang telah dilakukan belum menjabarkan kinerja keseluruhan yang memenuhi prinsip logis. Masih terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan spesifik sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan juga belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis.
2. Belum dirumuskannya instrumen pengukuran kinerja secara berkala yang tepat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan dan pengukuran kinerja yang dilaksanakan belum bisa memberikan masukan yang konkrit untuk pencapaian kinerja yang maksimal dan tepat waktu.
3. Manajemen data yang belum efektif pada perangkat daerah sangat mempengaruhi hasil analisa capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ingin dicapai. Belum tersedianya basis data yang tepat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hasil analisa capaian keberhasilan dari suatu kinerja. Tentunya juga akan berpengaruh pada pengambil kebijakan pimpinan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan.
4. Perangkat daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh inspektorat, sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja pun belum maksimal dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis pada masing-masing perangkat daerah, dan tentunya itu akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

2. Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan



pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian sistem pemerintahan. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2022, Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut dari BPK. WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan prinsip Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kesuksesan yang ketujuh kali hasil Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang ini diraih dengan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen atas prestasi opini yang diraih ini dapat dijadikan standar kualitas kerja di masa mendatang, agar mutu kinerja dan pelayanan bagi publik bisa terus terbentuk semakin baik. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BPK setiap tahunnya diharapkan mampu mengarahkan Pemerintah Kota Padang Panjang menuju tatanan pemerintahan yang semakin optimal.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini BPK	WTP	WTP	tercapai	WTP	WTP	tercapai	WTP	WTP	tercapai

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Faktor - faktor pendukung atau Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tersebut adalah:

1. Rekonsiliasi data dengan OPD secara periodik.
2. Melakukan sosialisasi mengenai kiat-kiat penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh PPK OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Melakukan pendampingan secara khusus kepada masing-masing OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Padang Panjang .
4. Melakukan koordinasi dengan BPK dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Indikator Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya

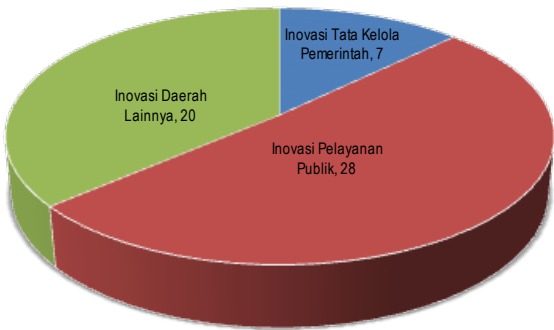


kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya, melalui kegiatan indeks inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks inovasi daerah menunjukkan pemeringkatan inovasi daerah yang dapat menggambarkan pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Padang Panjang mengirimkan 55 inovasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri seperti disajikan grafik berikut :

Grafik 2.17
Bentuk Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023



Dari 55 inovasi yang dikirimkan, 28 diantaranya merupakan inovasi pelayanan publik. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang serius dalam menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin prima. Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kota Padang Panjang menduduki peringkat ke-14 sebagai Kota Sangat Inovatif Nasional dengan nilai indeks 63,28.

Tabel berikut menyajikan capaian indikator Indeks inovasi daerah Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2023 dan perbandingan dengan target RPJMD.

Tabel 2.36
Capaian Indeks Inovasi Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (62,04)	95,45	Sangat Inovatif (66,00)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88	Sangat Inovatif (66,00)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88

Sumber : BAPPEDA, 2023



Untuk tahun 2023, capaian Indeks inovasi daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang. Karena meskipun berada pada predikat Sangat Inovatif, skor indeks masih dibawah target sehingga capaiannya 95,88%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, terjadi peningkatan dari skor 62,04 menjadi 63,28. Dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun kelima, capaian tahun 2023 juga belum memenuhi target, sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai target di tahun yang akan datang.

Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian indeks inovasi tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Ketidakpastian politik dan perubahan kepemimpinan.

Perubahan dalam kepemimpinan politik dan administratif dapat mengakibatkan perubahan prioritas dan fokus, menghambat kelanjutan inisiatif inovatif. Ketidakpastian kebijakan dapat membuat pemerintah enggan untuk berinvestasi dalam proyek inovasi jangka panjang.

2. Budaya organisasi pemerintahan yang resisten terhadap perubahan.

Budaya yang konservatif dan resisten terhadap perubahan dalam organisasi pemerintahan dapat menjadi hambatan utama. Pegawai yang tidak nyaman atau enggan mengadopsi perubahan dapat menghambat kemajuan inovasi.

3. Ketidakmampuan dalam manajemen inovasi daerah.

Kurangnya keterampilan dalam mengelola dan perencanaan strategis dapat menghambat keberlanjutan inovasi.

4. Kendala hukum dan regulasi.

Turunan regulasi inovasi daerah yang bersifat lokal di Pemerintah Kota Padang Panjang sejauh ini belum ada. Regulasi spesifik secara lokal akan mampu memberikan kepastian dan dukungan yang mutlak terhadap keberlanjutan penyelenggaraan inovasi daerah.

5. Kurangnya kapasitas dan keterampilan.

Kurangnya keterampilan dalam hal teknologi, analisis data, dan desain thinking dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif.

6. Kurangnya keterlibatan masyarakat.

Ketidakpartisipatifan masyarakat dalam proses inovasi dapat menjadi hambatan. Dukungan masyarakat dan partisipasi dapat mempercepat adopsi inovasi. Inovasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat mungkin tidak berhasil.



7. Keterbatasan akses terhadap data.

Inovasi seringkali membutuhkan akses terhadap data yang luas dan berkualitas tinggi. Keterbatasan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data dapat menjadi hambatan. Membangun sistem yang mendukung pengelolaan data yang efektif adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan inovasi.

8. Tidak adanya rencana keberlanjutan.

Tidak memikirkan keberlanjutan inovasi dapat mengakibatkan gagalnya implementasi jangka panjang. Jadi, sangat penting untuk merencanakan dan memasukkan strategi keberlanjutan dalam setiap proyek inovatif.

Pada tahun 2023 untuk peningkatan layanan publik di Kota Padang Panjang, PDAM turut berpartisipasi melahirkan sebuah inovasi yang beradaptasi dan bertransformasi mengikuti pola kerja perusahaan yang efisien di era Revolusi Industri 4.0, yaitu sistem Aplikasi *Smart Water Mangement System* (SWMS). Inovasi masuk sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 melalui Surat Keputusan Menteri PANRB nomor 558 Tahun 2023 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023.



Keterangan: Foto Piagam Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

4. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas (LPPM UNAND) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 15 Unit Kerja Pelayanan Publik, dan diperoleh rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 95,96, predikat sangat baik dan mutu pelayanan A, seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.37
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	96,13 (Sangat Baik)	96,09 (Sangat Baik)	99,96	96,09 (Sangat Baik)	95,96 (Sangat Baik)	99,86	90,02 (Sangat Baik)	95,96 (Sangat Baik)	106,60

Sumber : Sekretariat Daerah, Hasil SKM Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang adalah sebesar 95,96. Angka ini berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 96,09, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 99,86%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,13. Namun demikian, pencapaian tahun 2023 ini telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 106,60%.

Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayananan yang dilakukan oleh 15 Unit Kerja Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Nilai IKM 2023

NO	Unit Kerja Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Kinerja Layanan
1.	Puskesmas Kebun Sikolos	97,65	A	Sangat Baik
2.	Puskesmas Bukit Surungan	98,52	A	Sangat Baik
3.	Puskesmas Koto Katik	96,37	A	Sangat Baik
4.	Puskesmas Gunung	99,09	A	Sangat Baik
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,39	A	Sangat Baik
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,42	A	Sangat Baik
7.	Dinas Kesehatan	94,52	A	Sangat Baik
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85,96	B	Baik
9.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	94,48	A	Sangat Baik
10.	Kelurahan Silaing Atas	96,35	A	Sangat Baik
11.	Kelurahan Ngalau	98,41	A	Sangat Baik
12.	Kelurahan Ekor Lubuk	97,94	A	Sangat Baik
13.	Kecamatan Padang Panjang Barat	93,90	A	Sangat Baik
14.	Kecamatan Padang Panjang Timur	93,30	A	Sangat Baik
15.	RSUD Kota Padang Panjang	97,11	A	Sangat Baik
	Rata-Rata	95,96	A	Sangat Baik



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Capaian hasil survei kepuasan masyarakat diatas dapat memberikan gambaran pada masyarakat Kota Padang Panjang terhadap kinerja 15 unit pelayanan yang dinilai, dan juga menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat tersebut. Atas hasil survei kepuasan masyarakat tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dijadikan prioritas perbaikan pada tahun 2024, diantaranya :

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus pada masyarakat mengenai tata cara penyampaian pengaduan atas layanan yang diterima baik secara *online* maupun *offline* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara penyampaian pengaduan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sesuai standar pelayanan.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan.

Pada tahun 2023 Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi dengan nilai 90,72. melalui Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.



Ket : Foto Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 40.461.665.400,-**bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Sekretariat DPRD untuk melaksanakan 22 program, yaitu:

1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Penyelenggaraan Pengawasan
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4. Pengelolaan Keuangan Daerah



- 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 6. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 7. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8. Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 9. Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 10. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 11. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 12. Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi
- 13. Pendaftaran Penduduk
- 14. Pencatatan Sipil
- 15. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 16. Pengelolaan Profil Kependudukan
- 17. Pengelolaan Arsip
- 18. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 19. Kepegawaian Daerah
- 20. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 21. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 22. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

f) **Tujuan Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**

Capaian tujuan Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan diukur dengan menggunakan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan membandingkan total anggaran partisipasi (swadaya masyarakat/swasta) yang ada di kelurahan dengan total belanja daerah tahun berjalan. Capaian indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	4,58	4,60	100,44	4,60	5,02	109,13	4,59	5,02	109,32

Sumber Data :Analisa, 2023

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahun 2023 adalah 5,02% meningkat 0,42% dibanding tahun 2022, yaitu 4,60% bahkan telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian 109,32%.

Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Padang Panjang pada tahun 2023 antara lain adalah :



1. Gotong Royong rutin kelurahan
2. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
3. Pelaksanaan Pos Keamanan Lingkungan
4. Kehadiran masyarakat pada rapat-rapat kelurahan, kecamatan, kota
5. Kehadiran masyarakat pada musrenbang RT/kelurahan/kecamatan/kota
6. Keikutsertaan pada berbagai even tingkat RT/kelurahan/kecamatan/kota berupa lomba, pelatihan, festival, dll
7. Penyerahan lahan untuk pembangunan fasilitas umum (saat pengurusan Keterangan Rencana Kota).

Dengan Rincian total alokasi anggaran dari seluruh kegiatan diatas sebagai berikut :

Tabel 2.40
Alokasi anggaran yang melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Anggaran Partisipasi Kecamatan Padang Panjang Timur	3.512.800.000	3.264.100.000
2	Anggaran Partisipasi Kecamatan Padang Panjang Barat	8.610.430.000	6.150.070.000
3	Penyerahan Lahan (dari pengurusan Advice Planning)	2.588.000.000	6.955.000.000
	Total	4.711.230.000	16.369.170.000

Sumber Data :Analisa, 2023

Total Belanja APBD Kota Padang Panjang Tahun 2023 di luar belanja pegawai, hibah, bansos, subsidi dan BTT sebesar Rp. 326.227.231.249, sehingga Capaian partisipasi masyarakat $16.369.170.000/326.227.231.249 = 5,02\%$.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan telah ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Peran Serta Kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan dan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Meningkatnya Peran Serta Kelompok/Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pembangunan diukur dengan menggunakan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Lembaga kemasyarakatan yang aktif ditandai dengan kriteria berikut :

1. Melakukan pertemuan rutin setiap bulan.
2. Memiliki kegiatan rutin sekurang-kurangnya 1 kegiatan setiap bulan.



- 3. Aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
- 4. Menyampaikan pelaporan organisasi kepada DinsosPPKBPPPA Kota Padang Panjang setiap tahun.

Pada tahun 2023, dari 60 lembaga kemasyarakatan dibawah binaan DinsosPPKBPPPA yang terdiri dari terdiri dari DPD LPM Kota (1), DPC LPM Kecamatan (2), LPM Kelurahan (16), TP PKK Kota (1), TP PKK Kecamatan (2), TP PKK Kelurahan (16), Karang Taruna Kota (1), Karang Taruna Kecamatan (2), Karang Taruna Kelurahan (16), LKKS Kota (1), LK3 (1) dan Puskesmas (1), ditargetkan aktif sebanyak 58 lembaga (96,67%) dan dapat terealisasi sebanyak 60 lembaga (100%) sebagaimana disajikan pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.41
Capaian Peran Serta Kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	93,00	96,67	103,94	96,67	100,00	103,46	95,00	100,00	105,26

Sumber :Dinsos PPKBPPBA, 2023

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif tahun 2023 adalah 100,00% lebih tinggi dibanding tahun 2022 dan target akhir RPJMD 2023, yaitu 95,00% dengan capaian 105,26%.

Pada tahun 2022 masih terdapat 2 Karang Taruna yang belum aktif disebabkan telah habisnya masa aktif pengurus karang taruna sehingga kepengurusan karang taruna. Pada tahun 2023 dua lembaga tersebut telah aktif kembali dan dapat melaksanakan kegiatan dengan telah di bentuknya kepengurusan yang baru dan telah melaksanakan kegiatan karang taruna kembali di tahun 2023 ini sehingga capaian indikator sasaran dapat mencapai 100%.

Adapun faktor-faktor pendorong kenaikan persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, adalah :

- 1. Dilakukannya pembinaan secara rutin oleh lembaga masyarakat tingkat Kota seperti PKK, DPD LPM, dan Karang Taruna tingkat Kota ke lembaga masyarakat tingkat Kelurahan
- 2. Dilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga masyarakat seperti bimbingan teknis untuk 75 orang anggota/pengurus karang taruna kelurahan.
- 3. Dilaksanakannya kegiatan lomba yang memotivasi keikutsertaan lembaga masyarakat seperti diselenggarakannya lomba antar LPM Kelurahan (LPM award pada bulan Oktober 2023), lomba dan turnamen sepakbola LPM Cup pada bulan Agustus 2023.



Upaya ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 15.810.037.383,-** bagi Kecamatan, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol dalam melaksanakan 8 Program :

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4. Perlindungan Khusus Anak
5. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
7. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Untuk menilai sejauh mana pemberdayaan Perempuan di Kota Padang Panjang, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Data IDG Kota Padang Panjang untuk tahun 2023, belum dipublikasikan oleh Kementerian PPPA RI.

Tabel 2.42
Capaian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			RPJMD Tahun ke-5		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,44	67,82	97,67	70,84	NA		70,84	NA	

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam mendukung pemberdayaan perempuan, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 198.506.000,-** melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial PPKB PPPA.

Realisasi Anggaran

Untuk mendukung seluruh sasaran kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang telah diperjanjikan melalui 13 sasaran strategis Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasi anggaran sebesar **Rp.299.405.602.231,00** untuk menyelenggarakan 107 program. Anggaran ini terealisasi sebesar **Rp. 249.542.597.876,50 (83,35%)**, dan telah dilaksanakan evaluasi/pengukuran kinerja secara triwulanan baik tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Kota.



Dan diperoleh hasil seperti ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2023

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
S1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4,967,082,700.00	4,677,747,874.00	94.17%
		2	Perencanaan dan Pembangunan Industri	714,776,750.00	662,864,975.00	92.74%
		3	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	572,931,200.00	544,819,285.00	95.09%
		4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	32,562,850.00	25,764,100.00	79.12%
		5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	420,370,000.00	410,813,700.00	97.73%
		6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	209,070,000.00	208,240,650.00	99.60%
		7	Pemasaran Pariwisata	128,990,000.00	126,142,250.00	97.79%
		8	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	145,196,800.00	128,930,624.00	88.80%
		9	Pengembangan iklim penanaman modal	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
		10	Perekonomian dan Pembangunan	581,290,370.00	491,570,762.00	84.57%
		11	Pengendalian Izin Usaha Industri	3,054,800.00	2,279,400.00	74.62%
		12	Pelayanan penanaman modal	125,541,800.00	119,696,672.00	95.34%
		13	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	7,547,900.00	7,279,900.00	96.45%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		14	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	47,741,400.00	39,161,600.00	82.03%
		15	stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	200,709,300.00	148,768,750.00	74.12%
		16	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	181,052,313.00	160,015,329.00	88.38%
		17	Pengelolaan Perikanan Budidaya	560,054,800.00	509,994,511.00	91.06%
		18	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	64,184,440.00	62,601,948.00	97.53%
		19	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500,574,550.00	395,945,933.00	79.10%
		20	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	39,860,000.00	37,880,708.00	95.03%
		21	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	417,400,000.00	389,121,836.00	93.23%
			Subtotal	9,927,491,973.00	9,157,140,807.00	92.24%
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1,292,337,602.00	1,254,401,592.76	97.06%
		2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2,834,087,700.00	2,766,269,338.11	97.61%
		3	Penataan Bangunan Gedung	212,685,000.00	80,499,900.00	37.85%
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	793,940,000.00	787,413,760.00	99.18%
		5	Penyelenggaraan Jalan	3,081,563,671.00	3,005,952,651.64	97.55%
		6	Penyelenggaraan Penataan Ruang	432,696,257.00	360,946,463.00	83.42%
		7	Pengembangan Jasa Konstruksi	10,990,000.00	9,194,075.00	83.66%
		8	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4,046,641,463.00	3,895,228,841.62	96.26%
		9	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4,730,429,958.00	4,579,576,911.28	96.81%
		10	Penanggulangan Bencana	1,274,223,434.00	1,110,737,374.00	87.17%
		11	Pengelolaan Persampahan	8,851,571,950.00	8,559,135,845.00	96.70%
		12	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	15,553,850.00	14,575,250.00	93.71%
		13	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	335,436,040.00	314,206,064.00	93.67%
		14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	144,665,600.00	62,020,000.00	42.87%
		15	Penyelenggaraan Penataan Ruang	432,696,257.00	360,946,463.00	83.42%
		16	Penatagunaan Tanah	13,042,500.00	11,142,000.00	85.43%
		17	Perencanaan Lingkungan Hidup	144,637,650.00	140,300,600.00	97.00%
		18	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1,991,553,600.00	1,951,518,498.00	97.99%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		19	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	8,131,000.00	6,491,700.00	79.84%
		20	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	115,149,600.00	104,858,400.00	91.06%
		21	Penanganan Bencana	79,343,319.00	73,597,600.00	92.76%
		22	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21,250,000.00	18,765,000.00	88.31%
			Subtotal	30,862,626,451.00	29,467,778,327.41	95.48%
S3.	Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	101,797,050.00	89,022,650.00	87.45%
		2	Pengembangan Perumahan	346,508,544.00	231,073,068.00	66.69%
		3	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,210,268,108.00	1,087,099,963.00	89.82%
		4	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	334,908,050.00	316,570,400.00	94.52%
		5	Hubungan industrial	740,174,400.00	740,107,200.00	99.99%
		6	Kawasan Permukiman	2,571,717,160.00	2,550,243,840.00	99.17%
			Subtotal	5,305,373,312.00	5,014,117,121.00	94.51%
S4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	198,303,550.00	165,897,394.00	83.66%
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,953,832,500.00	1,727,542,800.00	88.42%
		2	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	530,155,850.00	528,406,825.00	99.67%
		3	Penyuluhan Pertanian	310,760,600.00	215,152,583.00	69.23%
			Subtotal	2,794,748,950.00	2,471,102,208.00	88.42%
S6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	1	Pengelolaan Pendidikan	32,134,275,050.00	28,752,890,483.49	89.48%
		2	Pembinaan Perpustakaan	474,537,400.00	446,853,590.00	94.17%
			Subtotal	32,608,812,450.00	29,199,744,073.49	89.55%
S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25,850,052,009.00	22,488,737,944.00	87.00%
		2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,360,076,898.00	42,857,038,770.00	94.48%
		3	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,332,812,000.00	1,111,523,067.00	83.40%
		4	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1,334,854,900.00	917,557,532.00	68.74%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	595,182,850.00	372,132,550.00	62.52%
		6	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	61,709,576,150.00	34,239,427,764.87	55.48%
		7	Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	775,520,655.00	417,847,100.00	53.88%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	244,071,200.00	215,914,900.00	88.46%
		9	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	65,135,600.00	61,320,416.00	94.14%
		10	Pengendalian Penduduk	116,641,900.00	76,865,915.00	65.90%
		11	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	270,069,300.00	247,523,390.00	91.65%
			Subtotal	137,653,993,462.00	103,005,889,348.87	74.83%
S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,758,130,000.00	3,713,129,200.00	98.80%
		2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,262,878,800.00	1,221,273,600.00	96.71%
		3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	62,787,850.00	51,433,100.00	81.92%
			Subtotal	5,083,796,650.00	4,985,835,900.00	98.07%
S9.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Rehabilitasi Sosial	475,100,451.00	446,875,900.00	94.06%
		2	Pemberdayaan Sosial	1,490,474,780.00	1,430,303,173.00	95.96%
		3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	217,192,750.00	216,694,915.00	99.77%
		4	peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	460,576,800.00	438,132,833.00	95.13%
		5	Perlindungan Perempuan	178,802,000.00	95,040,450.00	53.15%
			Subtotal	2,822,146,781.00	2,627,047,271.00	93.09%
S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, adat dan budaya di Masyarakat	1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,773,705,769.00	12,857,398,361.00	87.03%
		2	Pengembangan Kebudayaan	904,394,100.00	786,673,280.00	86.98%
			Subtotal	15,678,099,869.00	13,644,071,641.00	87.03%
S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	340,502,800.00	305,762,241.00	89.80%
		2	Penyelenggaraan Pengawasan	363,225,000.00	362,100,500.00	99.69%
		3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	169,542,500.00	159,166,610.00	93.88%
		4	Pengelolaan Keuangan Daerah	1,446,656,300.00	787,533,950.00	54.44%
		5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	536,450,700.00	354,064,098.00	66.00%
		6	Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	96,637,600.00	90,793,508.00	93.95%
		7	Pengembangan Sumber Daya Manusia	712,595,900.00	647,813,107.00	90.91%
		8	Penelitian dan Pengembangan Daerah	50,039,750.00	41,301,440.00	82.54%
		9	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,653,626,800.00	2,457,460,534.00	92.61%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29,980,000.00	24,157,050.00	80.58%
		11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,515,758,200.00	2,491,833,598.00	99.05%
		12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	11,937,000.00	11,485,875.00	96.22%
		13	Pendaftaran Penduduk	174,231,700.00	166,603,275.00	95.62%
		14	Pencatatan Sipil	168,588,100.00	159,511,250.00	94.62%
		15	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	147,351,900.00	132,334,700.00	89.81%
		16	Pengelolaan Profil Kependudukan	25,249,200.00	19,311,875.00	76.49%
		17	Pengelolaan Arsip	45,206,200.00	40,671,185.00	89.97%
		18	Pengelolaan Pendapatan Daerah	477,429,400.00	352,319,529.00	73.80%
		19	Kepegawaian Daerah	824,401,350.00	519,557,722.00	63.02%
		20	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7,769,477,550.00	7,559,992,916.00	97.30%
		21	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	61,292,150.00	52,906,850.00	86.32%
		22	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21,841,485,300.00	17,592,274,193.00	80.55%
			Subtotal	40,461,665,400.00	34,328,956,006.00	84.84%
S12.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6,542,412,076.00	6,417,005,373.00	98.08%
		2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	939,976,600.00	890,354,550.00	94.72%
		3	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	51,619,800.00	49,873,300.00	96.62%
		4	Perlindungan Khusus Anak	422,187,000.00	228,578,761.00	54.14%
		5	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7,481,820,357.00	7,353,906,436.73	98.29%
		6	pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	120,747,500.00	113,942,000.00	94.36%
		7	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51,274,050.00	37,710,450.00	73.55%
		8	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200,000,000.00	198,349,953.00	99.17%
			Subtotal	15,810,037,383.00	15,289,720,823.73	96.71%
S13.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	198,506,000.00	185,296,955.00	93.35%

Sumber : BPKD, 2023 (diolah)

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran setiap program pendukung sasaran. Besarnya efisiensi atau inefisiensi diperoleh dari



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

pengurangan angka rata-rata capaian indikator kinerja persasaran terhadap angka rata-rata capaian anggaran program persasaran, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2023

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
S1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5.75	1.87	32.52%	92.24%	-15.86%
		2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	5.28	4.29	81.25%		
		3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pengolahan (%)	3.7	4.79	129.46%		
		4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	10.47	6.52	62.27%		
		Rata-Rata				76.38%		
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5.	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	1.5	1.91292876	127.53%	95.48%	15.24%
		6.	IKLH	72.87	68.44	93.92%		
		Rata-Rata				110.72%		
S3.	Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan	7.	Indeks Gini	0.285	0.273	104.21%	94.51%	6.62%
		8.	Tingkat Kemiskinan (%)	5.14	5.24	98.05%		
		Rata-Rata				101.13%		
S4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.84	5.49	86.57%	83.66%	2.91%
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10.	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat) (ribu rupiah)	11.21	11.31	100.89%	88.42%	12.47%
S6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	11	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12.28	11.94	97.23%	89.55%	9.73%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN		INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	EFISIENSI
		12.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.09	15.29	101.33%		
		Rata-Rata				99.28%		
S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13.	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	73.05	74.24	101.63%	74.83%	25.53%
		14.	Prevelensi Stunting	13.98	14.09	99.21%		
		Rata-Rata				100.36%		
S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100.00	100.00	100.00%	98.07%	1.93%
S9.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	16.	Angka PPKS (%)	5.56	4.69	115.65%	93.09%	22.56%
S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan, adat dan budaya di Masyarakat	17.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid (%)	100.00	100.00	100.00%	87.03%	10.47%
		18.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	78.00	74.09	94.99%		
		Rata-Rata				97.49%		
S11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (63.1)	B (63.28)	100.29%	84.84%	
		20.	Opini BPK	WTP	NA			
		21.	Indeks Inovasi Daerah	B (66)	B (63.28)	95.88%		
		22.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (96.09)	B (95.96)	99.86%		
		Rata-Rata				98.68%		
S12.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	23.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	96.67	100.00	103.44%	96.71%	6.74%
S13.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	24.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.84	NA		93.35%	

Sumber : *Bagian Organisasi dan BPKD 2023, data diolah*

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terjadi efisiensi dalam pencapaian kinerja di Kota Padang Panjang. Dari 13 (tiga belas) sasaran, baru 11 yang bisa diukur efisiensinya dan diperoleh 1 (satu) sasaran yang mengalami inefisiensi yaitu pada Sasaran Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas Pembantuan, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 368 ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pemberian tugas pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.3 Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.



3.3 Saran dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pendidikan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan ini ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Pendidikan Dasar Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian penerapanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 direncanakan100% dengan terlayannya pemenuhan kebutuhan dasar angka partisipasi sekolah di tingkat Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Target capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	2393
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Angka partisipasi sekolah	70,5%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	67,27%
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	91,26%
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2,8%
	5. Kecukupan formasi guru ASN	100%
	6. Indeks distribusi guru	100%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	5,3%
	8. Proporsi PTK penggerak	92%
	9. Pengalaman pelatihan guru	100%
2 .	Pendidikan Dasar	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	12.189
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	SD	
	1. Angka partisipasi kasar	108,25%
	2. Angka partisipasi sekolah	99,4%
	3. Angka partisipasi murni	99,6%
	4. Kemampuan literasi	89.11
	5. Kemampuan numerasi	71.56



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	6. Perbedaan Skor Literasi	4.01
	7. Perbedaan Skor numerasi	19.5
	8. Indeks iklim keamanan	73.63
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	72,41%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	100%
	11. Indeks distribusi guru	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	37,3%
	13. Proporsi PTK penggerak	15%
	14. Pengalaman pelatihan guru	98%
	SMP	
	1. Angka partisipasi kasar	102,22%
	2. Angka partisipasi sekolah	97,3%
	3. Angka partisipasi murni	79,63%
	4. Kemampuan literasi	79.3
	5. Kemampuan numerasi	56.78
	6. Perbedaan skor literasi	9.96
	7. Perbedaan skor numerasi	1.57
	8. Indeks iklim keamanan	71.29
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	69,29%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	100%
	11. Indeks distribusi guru	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	43,47%
	13. Proporsi PTK penggerak	10%
	14. Pengalaman pelatihan guru	98%
3.	Pendidikan Kesetaraan	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	437
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Angka partisipasi kasar	407%
	2. Angka partisipasi sekolah	28,22%
	3. Angka partisipasi murni	407%
	4. Kemampuan literasi	32
	5. Kemampuan numerasi	3
	6. Perbedaan skor literasi	3
	7. Perbedaan skor numerasi	407
	8. Indeks iklim keamanan	100
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100
	10. Kecukupan formasi guru ASN	100%
	11. Indeks distribusi guru	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	0%
	13. Proporsi PTK penggerak	0%
	14. Pengalaman pelatihan guru	100%

4.1.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 99,99% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.99%	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG		2393	2393	0	100.00%	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	HARUS DILAYANI :						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	70.5	70.5	0	100.00%	
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	67.27	67.27	0	100.00%	
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	91.26	91.26	0	100.00%	
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2.8	2.8	0	100.00%	
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00%	
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00%	
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	5.3	5.3	0	100.00%	
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	92	92	0	100.00%	
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100.00%	
2 .	Pendidikan Dasar					99.98%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		12189	12189	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.98%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.91%	
	SD						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	108.25	108.25	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.4	99.4	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi murni	%	99.6	99.6	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	89.11	89.11	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	71.56	71.56	0	100.00%	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4.01	4.01	0	100.00%	
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	19.5	19.5	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.63	73.63	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	72.41	72.41	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	99.5	0.5	99.50%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	37.3	37.3	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	15	15	0	100.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	98	98	0	100.00%	
	SMP						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	102.22	102.22	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	97.3	97.3	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi murni	%	79.63	79.63	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	79.3	79.3	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.78	56.78	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	9.96	9.96	0	100.00%	
	7 . Perbedaan skor	Nilai	1.57	1.57	0	100.00%	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	numerasi						
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.29	71.29	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	69.29	69.29	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	98	2	98.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	43.47	43.47	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	10	10	0	100.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100.00%	
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		437	437	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	407	407	0	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	28.22	28.22	0	100.00%	
	3 . Angka partisipasi mumi	%	407	407	0	100.00%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	32	32	0	100.00%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	3	3	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3	3	0	100.00%	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	407	407	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	100	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	100	0	100.00%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00%	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100.00%	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	102,378,828,647
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	31,615,513,000
	APBD	31,615,513,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	3,720,326,000
	D. APBD DAK NON FISIK	27,895,187,000



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	PENDANAAN	PAGU
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.1.5. Dukungan Personil

Gambaran data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN	21	19	40
2	Non ASN	17	15	32
	JUMLAH	36	27	72

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2023

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	JENJANG	PENDIDIK	TENDIK	JUMLAH
				(Org)
1	PAUD	231	57	288
2	SEKOLAH DASAR	358	173	531
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	282	84	366
4	KESETARAAN	28	8	36
	JUMLAH	899	322	1221

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2023

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM bidang pendidikan diperbaruhi dengan Permendikbud No 32 Tahun 2022. Permasalahan dalam pencapaian SPM belum adanya data terpilah sebagai dasar penghitungan kebutuhan dalam penganggaran SPM dalam RKPD dan terbatasnya anggaran untuk pemenuhan SPM tahun 2023 tetap menjadi permasalahan utama dalam penerapan SPM bidang pendidikan.Solusi kedepannya akan menganggarkan kebutuhan dalam SPM sesuai dengan Permendikbud No 32 Tahun 2022, dan akan meningkatkan SDM dalam kegiatan SPM ini.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Kesehatan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan ini ada 12 (dua belas) yaitu :



- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehtan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	995
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	90
	2. Tablet tambah darah	89.550
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	906
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	906
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	906
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	906
	7. Kartu ibu/rekam medis ibu	906
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	906
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	7
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	28
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	19
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	906
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	923
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Formulir Partograf	923
	2. Kartu ibu (rekam medis)	923
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	923
	4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	7



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	25
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	19
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	916
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Vaksin Hepatitis B0	92
	2. Vitamin K1 injeksi	911
	3. Salep/tetes mata antibiotik	911
	4. Formulir bayi baru lahir	911
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	911
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	911
	7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	7
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	28
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	19
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3.478
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3234
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	3234
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3234
	4. Vitamin A Biru	911
	5. Vitamin A Merah	6468
	6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	869
	7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	92
	8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	911
	9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	92
	10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	186
	11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	92
	12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	0
	13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	92
	14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	92
	15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	0
	16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	916
	17. Peralatan Anafilaktik	16
	18. Tenaga kesehatan : Dokter	13
	19. Tenaga kesehatan : Bidan	32
	20. Tenaga kesehatan : Perawat	19
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	4
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	240
	23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	20
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3175
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Buku raport kesehatanku	2.896
	2. Buku pemantauan kesehatan	67
	3. Kuesioner skrining kesehatan	2.896
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	67
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	67
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	14



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	36
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	27
	9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	4
	10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	9
	11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	208
	12. Tenaga Non kesehatan : Guru	67
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	33.166
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8
	2. Alat ukur berat badan	16
	3. Alat : Alat ukur tinggi badan	16
	4. Alat : Alat ukur lingkar perut	16
	5. Alat : Tensimeter	12
	6. Alat : Glukometer	12
	7. Alat : Tes strip gula darah	33.378
	8. Alat : Lancet	33.378
	9. Alat : Kapas alkohol	12
	10. Alat : KIT IVA Tes	8
	11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4
	12. Tenaga kesehatan : Dokter	11
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	37
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	28
	15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	4
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	9
	17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	74
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	4.511
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	4.340
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	4
	3. Buku kesehatan lansia	4.340
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	11
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	37
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	28
	7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	4
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	9
	9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	108
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	12.437
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	6
	2. Tensimeter	10
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	11
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	37
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	28



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	9
	8. Obat Hipertensi	4
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	788
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Alat : Glukometer	726
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	726
	3. Alat : Kapas Alkohol	4
	4. Alat : Lancet	726
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4
	6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4
	7. Tenaga kesehatan : Dokter	11
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	36
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	27
	10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	4
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	9
	12. Obat Diabetes Melitus	4
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	788
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	4
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	120
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4
	5. Tenaga kesehatan : Dokter	4
	6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	4
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	2
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.496
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	8
	2. Reagen Zn TB	1.483
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1.483
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1.483
	5. Catridge tes cepat molekuler	1.483
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	4
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	4
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	5
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	19
	10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	7
	11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	2
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	9
	13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	2
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.533
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	8
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	1516
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	1516
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	4
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	5
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	19
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	25
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	7
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	9
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	0

4.2.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 96,58% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMATUNTAS UTAMA			96.58%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					92.84%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.84%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	995	906	89	91.06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	90	90	0	100.00%
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	89550	89550	0	100.00%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	906	906	0	100.00%
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	906	906	0	100.00%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	906	906	0	100.00%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	906	906	0	100.00%
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	906	906	0	100.00%
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	906	906	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	7	7	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	906	906	0	100.00%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani	80.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
				Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	923	923	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Formulir Partograf	Formulir	923	923	0	100.00%
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	923	923	0	100.00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	923	923	0	100.00%
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	7	7	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.56%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.56%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	916	911	5	99.45%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	92	92	0	100.00%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	911	911	0	100.00%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	911	911	0	100.00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	911	911	0	100.00%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	911	911	0	100.00%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	911	911	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	7	7	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					92.65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.39%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3478	3234	244	92.98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.26%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	91.30%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	3234	3234	0	100.00%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	3234	3234	0	100.00%
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3234	3234	0	100.00%
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	911	911	0	100.00%
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	6468	6468	0	100.00%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	869	869	0	100.00%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	92	92	0	100.00%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	911	911	0	100.00%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	92	92	0	100.00%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	186	186	0	100.00%
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	92	92	0	100.00%
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	0	0	0	0%
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	92	92	0	100.00%
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	92	92	0	100.00%
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	0	0	0	0%
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	916	916	0	100.00%
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	16	16	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	13	13	0	100.00%
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	32	32	0	100.00%
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	4	4	0	100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	240	240	0	100.00%
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	20	20	0	100.00%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					92.97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.97%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3175	2896	279	91.21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	2896	2896	0	100.00%
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	67	67	0	100.00%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	2896	2896	0	100.00%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	67	67	0	100.00%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	67	67	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	14	14	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	36	36	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	4	4	0	100.00%
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	208	208	0	100.00%
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	67	67	0	100.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	33166	33166	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	8	8	0	100.00%
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	16	16	0	100.00%
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	16	16	0	100.00%
	4 . Alat : Alat ukur lingkaran perut	Unit	16	16	0	100.00%
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	12	12	0	100.00%
	6 . Alat : Glukometer	Unit	12	12	0	100.00%
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	33378	33378	0	100.00%
	8 . Alat : Lancet	Unit	33378	33378	0	100.00%
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	12	12	0	100.00%
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	8	8	0	100.00%
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	4	4	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	37	37	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	4	4	0	100.00%
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	74	74	0	100.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					96.97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.97%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4511	4340	171	96.21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	4340	4340	0	100.00%
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	4	4	0	100.00%
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	4340	4340	0	100.00%
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	37	37	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	4	4	0	100.00%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	108	108	0	100.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					93.89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.89%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	12437	11487	950	92.36%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	6	6	0	100.00%
	2 . Tensimeter	Unit	10	10	0	100.00%
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	4	4	0	100.00%
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	37	37	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	100.00%
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	8 . Obat Hipertensi	Paket	4	4	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					93.71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.71%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	788	726	62	92.13%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Alat : Glukometer	Unit	726	726	0	100.00%
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	726	726	0	100.00%
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	4	4	0	100.00%
	4 . Alat : Lancet	Unit	726	726	0	100.00%
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	4	4	0	100.00%
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	4	4	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	36	36	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	4	4	0	100.00%
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	4	4	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	123	123	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang	Jumlah yang belum	100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
				terlayani	terlayani	
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	4	4	0	100.00%
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	4	4	0	100.00%
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	120	120	0	100.00%
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	4	4	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	4	4	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	4	4	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	2	2	0	100.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					99.30%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.30%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1496	1483	13	99.13%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00%
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	8	8	0	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Paket	1483	1483	0	100.00%
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	1483	1483	0	100.00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	1483	1483	0	100.00%
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	1483	1483	0	100.00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4	4	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	4	4	0	100.00%
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	5	5	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	2	2	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	2	2	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					97.11%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.11%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1533	1516	17	98.89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.00%
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	8	8	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	1516	1516	0	100.00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1516	1516	0	100.00%
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	4	4	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	5	5	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	9	9	0	100.00%
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0%
	JUMLAH	3,109	3,109	0	900.00%	

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	85,828,474,456
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,066,244,100
	APBD	1,066,244,100
	A. APBD MURNI	
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	1,066,244,100
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang
Berdasarkan Jenis Kelamin SDM Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	2	5
Kecamatan Padang Panjang Barat		
1.	HC KBS	42
2.	HC BUSUR	54
3.	IFK	3
4.	RSI IBNU SINA	98
5.	KLINIK SITI AMINAH	3
6.	KLINIK ASSYIFA	6
7.	PSC 119	14
8.	TPMD/TPMDG	8
	Total	228
Kecamatan Padang Panjang Timur		
1.	HC GUNUNG	47
2.	HC KOTO KATIK	39
3.	RSUD PADANG PANJANG	346
4.	KLINIK SECATA	2
5.	KLINIK POLRES	3
6.	KLINIK GUNUNG	13
7.	KLINIK LAPAS	8



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	2	5
8.	TPMD/TPMDG	4
	Total	462
	TOTAL KESELURUHAN	690

Sumber : Seksi SDK dan Peningkatan Mutu tahun 2023

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target 100%, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Kendala, Permasalahan dan Solusi Capaian SPM Tahun 2023

NO	Jenis Layanan Dasar	Capain %	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	91,06 %	• Belum optimalnya pendampingan pembina wilayah karena ada bidan kelurahan yang memegang lebih dari satu jejaring • Terdapat sasaran yang berdomisili diluar wilayah kerja	• Perlu ditetapkan sasaran yang memang berdomisili di wilayah kerja (Rill)
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,45 %	Terdapat sasaran yang berdomisili diluar wilayah kerja	Perlu ditetapkan sasaran yang memang berdomisili di wilayah kerja (Rill)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	92,98 %	• Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap penting pelayanan kesehatan bagi balita nya • Kurang aktif tenaga kesehatan dan kader dalam pelayanan DDTK bagi balita	• Meoptimalkan sosialisasi pelayanan kesehatan balita bagi sasaran • Meoptimalkan kinerja tenaga kesehatan dan kader dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan balita • Memaksimalkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di Fasilitas kesehatan dan posyandu • Perlu ditetapkan sasaran yang memang berdomisili di wilayah kerja (Rill)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	91,21 %	• Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap penting pelayanan kesehatan bagi balita nya • Terdapat sasaran yang berdomisili diluar wilayah kerja	• Meoptimalkan sosialisasi pelayanan kesehatan balita bagi sasaran • Meoptimalkan kinerja tenaga kesehatan dan kader dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan balita • Memaksimalkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di Fasilitas kesehatan dan posyandu Perlu ditetapkan sasaran yang memang berdomisili di wilayah kerja (Rill)
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %		



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	Jenis Layanan Dasar	Capain %	Permasalahan	Solusi
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96,21 %	- Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap penting pelayanan kesehatan bagi balita nya - Terdapat sasaran yang berdomisili diluar wilayah kerja	- Menetapkan sasaran rill dengan melakukan pemetaan di wilayah kerja masing fasyankes - Meningkatkan pengetahuan kader untuk melakukan penjangkaran di masyarakat dengan melakukan edukasi ke masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	92,36 %	- Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini - Masyarakat takut/cemas mengetahui penyakitnya - Tidak ada waktu untuk memeriksakan kesehatan karena faktor kesibukan sehari2 - Penjangkaran oleh kader PTM belum maksimal	- Meningkatkan pengetahuan kader untuk melakukan penjangkaran di masyarakat dengan penyuluhan/ sosialisasi - Melakukan penjangkaran di tempat masyarakat berkumpul (Pasar) - Kerjasama lintas program dengan promkes untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	92,13 %	- Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini - Masyarakat takut/cemas mengetahui penyakitnya - Tidak ada waktu untuk memeriksakan kesehatan karena faktor kesibukan sehari2 - Penjangkaran oleh kader PTM belum maksimal	- Meningkatkan pengetahuan kader untuk melakukan penjangkaran di masyarakat dengan penyuluhan/ sosialisasi - Melakukan penjangkaran di tempat masyarakat berkumpul (Pasar) - Kerjasama lintas program dengan promkes untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %		
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	99,13 %	- Masih rendahnya penjangkaran terduga TB di Fasyankes - Belum optimalnya keg penjangkaran di kelompok tertentu - Masih ada terduga yg menolak untuk diperiksa dahknya	- Meningkatkan kapasitas petugas tentang penjangkaran suspek - Memperkuat kegiatan investigasi kontak - melakukan perluasan informasi tentang TBC
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	98,89 %	- Cak. Pmeriksaan di fasyankes masih rendah - Masih adanya penolakan untuk di lakukan test HIV	- Melakukan penyuluhan tentang HIV - Mempercepat proses aktivasi RSUD untuk layanan PDP sehingga diharapkan akan lebih banyak penjangkaran serta



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	Jenis Layanan Dasar	Capain %	Permasalahan	Solusi
			Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Program dalam pelaksanaa program HIV	pengobatan - Meningkatkan pelayanan kasus HIV tanpa komorbid di Puskesmas Busur sebagai layanan PDP - Memperkuat Koordinas lintas program - Memperluas faskes layanan HIV untuk RS Swasta (RS Yarsi Padang Panjang)

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pekerjaan Umum ini ada 2 (dua) yaitu : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.10
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	60.137
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	60.137
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	60.137
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	56.692
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	3.445
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	60.137
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1	60.137



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	akses pengolahan air limbah domestik)	
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	60.137
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	60.137
	4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1
	5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1

4.3.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yaitu sebesar 91,74% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			91.74%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					92.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.40%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	60137	58935	1,202	98.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.15%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	70.75%
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	60137	51958	8179	86.40%
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	60137	51958	8179	86.40%
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	56692	51278	5414	90.45%
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	3445	680	2765	19.74%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					90.92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.28%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	60137	53582	6,555	89.10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.64%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	98.22%
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	60137	58356	1781	97.04%
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	60137	58356	1781	97.04%
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	60137	58356	1781	97.04%
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00%
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13,373,691,838
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	306,736,800
	APBD	306,736,800
	A. APBD MURNI	306,736,800
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0



4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM baik itu pemenuhan pelayanan air minum maupun pengolahan air limbah. Untuk kondisi tahun 2023 ini, terdapat 5 (lima) orang pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM dibawah koordinasi bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Tabel 4.13
Daftar Pegawai Dinas PUPR Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	SD/SMP	0
2.	SMA/SMK/STM	7
3.	D3	9
4.	S1/DIV	26
5.	S2	5
	Jumlah	47

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM pada Tahun 2023 ini antara lain:

a. Pengumpulan Data

Permasalahan:

1. Metode pengumpulan data survey primer membutuhkan dana yang besar
2. Ketersediaan data awal yang tidak optimal

Solusi :

Diperlukan anggaran untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya

b. Penghitungan Kebutuhan

Permasalahan : Menyusun kebutuhan yang tepat sasaran

Solusi : Perlu analisis yang optimal sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan.

c. Rencana dan Penganggaran

Permasalahan : Sulitnya Membuat perencanaan dan anggaran yang proporsional dikarenakan permasalahan pembangunan daerah yang kompleks dengan keterbatasan anggaran

Solusi : Pembuatan jalur anggaran khusus untuk pencapaian SPM

d. Pelaksanaan

Permasalahan : konflik kepentingan dengan masyarakat

Solusi : pelibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

e. Personil

Permasalahan : Kurangnya personil/pegawai yang terdapat pada bidang yang mengelola Kegiatan SPM

Solusi : Penambahan pegawai untuk bidang pengelola kegiatan SPM



4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat ini ada 2 (dua) yaitu : Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.14
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0,1
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	0,1
2 .	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	0,1
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0
	2. Subsidi uang sewa	0
	3. Penyediaan rumah layak huni	0,1

4.4.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.15
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0.1	0.1	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0.1	0.1	0	100.00 %	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0.1	0.1	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 %	
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0.1	0.1	0	100.00 %	



4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	24,461,517,679
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	83,914,000
	APBD	83,914,000
	A. APBD MURNI	83,914,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.4.5. Dukungan Personil

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berada di bawah Bidang Perumahan dan Permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya
- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan dan permukiman
- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:

- Sub Koordinator Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya
Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengembangan kawasan perumahan formal dan swadaya dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,



pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan formal dan swadaya

- b. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman
Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian kawasan perumahan dan permukiman dalam arti menyelenggarakan validasi data dan pengembangan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman serta perbaikan sanitasi dan penyehatan lingkungan.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang dari bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2023 yaitu:

Tabel 4.17
Permasalahan dan Solusi di Urusan Perumahan Rakyat

No	Permasalahan	Keterangan
1	Pengumpulan Data	SDM dan prasarana dan sarana yang tidak memadai
2	Penghitungan Kebutuhan	SDM dan prasarana dan sarana yang tidak memadai
3	Perencanaan dan Penganggaran	Minimnya penganggaran, dimana kemungkinan adanya kenaikan harga dan bahan bangunan dan konstruksi serta jumlah unit yang akan dibantu
4	Pelaksanaan	SDM dan prasarana dan sarana yang tidak memadai
5.	Pelaporan	SDM dan prasarana dan sarana yang tidak memadai
6	Lain-lain	.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota . Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 (dua) yaitu : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)



4.5.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.18
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	1
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	1
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	12
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	5
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	17
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	13
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	13
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	13
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang	1



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	

4.5.1.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) sebesar 100% (Tuntas Paripurna), dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.19
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	1	1	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	12	12	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	100.00%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	17	17	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	uinit	13	13	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	13	13	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	1	0	100.00%

4.5.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	5,983,418,623
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,274,233,434
	APBD	1,274,233,434
	A. APBD MURNI	1,274,233,434
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	PENDANAAN	PAGU
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.5.1.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang didukung oleh 176 orang personil dengan komposisi 27 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja, 11 orang PNS Pemadam Kebakaran dan 12 orang PPPK Pemadam Kebakaran, jumlah ASN tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 100 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 26 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang :

Tabel 4.21
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	3	0	3
3	SLTA	121	19	140
4	D3	2	4	6
5	S.1	19	6	25
6	S.2	0	1	1
	Jumlah total			176

Tabel 4.22
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	1	0	1
2	II	12	1	13
3	III	16	6	22
4	IV	2	0	2
5	PPPK	11	1	12
6	Honorer/ Banpol PP + Damkar	104	22	126
	Jumlah total			176

Karyawan/ karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2022 berjumlah 175 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 134 Non PNS dengan perincian sebagai berikut :



Tabel 4.23
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Total
1	2	3
1	S2	1 orang
2	S1	25 orang
3	Diploma	6 orang
4	SLTA	140 orang
5	SLTP	3 orang
6	SD	1 orang

4.5.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas seperti : Gedung yang kurang representatif, sarana yang terbatas dalam melaksanakan operasi penegakan Perda dan pelayanan pemadam kebakaran.
- b. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam segi kualitas dan kuantitas.

Solusi

- a. Mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran guna mendukung pelaksanaan tugas dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kota Padang Panjang maupun pemerintah provinsi/ pusat melalui bantuan keuangan/ hibah.
- b. Mengirimkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Penegakan Perda

4.5.2. BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

4.5.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang ada 3 (tiga) yaitu : Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).

4.5.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai berikut:



Tabel 4.24
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	30.000
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	9,187
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	18
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.882
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	151
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	220
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.882
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	0
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	0
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0

4.5.2.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yaitu sebesar 98,33% (Tuntas Utama), dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 4.25
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			98.33%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		30,000	30,000	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	0	1	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	1	1	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	9,187	9,187	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	18	18	0	100.00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,882	1,882	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	151	151	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	220	220	0	100.00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					20.00%
	ya	Tidak Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	0.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat	posko	0	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	0	0	0	0%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0	0%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	0	0	0	0%

4.5.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	5,983,418,623
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,274,233,434
	APBD	1,274,233,434
	A. APBD MURNI	1,274,233,434
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.5.2.5. Dukungan Personil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas : melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi: (a.) Pra bencana; (b.) Saat tanggap darurat; dan (c.) Pasca bencana serta yang berhubungan dengan Kesbangpoldagri dan Hubungan Antar lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai sub-urusan kebencanaan daerah, BPBD Kesbangpol dibantu oleh:



- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang ini bertugas dalam melakukan pelayanan informasi rawan bencana dengan membuat kajian risiko bencana dan melakukan kegiatan sosialisasi, dan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkait dengan rawan bencana.
- Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang ini bertugas dalam melakukan reaksi cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi. Serta menyediakan semua kebutuhan logistik yang diperlukan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- PUSDALOPS

Berada di bawah bidang kedaruratan dan logistik yang bertugas membantu dalam melakukan reaksi cepat tanggap ketika terjadi bencana. Selalu siap siaga selama 24 jam dan siap kapan saja ketika terjadi bencana. Bertugas untuk penyelamatan dan evakuasi bencana. Menerima dan memberikan informasi terkait dengan kebencanaan.
- Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, OPD terkait, BPBD, dan PUSDALOPS yang bertugas ketika terjadi suatu bencana.
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang ini bertugas dalam melakukan Kajian Hitung Pasca Bencana yang fungsinya untuk memperkirakan kerugian terhadap bencana baik itu dalam bentuk jiwa ataupun materil. Selanjutnya, juga melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap rekonstruksi terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Tabel 4.27
Data Tenaga pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Pendidikan	Status Tenaga			Jumlah
		PNS	PPPK	THL	
1.	S2	3			3
2.	S1	14	1	4	19
3.	D III	4		3	7
4.	SMA	8	4	22	34
	Jumlah	29	5	29	63

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (54%) dan Non Aparatur Sipil Negara (46%).

4.5.2.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Pengumpulan Data	• Diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Padang Panjang sebagai acuan dalam melakukan pengumpulan data. • Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Padang Panjang membuat penentuan daerah rawan bencana yang tidak akurat, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
		• Diperlukannya kerjasama dengan Dinas Sosial terkait dengan update data masyarakat tidak mampu (DTKS), karena masyarakat tersebut yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan SPM sehingga mempermudah dalam proses pengumpulan data. • Diperlukannya pendataan ulang terkait dengan potensi bencana di kelurahan secara mendetil dan masyarakat yang beresiko terdampak • Pengumpulan data terkait pendataan terhadap warga yang terdampak bencana dan warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sulit dilakukan secara mendetil • Diperlukannya kerjasama dengan pihak kelurahan dalam hal melakukan pengumpulan data secara detail, agar menghemat waktu pendataan.
2	Penghitungan Kebutuhan	• Perlunya bimbingan teknis terkait tata cara melakukan pengisian dan penghitungan kebutuhan, sehingga yang dihasilkan sesuai dengan aturan. • Penghitungan kebutuhan tidak dapat diprediksi karena kejadian bersifat insidental (tidak dapat diduga)
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Belum tercantumnya kegiatan bencana yang menjadi prioritas kebijakan yang tercantum dalam dokumen daerah seperti RPJMD • Belum tersedianya anggaran untuk pembuatan dokumen-dokumen kebencanaan, sehingga tidak ada acuan yang jelas atau legal dalam penentuan daerah rawan bencana. • Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Lokasi Rawan Bencana yang merupakan dokumen penting yang harus ada di BPBD, dokumen tersebut menjadi acuan dalam membuat perencanaan program kegiatan • Belum terpenuhinya kebutuhan anggaran BPBD Kesbangpol sepenuhnya, baru terfokus kepada penyelamatan dan evakuasi korban bencana, untuk informasi rawan bencana dan pencegahan kesiapsiagaan belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran
4	Pelaksanaan	• Pelaksanaan SPM sub bidang bencana belum dilakukan secara maksimal dan belum dilirik sebagai kegiatan prioritas, sehingga terdapat kendala dalam pemenuhan dan pelaksanaan SPM tersebut terutama dalam hal anggaran.
5	Pelaporan	• Perlunya bimbingan teknis terkait tata cara pelaporan pelaksanaan SPM yang sistematis, sehingga dalam pengisian form yang harus di isi terdapat persamaan persepsi. • Pada indikator SPM yang pemenuhannya harus menggunakan anggaran, target tidak bisa dibikin 0 sehingga dalam penilaian realisasi otomatis bernilai 0%, yang mengakibatkan menurunkan rata-rata total nilai capaian SPM secara keseluruhan. • Pada indikator SPM yang terkait dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sulit untuk menentukan target karna bencana datang tidak dapat diprediksi. Ataupun ketika tidak terjadi bencana didaerahnya, mengakibatkan nilai capaian realisasi SPM menjadi rendah atau dihitung tidak tercapai.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Sosial ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar



Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Sosial ini ada 3 (tiga) yaitu :

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
- 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.29
Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	244
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Layanan data dan pengaduan	1
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2
	3. Penyediaan permakanaan	244
	4. Penyediaan sandang	244
	5. Penyediaan alat bantu	35
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	30
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	13. Layanan rujukan	1
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	13
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Layanan data dan pengaduan	1
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1
	3. Penyediaan permakanaan	13
	4. Penyediaan sandang	2
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	13
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	5
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	1



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	1
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	12. Layanan rujukan	1
	15. Pengalaman pelatihan guru	1
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	151
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Layanan data dan pengaduan	1
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1
	3. Penyediaan permakanaan	151
	4. Penyediaan sandang	151
	5. Penyediaan alat bantu	5
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	5
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	1
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1
	13. Layanan rujukan	1
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	67
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Layanan data dan pengaduan	1
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1
	3. Penyediaan permakanaan	5
	4. Penyediaan sandang	2
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	67
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	1
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16
	12. Layanan rujukan	1
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	Ya, Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	380
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Penyediaan permakanaan	380



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
	2. Penyediaan sandang	38
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	380
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	74

4.6.3. Realisasi

Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.30
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		244	244	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	244	244	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	244	244	0	100.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	35	35	0	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	30	0	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12 . Pemberian	Orang	1	1	0	100.00%	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan reunifikasi keluarga						
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		13	13	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	13	13	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100.00%	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	13	13	0	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	5	5	0	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		151	151	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	151	151	0	100.00%	
	4 . Penyediaan	Orang	151	151	0	100.00%	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	sandang						
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	100	100	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	5	5	0	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%	
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00%	
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		67	67	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	5	5	0	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	67	67	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	0	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen	Orang	2	2	0	100.00%	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	kependudukan						
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	16	16	0	100.00%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
5 .	Perindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
	Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		380	380	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	380	380	0	100.00%	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	38	38	0	100.00%	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2	2	0	100.00%	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	380	380	0	100.00%	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	74	74	0	100.00%	

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Sosial pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Urusan Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	545,779,463,681
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	11,396,316,307
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,319,069,319
	APBD	464,193,319
	A. APBD MURNI	464,193,319
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	854,876,000
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	854876000
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	854,876,000
	DANA LAINNYA	0



4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dukungan personil dalam pencapaian kinerja standar pelayanan minimal Bidang Urusan Sosial ini pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1	1
2	SMA Sederajat	3	3	12	4	22
3	D3	1	3	1	3	8
4	S1	4	20	2	6	32
5	S2	3	2	-	-	5
Jumlah		11	28	15	14	68
		39		29		

Untuk dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Padang Panjang pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 2 orang
- Pekerja Sosial Profesional : 1 orang
- Penyuluh Sosial Masyarakat : 92 orang
- Relawan Sosial : 24 orang
- Taruna Siaga Bencana : 28 orang
- Karang Taruna : 19 Kelompok
- LK3 Raudhah : 1 Lembaga
- Pendamping Disable : 18 orang
- Pendamping PKH : 7 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang tersedia belum optimal
Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan pendanaan.
- Data PPKS belum akurat
Terdapat beberapa kriteria dan teknik pengumpulan data yang berbeda dari beberapa instansi, sehingga membuat tidak tersedianya data yang komprehensif dalam penyusunan/perhitungan kebutuhan.
- Petugas lapangan belum memadai
Masih kurangnya SDM petugas lapangan yang ada.



d. Pelaksanaan

Masih belum optimalnya koordinasi antara para stakeholder

Menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 di Kota Padang Panjang dapat diatasi dengan solusi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PPKS lebih lanjut.
- b. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM petugas lapangan serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				2,145,049,345	1,864,839,184	86.94%
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				1,294,012,600	1,132,865,389	87.55%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			13,180,000	13,180,000	100.00%
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	13,180,000	13,180,000	100.00%
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	0%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				13,180,000	13,180,000	100.00%
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			1,205,832,600	1,044,685,389	86.64%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas	Kegiatan	135,300,000	73,497,500	54.32%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	30,621,600	30,621,600	100.00%
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	1,039,911,000	940,566,289	90.45%
	JUMLAH INDIKATOR				1,205,832,600	1,044,685,389	86.64%
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			75,000,000	75,000,000	100.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	75,000,000	75,000,000	100.00%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				75,000,000	75,000,000	100.00%
	JUMLAH PROGRAM				1,294,012,600	1,132,865,389	87.55%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				536,391,195	536,391,195	100.00%
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			536,391,195	536,391,195	100.00%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	178,797,000	178,797,000	100.00%
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	357,594,195	357,594,195	100.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH INDIKATOR				536,391,195	536,391,195	100.00%
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				536,391,195	536,391,195	100.00%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				314,645,550	195,582,600	62.16%
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			314,645,550	195,582,600	62.16%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	314,645,550	195,582,600	62.16%
	JUMLAH INDIKATOR				314,645,550	195,582,600	62.16%
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan	Guru	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			peraturan perundang-undangan				
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				314,645,550	195,582,600	62.16%
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

2. URUSAN KESEHATAN

Tabel 4.30
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,006,244,100	796,796,535	79.19%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,006,244,100	796,796,535	79.19%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,006,244,100	796,796,535	79.19%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	220,091,600	155,605,160	70.70%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	20,560,100	16,537,400	80.43%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	17,104,250	4,375,475	25.58%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	32,000,000	25,150,000	78.59%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	144,799,850	95,450,000	65.92%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	28,485,600	13,600,000	47.74%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	427,100,000	426,450,000	99.85%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	20,918,300	16,083,850	76.89%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	17,711,350	7,946,250	44.87%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan	Orang	14,800,000	10,250,000	69.26%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jiwa Berat				
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	53,920,550	18,403,400	34.13%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	8,752,500	6,945,000	79.35%
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,006,244,100	796,796,535	79.19%
	JUMLAH PROGRAM				1,006,244,100	796,796,535	79.19%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.31
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				306,736,800	272,782,636	88.93%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				62,665,600	62,020,000	98.97%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			62,665,600	62,020,000	98.97%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	62,665,600	62,020,000	98.97%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh	Kelompok Masyarakat	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat				
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				62,665,600	62,020,000	98.97%
	JUMLAH PROGRAM				62,665,600	62,020,000	98.97%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				244,071,200	210,762,636	86.35%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			244,071,200	210,762,636	86.35%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	66,000,000	65,393,000	99.08%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		178,071,200	145,369,636	81.64%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				244,071,200	210,762,636	86.35%
	JUMLAH PROGRAM				244,071,200	210,762,636	86.35%
KEGIATAN LAINNYA							



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				83,914,000	0	0.00%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				83,914,000	0	0.00%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0.00%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			83,914,000	0	0.00%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	56,940,000	0	0%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	26,974,000	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				83,914,000	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				83,914,000	0	0.00%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				6,295,232,234	6,045,140,174	96.03%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				3,758,130,000	3,713,129,200	98.80%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,589,863,200	3,553,832,400	99.00%
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	3,589,863,200	3,553,832,400	99.00%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3,589,863,200	3,553,832,400	99.00%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			168,266,800	159,296,800	94.67%
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	168,266,800	159,296,800	94.67%
	JUMLAH INDIKATOR				168,266,800	159,296,800	94.67%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			0	0	0.00%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				3,758,130,000	3,713,129,200	98.80%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,274,223,434	1,110,737,374	87.17%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			37,879,834	33,581,550	88.65%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	37,879,834	33,581,550	88.65%
	JUMLAH INDIKATOR				37,879,834	33,581,550	88.65%
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,104,350,600	972,662,574	88.08%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	83,045,300	79,130,225	95.29%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana	Dokumen	958,509,000	887,722,499	92.61%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota				
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		62,796,300	5,809,850	9.25%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,104,350,600	972,662,574	88.08%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			131,993,000	104,493,250	79.17%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	131,993,000	104,493,250	79.17%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH INDIKATOR				131,993,000	104,493,250	79.17%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0.00%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				1,274,223,434	1,110,737,374	87.17%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1,262,878,800	1,221,273,600	96.71%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			1,262,878,800	1,221,273,600	96.71%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,262,878,800	1,221,273,600	96.71%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan,	Unit	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0%
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,262,878,800	1,221,273,600	96.71%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	0	0.00%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam	Dokumen	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana				
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0.00%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				1,262,878,800	1,221,273,600	96.71%
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

6. URUSAN SOSIAL

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				464,193,319	431,568,850	92.97%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				198,050,000	171,623,600	86.66%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			198,050,000	171,623,600	86.66%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	74,200,000	53,070,250	71.52%
		2	Penyediaan sandang	Orang	96,850,000	95,540,550	98.65%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	1,000,000	1,000,000	100.00%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	25,000,000	21,021,600	84.09%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,000,000	991,200	99.12%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				198,050,000	171,623,600	86.66%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			0	0	0.00%
		1	Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				198,050,000	171,623,600	86.66%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spritual dan Sosial		63,800,000	63,631,500	99.74%
		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada kegiatan penyediaan permakanan		123,000,000	122,716,150	99.77%



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		79,343,319	73,597,600	92.76%



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara aplikatif menjadi wahana dan sarana bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2023. Sehingga dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Padang Panjang mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini merupakan suatu proses komitmen dan *political will* dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar stakeholder terkait dalam mewujudkan *Good Local Governance*.

Pada akhirnya kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sumatera Barat akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.